

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 57 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga diperlukan langkah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon dengan menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah yang mengamanatkan Bupati menyusun rencana aksi kabupaten penanganan fakir miskin dan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai penjabaran dari strategi dan program kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Daerah terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);

10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 79);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2025 tentang pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2025 Tambahan Lembaran daerah Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 65 Tahun 2017);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman dan partisipasi.
8. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
9. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
12. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan, untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dan bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPK Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.

14. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
15. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
18. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

24. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
25. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/ layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
26. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
27. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
28. Pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya RPKD adalah :
 - a. menggambarkan kondisi umum kemiskinan Daerah saat ini untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai, menjabarkan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Daerah;
 - b. menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong sinergi berbagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan lintas Perangkat Daerah dan antar seluruh pelaku pembangunan; dan
 - c. menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

(2) Tujuan disusunnya RPKD adalah:

- a. sebagai acuan dalam memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama dalam penyusunan program kerja tahun 2025-2029;
- b. sebagai pedoman dalam mengoordinasikan dan mensinergikan kolaborasi berbagai peran perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan;
- c. sebagai dokumen publik maka RPKD juga digunakan sebagai pedoman seluruh pelaku pembangunan baik dunia usaha (swasta), masyarakat, dan berbagai pihak dalam mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan secara terarah dan sinergis;
- d. sebagai pedoman pengukuran kinerja penanggulangan kemiskinan Daerah melalui pencapaian target-target yang telah ditetapkan dan untuk menjawab tantangan tujuan pembangunan berkelanjutan memenuhi capaian indikator kemiskinan baik tingkat global maupun lokal.

BAB IV SISTEMATIKA RPKD

Pasal 4

(1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Kondisi Umum Daerah;
- c. BAB III : Profil dan Analisis Kemiskinan Daerah ;
- d. BAB IV : Gambaran Keuangan Daerah dan Analisis Anggaran;
- e. BAB V : Penguatan Kelembagaan dan Peran Pemerintah Daerah, Swasta/Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon;
- f. BAB VI : Lokasi Prioritas Pengentasan Kemiskinan;
- g. BAB VII : Prioritas Program;
- h. BAB VIII : Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029;
- i. BAB IX : Penutup

(2) Ketentuan dan isi dari sistematika RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui TKPKD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Evaluasi pelaksanaan RPKD dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk memastikan apakah capaian Rencana Aksi Daerah di perangkat daerah, masyarakat, pelaku usaha dan filantropi telah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan mengatasi permasalahan yang ada dan/atau mengantisipasi permasalahan yang akan timbul.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Perangkat daerah, dunia usaha atau filantropi yang mencantumkan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dalam lampiran peraturan bupati ini wajib melaporkan progres pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Bapperida selaku sekretariat TKPKD Cirebon setiap triwulan.
- (2) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah penanggulangan kemiskinan triwulanan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan pada akhir triwulan.
- (3) Laporan triwulan IV atau laporan akhir tahun akan direkap dan dilaporkan oleh Bupati melalui Bapperida kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bappeda dan Pemerintah Pusat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

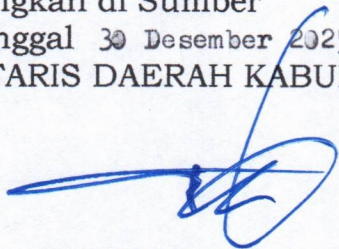
Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HENDRA NIRMALA
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 55 TAHUN 2025

TANGGAL : 30 DESEMBER 2025

TENTANG : RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang terjadi di suatu wilayah karena ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan yang menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah (Izazi & Boedirochminarni, 2023). Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang mencakup kebutuhan makanan dan non-makanan. Sulitnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan dan pekerjaan dapat menyebabkan kemiskinan yang berdampak terhadap kurangnya kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan mencakup aspek sosial, kesehatan, pendidikan, politik, dan ekonomi.

Upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi kemiskinan dilakukan dengan berbagai kebijakan dan program untuk pengentasan kemiskinan, namun belum berhasil karena masih banyak daerah yang tergolong miskin. Oleh sebab itu kemiskinan harus segera ditangani secara komprehensif agar masyarakat dapat terlepas dari kemiskinan. Upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengubah keadaan seseorang dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat (Syarifah, F. A. 2024).

Status sosial ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat (Ranja, H. H. 2024). Faktor sosial ekonomi terdiri dari faktor internal yang cenderung melekat pada masyarakat, seperti tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah, dan produktivitas yang rendah. Faktor eksternal terdiri dari teknologi, potensi alam, dan rendahnya akses ke institusi pendidikan yang ada. Kedua komponen ini menentukan seberapa mudah masyarakat miskin memanfaatkan peluang ekonomi untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Meningkatkan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah semangat yang menunjukkan keyakinan kuat bahwa Indonesia tidak akan menerima kemiskinan. Kehidupan masyarakat tidak selalu dapat hidup dengan baik meskipun ada banyak kekayaan alam. Bahkan bisa jadi sebaliknya, kemiskinan tidak terlihat secara kasat mata.

Angka kemiskinan di suatu wilayah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek sosial

maupun ekonomi. Tingkat kemiskinan diukur berdasarkan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran, baik untuk kebutuhan pangan maupun non-pangan, di bawah garis kemiskinan Berdasarkan data BPS (Maret 2023) Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022.

Kemiskinan menjadi masalah yang belum dapat terselesaikan karena kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan yang lain dengan tingkat kemiskinan yang berbeda di setiap daerah termasuk tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon (Cahyani, F. 2024). Kemiskinan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran, ketimpangan sosial serta tingginya angka kematian. Hal ini perlu adanya kontribusi pemerintah pusat dan daerah kepada masyarakat agar masalah kemiskinan segera teratasi. Oleh karena itu, semua bagian masyarakat harus bekerja sama untuk memerangi kemiskinan agar kesejahteraan masyarakat terwujud.

Jumlah penduduk miskin merujuk pada individu yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan sebagai jumlah rupiah yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum yang layak. Standar ini didasarkan pada 20% kelompok penduduk tidak miskin terbawah yang disebut sebagai kelompok acuan. Definisi Operasional Garis Kemiskinan adalah pengeluaran kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal per kapita per hari, serta kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya

Bila dilihat dari data penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Cirebon masih dikatakan belum cukup berhasil karena pada tahun 2025 Kabupaten Cirebon berada di urutan ke 5 persentase penduduk miskin terbanyak dengan persentase (10,23%) dibanding persentase penduduk miskin Kabupaten Indramayu (11,02 %) Kota Tasikmalaya (10,84 %) Kabupaten Kuningan (10,74 %) dan Kabupaten Majalengka (10,31 %) Tentu hal ini menjadi masalah yang harus segera diatasi agar tidak ada kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dengan berbagai kebijakan dan program kerja yang menghabiskan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan. Namun, ada banyak hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut, yang membuat hasilnya belum optimal. Oleh sebab itu perlu kerja sama antara pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kebijakan yang dapat mendorong masyarakat untuk memiliki pekerjaan (Hanafi, A. 2021).

Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon ini selaras dengan visi pembangunan yang tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis dan Aman. Makna visi Maju ini mencerminkan kondisi masyarakat yang memiliki kualitas hidup tinggi, ekonomi yang kuat dan berdaya saing didukung infrastruktur yang memadai dan daya dukung lingkungan berkelanjutan berbasis teknologi modern dan

kearifan budaya lokal. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 misi Buapti dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 yaitu

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan professional
2. Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat.
3. Menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya.
4. Memperkuat toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya.
5. Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 menyebutkan bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah pembangunan yang sangat krusial untuk dipecahkan. Salah satu isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 adalah percepatan penanggulangan kemiskinan. Dalam prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 pada prioritas keempat disebutkan Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan daya saing tenaga kerja. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah kemiskinan dan pengangguran seiring dengan peningkatan angka kemiskinan menunjukkan masih perlunya peningkatan pembangunan di setiap sektor.

Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan daerah (RPKD) di Kabupaten Cirebon didasarkan atas pendekatan berbasis hak. Pendekatan berbasis hak dalam penanggulangan kemiskinan mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif. Dokumen ini memberikan acuan cara-cara dan tahapan sistematis yang harus ditempuh dan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, swasta, masyarakat, dan berbagai pihak dalam upaya mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cirebon ada beberapa landasan hukum yang terkait antara lain

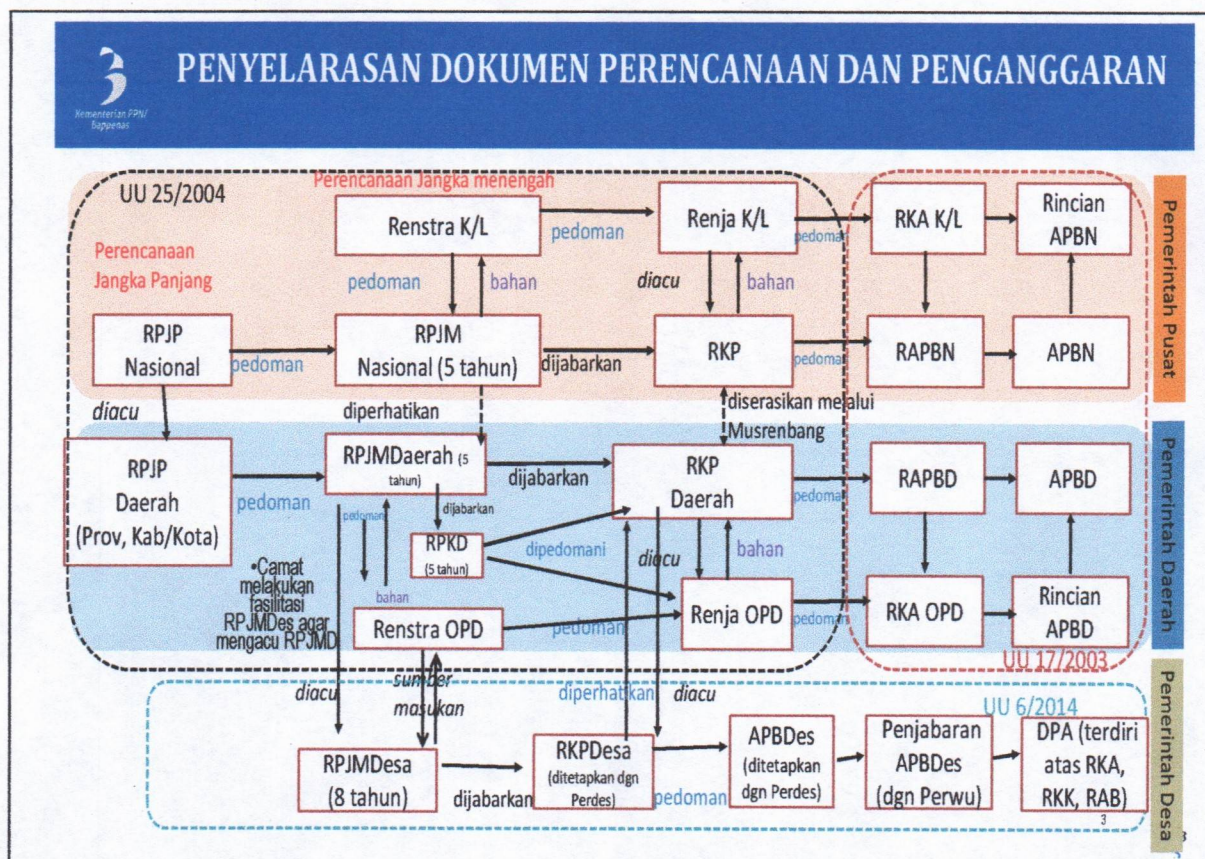
- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin
- m. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- n. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- o. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Pananggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- s. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendaayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
- t. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- u. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

- v. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
- w. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
- x. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
- y. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- z. Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/Huk/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045
- bb. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
- ee. Peraturan Bupati Cirebon Nomor Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon;
- ff. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
- gg. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 050 /Kep.125 – BAPPELITBANGDA/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Cirebon.

1.3 Hubungan antara Dokumen RPKD dengan dokumen perencanaan lainnya

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota bahwa Rencana Penanggulangan kemiskinan Daerah Kabupaten/Kota menjadi bagian dari dokumen RPJMD . Hubungan dokumen RPKD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana dalam Gambar 1.3 sebagai berikut.



Hubungan antara dokumen RPKD yang merupakan bagian dari dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sebagaimana dalam Gambar 1.3 dapat dijelaskan sebagai berikut : RPKD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Cirebon memperhatikan dan selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Hal tersebut dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Cirebon bertujuan adalah untuk melihat arah pembangunan nasional 2025-2029. Pada prinsipnya, melalui arahan pembangunan nasional tahun 2025-2029 yang dijabarkan dan ditelaah melalui RPJPN 2025-2045 periode ke I menjadi acuan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.
2. RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Penyelarasan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Barat dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan kewilayahan dan seluruh urusan (sektoral) lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
3. RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 Tahap I. Dengan demikian dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Cirebon juga memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 Tahap pertama yang di dalamnya ada arah kebijakan percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan ada indikator kinerja berupa tingkat kemiskinan tahun 2025-2029 pada target 10,15 % - 8,31 %

4. RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 memuat isu strategis percepatan penanggulangan kemiskinan dan memuat prioritas pembangunan daerah yang keempat yaitu penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan daya saing tenaga kerja. RPJMD juga memuat sasaran daerah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi, infrastruktur dengan indikator kinerja antara lain tingkat kemiskinan dengan target tahun 2025 sebesar 10,70 % dan target tahun 2030 sebesar 8,10 %. Untuk mewujudkan terget kinerja persentase penduduk di bawah garis kemiskinan selama tahun 2025-2030 diperlukan roadmap yang jelas yang dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 yang merupakan bagian dari dokumen RPJMD
5. Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 Bab III disebutkan ada beberapa dimensi pembangunan diantaranya kesejahteraan masyarakat dengan isu permasalahan masih tingginya jumlah PPKS, belum efektifnya optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal yang dasar penetapannya dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Dengan adanya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tiap tahunnya terutama untuk mendukung prioritas pembangunan daerah yang keempat yaitu penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Dan juga RKPD memuat program kolaborasi percepatan penanggulangan kemiskinan yang memuat rencana aksi penanggulangan kemiskinan tahun 2026 atau tahun 2027 yang diambil dari RPKD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.
7. Dengan adanya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk tiap tahunnya untuk masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana aksi penanggulangan kemiskinan yang ada dalam RPKD secara teknis dituangkan dalam pra RKA sesuai sub kegiatan yang terkait di masing-masing perangkat daerah.
8. Rencana aksi penanggulangan kemiskinan dari RPKD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA dan DPA sub kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dan tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) adalah :

- a. Melakukan identifikasi, melakukan kajian kondisi dan faktor penyebab kemiskinan atau akar permasalahan kemiskinan;
- b. Melakukan analisis kondisi kemiskinan dan potensi yang tersedia;

- c. Melakukan review, evaluasi atau mengkaji ulang pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- d. Menginventarisir dan memberdayakan peran berbagai pihak yang terkait dalam Program Penanggulangan Kemiskinan
- e. Mereview dan menyusun agenda kebijakan, program aksi dan kegiatan dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon.
- f. Menyusun sistem pengendalian, monitoring, dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah.

1.5 Sasaran

Sasaran dari kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) di Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 adalah tersusunnya agenda kebijakan, kejelasan pembagian peran berbagai pihak yang terlibat, program, kegiatan dan rencana aksi dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon yang relevan, realistis dan aplikatif dan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon yang dapat dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang terkait serta pedoman bagi Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan untuk bekerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan (RPKAD) di Kabupaten Cirebon adalah :

- Bab I : Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum yang terkait, tujuan, manfaat, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Kondisi Umum Daerah
- Bab III : Profil dan Analisis Kondisi Kemiskinan Daerah
- Bab IV : Gambaran Keuangan Daerah dan Analisis Anggaran
- Bab V : Penguatan Kelembagaan dan Peran Pemerintah Daerah, Swasta/Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon
- Bab VI : Lokasi Prioritas Pengentasan Kemiskinan
- Bab VII : Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan.
- Bab VIII : Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030
- Bab IX : Penutup.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

2.1.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kawasan industri Rebana, akronim dari Cirebon–Patimban–Kertajati, diproyeksikan sebagai masa depan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini dipersiapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, didukung oleh kehadiran infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan laut internasional, dan bandar udara bertaraf internasional. Letaknya yang strategis membentuk segitiga pertumbuhan yang menghubungkan wilayah Cirebon, Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, dan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka, menjadikan kawasan ini sangat potensial dalam mendukung konektivitas logistik dan rantai pasok industri regional maupun nasional.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021, kawasan Rebana telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan menarik investasi, sekaligus menjadikan kawasan ini sebagai episentrum baru perekonomian Jawa Barat. Dengan cakupan wilayah yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang, kawasan ini diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan wilayah berbasis industri, logistik, dan jasa.

Kabupaten Cirebon sendiri memiliki peran strategis dalam pengembangan kawasan ini, dengan fokus pada pengembangan industri pengolahan makanan dan minuman, furnitur dan produk kayu, industri perkapalan, pakan ternak, bahan galian non-logam, bahan bangunan, pengolahan garam konsumsi, serta pengolahan hotmix dan beton. Spesialisasi ini memberikan peluang besar bagi peningkatan nilai tambah ekonomi lokal serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Ke depan, potensi Kabupaten Cirebon dalam mendukung kawasan Rebana dapat terus diperluas melalui beberapa strategi pengembangan. Pertama, penguatan ekosistem industri berbasis digital dan teknologi hijau untuk mendorong industrialisasi berkelanjutan. Kedua, optimalisasi konektivitas antar moda transportasi untuk mendukung efisiensi distribusi logistik. Ketiga, pengembangan kawasan permukiman dan pusat layanan publik terpadu yang ramah investasi dan ramah lingkungan untuk mendukung kawasan industri sebagai bagian dari kota baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, potensi wisata budaya dan sejarah di Kabupaten Cirebon juga dapat dikembangkan secara sinergis dengan sektor industri kreatif, sebagai penopang ekonomi alternatif dan daya tarik tambahan bagi investor dan wisatawan. Melalui pendekatan pengembangan yang holistik dan berkelanjutan, kawasan Rebana, khususnya di Kabupaten Cirebon, diharapkan mampu

menjadi model transformasi wilayah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Selain termasuk kedalam Kawasan industri Rebana, Kabupaten Cirebon memiliki posisi strategis (*geo-strategic*) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Cirebon telah ditetapkan menjadi pendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Metropolitan Cirebon Raya (MCR);
- 2) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berpotensi terjadi interaksi sumber daya dari dua provinsi dan berpeluang untuk pengembangan Kabupaten Cirebon;
- 3) Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang membentang jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) Cikampek-Palimanan (Cipali), Palimanan-Kanci (Palikanci), dan Kanci-Pejagan;
- 4) Kabupaten Cirebon berada di jalur utama lintasan kereta api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya);
- 5) Kabupaten Cirebon menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan salah satu pemasok Listrik nasional jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali.
- 6) Kabupaten Cirebon sebagai Pusat Pengembangan *Edu-Heritage* (Budaya dan Sejarah)

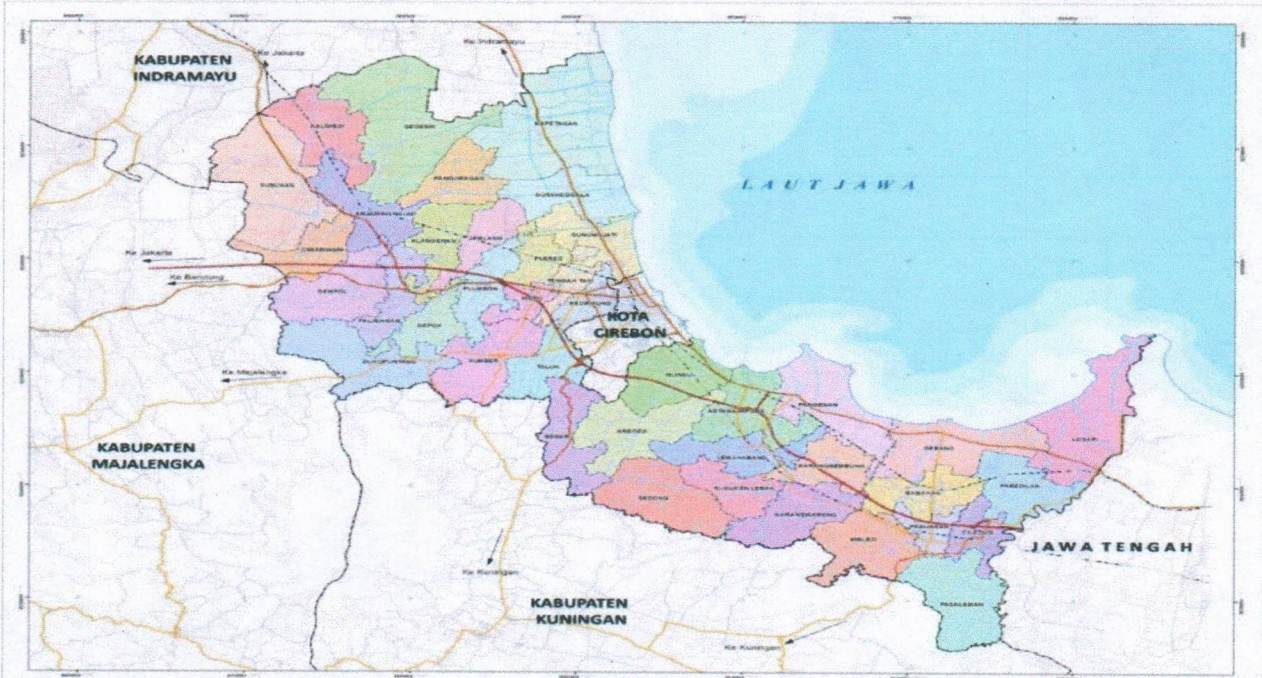
Secara geografis, Kabupaten Cirebon terletak pada posisi 6° 30' 58" – 7° 00' 24" Lintang Selatan dan 108° 19' 30" – 108° 50' 03" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Cirebon, adalah berupa daratan seluas 1.070,29 km2. Wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian bervariasi. Secara umum, daerah Pantura ini didominasi oleh dataran rendah. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Kabupaten Kuningan ¹
Sebelah Barat	: Kabupaten Majalengka
Sebelah Timur	: Kabupaten Brebes Provinsi dan Jawa Tengah

Tahun 2023, wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan dengan 424 Desa/Kelurahan. Luas wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapetakan (67,04 km2) diikuti Kecamatan Gegesik (63,83 km2), sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Weru (9,11 km2).

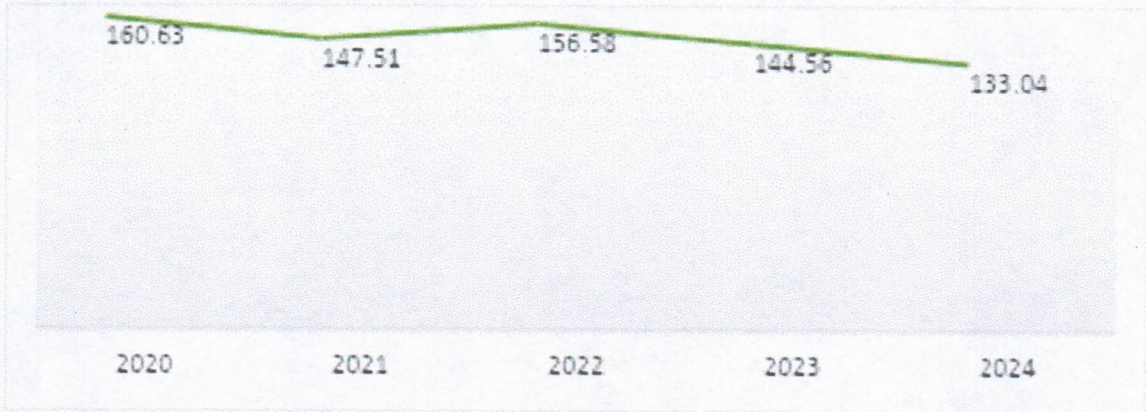
1

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Cirebon



Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.1.1.2 Indeks Resiko Bencana



Kondisi risiko bencana merupakan gambaran terkini dari berbagai macam bencana yang terdapat di Kabupaten Cirebon. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cirebon tahun 2024 sebesar 133,04 masuk dalam kategori sedang. Potensi bencana di Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan berdasarkan bencana alam dan bencana non alam (kebakaran). Berdasarkan pengolahan data digital spasial, dapat diketahui bahwa luas potensi rawan bencana mencapai 68.203,33 Ha, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Berdasarkan data tabel dibawah, tingkat kerawanan bencana yang paling tinggi di Kabupaten Cirebon adalah golongan Rawan Bencana dengan luas kerawanan bencana sebesar 31.278,9 Ha dan tingkat kerawanan bencana paling sedikit di Kabupaten Cirebon adalah golongan sangat rawan bencana dengan luas kerawanan bencana sebesar 4.160,1 Ha.

Tabel 2.10
Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon (Ha)

No	Kecamatan	Tingkat Kerawanan Bencana				Jumlah
		Kurang Rawan	Rawan	Sangat Rawan	Tidak Rawan	
1.	Arjawinangun	0	115,24	0	1.695,55	1.810,79
2.	Astanajapura	505,41	1.639,35	65,91	0	2.210,67
3.	Babakan	120,16	1.578,83	0	0	1.698,99
4.	Beber	0	1.105,39	0	0	1.105,39
5.	Ciledug	0	1.097,66	0	0	1.097,66
6.	Ciwaringin	0	0	0	1.388,99	1.388,99
7.	Depok	0	1.027,11	0	402,51	1.429,62
8.	Dukuhpuntang	0	448,38	0	1.614,64	2.063,02
9.	Gebang	0	1.097,66	1.607,74	0	2.705,40
10.	Gegesik	0	0	0	5.498,50	5.498,50
11.	Gempol	0	0	0	1.386,41	1.386,41
12.	Greged	785,86	656,15	0	0	1.442,01
13.	Gunungjati	0	602,12	0	0	602,12
14.	Jamblang	126,84	1.247,82	0	0	1.374,66
15.	Kaliwedi	0	0	0	2.597,23	2.597,23
16.	Kapetakan	0	187,87	0	3.710,01	3.897,88
17.	Karangsembung	11,85	1.612,62	0	0	1.624,47
18.	Karangwareng	340,15	1.217,88	0	0	1.558,03
19.	Kedawung	0	134,16	0	0	134,16
20.	Klangenan	232,25	1.301,99	0	65,45	1.599,69
21.	Lemahabang	682,56	598,19	8,73	0	1.289,48
22.	Losari	0	1270,7	548,82	0	1.819,52
23.	Mundu	928,75	1221,1	0	0	2.149,85
24.	Pabedilan	0	1.770,38	368,15	0	2.138,53
25.	Pabuaran	156,42	618,84	0	0	775,26
26.	Palimanan	11,83	409,55	0	1.011,41	1.432,79
27.	Pangenan	219,83	544,83	1.560,84	0	2.325,50
28.	Panguragan	0	1.032,35	0	1.004,21	2.036,56
29.	Pasaleman	28,47	1.067,86	0	904,19	2.000,52
30.	Plered	0	116,19	0	0	116,19
31.	Plumbon	0	523,42	0	0	523,42
32.	Sedong	1.276,84	0	0	0	1.276,84
33.	Sumber	0	1.982,45	0	0	1.982,45
34.	Suranenggala	0	1.366,82	0	379,38	1.746,20
35.	Susukan	0	666,52	0	3.374,50	4.041,02
36.	Susukan Lebak	1.320,58	39,15	0	0	1.359,73
37.	Talun	273,04	1.204,54	0	0	1.477,58
38.	Tengah Tani	0	107,03	0	0	107,03
39.	Waled	710,42	1.431,05	0	0	2.141,47
40.	Weru	0	237,7	0	0	237,70
Kabupaten Cirebon		7.731,26	31.278,90	4.160,19	25.032,98	68.203,33

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPBD (2018), data yang dikelola dalam SIPD

Adapun potensi bencana di Kabupaten Cirebon yang dapat dikelompokkan berdasarkan bencana alam dan bencana non alam (kebakaran) sebagai berikut.

A. Bencana Alam

Potensi rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Cirebon dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis bencana alam, berikut di bawah ini merupakan data jenis potensi rawan bencana alam berdasarkan kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.11
Jenis Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Rawan Bencana			
		Kekeringan	Banjir	Longsor	Angin Puting Beliung
1.	Waled	√	-	√	-
2.	Pasaleman	-	√	-	-
3.	Ciledug	√	√	-	-
4.	Pabuaran	-	-	-	√
5.	Losari	√	√	-	√
6.	Pabedilan	√	√	-	-
7.	Babakan	-	√	-	-
8.	Gebang	√	√	-	-
9.	Karangsembung	√	-	-	√
10.	Karangwareng	-	-	-	-
11.	Lemahabang	√	√	-	-
12.	Susukan Lebak	√	-	-	-
13.	Sedong	√	-	√	-
14.	Astanajapura	√	√	-	√
15.	Pangenan	√	√	-	-
16.	Mundu	√	√	-	-
17.	Beber	√	-	√	-
18.	Greged	-	-	√	-
19.	Talun	-	-	-	-
20.	Sumber	√	-	√	-
21.	Dukupuntang	-	-	√	-
22.	Palimanan	√	-	-	√
23.	Plumbon	√	√	-	-
24.	Depok	√	-	-	-
25.	Weru	√	-	-	-
26.	Plered	√	√	-	-
27.	Tengah Tani	√	√	-	-
28.	Kedawung	√	-	-	-
29.	Gunungjati	-	√	-	-
30.	Kapetakan	√	√	-	-
31.	Suranenggala	√	√	-	-
32.	Klangenan	√	-	-	-
33.	Jamblang	-	-	-	√
34.	Arjawinangun	√	√	-	-
35.	Pangurangan	√	√	-	-
36.	Ciwaringin	√	-	-	-
37.	Gempol	-	-	-	-
38.	Susukan	√	√	-	-
39.	Gegesik	√	√	-	√
40.	Kaliwedi	√	√	-	-

Sumber: BPBD Kabupaten Cirebon, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan data di atas, jenis bencana alam yang sering melanda setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon adalah kekeringan, hal tersebut dikarenakan dari 40 (empat puluh) kecamatan, 30 (tiga puluh) kecamatan di Kabupaten Cirebon memiliki rawan bencana kekeringan. Sedangkan, jenis bencana alam yang paling sedikit melanda kecamatan di Kabupaten Cirebon adalah jenis bencana alam longsor dan angin puting.

Upaya penanganan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) termasuk OPD terkait sesuai tupoksinya yang dibantu oleh: TNI, Polri, Basarnas, Orari dan PMI. Upaya perbaikan infrastruktur dalam rangka meminimalisir resiko yang diakibatkan bencana, dilakukan oleh:

- BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melakukan sosialisasi di daerah rawan bencana;
- BBWS Cimanuk dan Cisanggarung melakukan normalisasi sepanjang aliran sungai Cisanggarung, normalisasi sodetan, peninggian tanggul dan perbaikan pentil-pentil saluran air sepanjang Sungai Cisanggarung.

B. Bencana Kebakaran

Selain bencana alam, potensi lainnya adalah bencana kebakaran. Berdasarkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Cirebon, dapat diketahui kondisi sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran seperti ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Cirebon

No	Pos Sektor Jaga	Anggota	MOBIL PEMADAM			Tandon Air	Cakupan Wilayah
			Mobil Pancar	Mobil Tangki Air	Mobil Koman do		
1	DINAS	34			1		
2	SUMBER	20	1	1		1	4 1. KEC. SUMBER 2. KEC. TALUN 3. KEC. DEPOK 4. KEC. DUKUPUNTANG
3	WERU	19	2			1	5 1. KEC. WERU 2. KEC. PLERED 3. KEC. TENGAH TANI 4. KEC. PLUMBON 5. KEC. KEDAWUNG
4	ARJAWINANGUN	15	1			1	5 1. KEC. ARJAWINANGUN 2. KEC. PANGURAGAN 3. KEC. SUSUKAN 4. KEC.KALIWEDI 5. KEC. GEGESIK

No	Pos Sektor Jaga	Anggota	MOBIL PEMADAM			Tandon Air	Cakupan Wilayah
			Mobil Pancar	Mobil Tangki Air	Mobil Koman do		
5	PALIMANAN	16	1			1	5 1. KEC. PALIMANAN 2. KEC. JAMBLANG 3. KEC. KLANGENAN 4. KEC. CIWARINGIN 5. KEC. GEMPOL
6	GUNUNG JATI	18	1			1	3 1. KEC. GUNUNGJATI 2. KEC. SURANENGGALA 3. KEC. KAPETAKAN
7	LEMAHABANG	14	1			1	3 1. KEC. LEMAHABANG 2. KEC. KARANGSEMBUNG 3. KEC. SUSUKAN LEBAK
8	CILEDUG	13		1		1	3 1. KEC. CILEDUG 2. KEC. PASELEMAN 3. KEC. BABAKAN
9	CIKULAK	13	1			1	3 1. KEC. KARANGWARENG 2. KEC. PABUARAN 3. KEC. WALED
10	LOSARI	13	1			1	3 1. KEC. LOSARI 2. KEC. GEBANG 3. KEC. PABEDILAN
11	PANGENAN	17	1			1	3 1. KEC. PANGENAN 2. KEC. ASTANAJAPURA 3. KEC. MUNDU
12	GREGED	13	1			1	3 1. KEC. SEDONG 2. KEC. GREGED 3. KEC. BEBER
	Total	205	11	2	1	11	40
			14				

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kab Cirebon (2023), data yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2.13

Cakupan Pelayanan Pos Jaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Cirebon

NO	JENIS	JUMLAH	LOKASI
1	Tandon Air Pos Jaga	11	Pos Jaga Sumber, Weru, Palimanan, Arjawinangun, Gunungjati,Lemahabang,Ciledug, Cikulak, Losari, Pangenan, dan Greged
2	Tandon Air Kecamatan	6	Kecamatan Plumbon, Kecamatan Gegesik, Kecamatan Gebang, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Astanajapura

Sumber: Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2025

Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran perlu dihindari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran seperti tidak meninggalkan kompor yang menyala, tidak menggunakan sumber listrik dengan beban yang berat, tidak meletakkan bahan yang mudah terbakar di dekat api, memeriksa kabel listrik yang terkelupas dan mengganti dengan yang baru, memeriksa secara rutin pipa gas, dan menyediakan media pemadam kebakaran seperti pasir, tandon air, dan alat pemadam kebakaran sesuai dengan tipe kebakaran.

Tingkatan resiko bencana kebakaran terbagi menjadi 3 (tiga) tingkat resiko, yaitu: resiko rendah, resiko sedang dan resiko tinggi. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Risiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon

No	Tingkat Resiko	Kecamatan
1.	Rendah	Kaliwedi, Kapetakan, Panguragan, Suranenggala, Jamblang, Ciwaringin, Gempol, Tengah Tani, Susukan Lebak, Karangsembung, Karangwareng, Pabuaran, Ciledug, Pasaleman dan Losari
2.	Sedang	Gegesik, Susukan, Klangeran, Palimanan, Dukupuntang, Talun, Plered, Kedawung, Pangenan, Beber, Sedong, Waled, Pabedilan
3.	Tinggi	Arjawinangun, Plumbon, Depok, Weru, Sumber, Mundu, Greded, Astanajapura, Lemahabang, Gebang dan Babakan

Sumber: Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kab Cirebon, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.18 Peta Rawan Bencana Kabupaten Cirebon



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

A. Pertanian

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Paling tidak ada lima peran penting yaitu : berperan secara langsung dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, berperan dalam pembentukan pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap tenaga kerja di pedesaan, berperan dalam penghasilan devisa dan atau penghematan devisa, dan berperan dalam pengendalian inflasi. Dengan demikian sektor pertanian secara tidak langsung berperan dalam menciptakan iklim yang konsumtif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya, tidak kalah penting sebagai pendukung penyediaan kebutuhan masyarakat yaitu sub sektor peternakan dan kehutanan yang juga andil terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi sektor pertanian cukup tinggi. Kabupaten Cirebon memiliki potensi kawasan pertanian seluas 54.815 ha, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Potensi Kawasan Pertanian Kabupaten Cirebon

NO	KAWASAN PERTANIAN	LUAS (HA)	LOKASI
1	Kawasan Tanaman Pangan	48.683	40 Kecamatan
2	Kawasan Hortikultura	6.050	Kecamatan : 1. Astanajapura, 2. Babakan, 3. Beber, 4. Ciledug, 5. Depok, 6.Dukupuntang, 7. Gegesik, 8. Gempol, 9. Greged, 10. Jamblang, 11. Kaliwedi, 12. Karangsembung, 13. Karangwareng, 14. Klangeran, 15. Lemahabang, 16. Mundu, 17. Pabedilan, 18. Pabuaran, 19. Palimanan, 20. Pasaleman, 21. Sedong, 22. Sumber, 23. Susukan, 24. Susukan Lebak, 25. Talun, 26 Waled
3	Kawasan Peternakan	82	Kecamatan : 1. Ciledug, 2. Karangwareng, 3. Pasaleman, 4. Waled
Jumlah		54.815	

Sumber Data : Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024 - 2044, data yang dikelola dalam SIPD

Dari total luas potensi kawasan pertanian Kabupaten Cirebon, seluas 44.093 ha ditetapkan sebagai **Kawasan Pertanian, Pangan Berkelanjutan (KP2B)**. KP2B dimaksud tersebar di 39 (*tiga puluh sembilan*) kecamatan selain Kecamatan Kedawung.

Kabupaten Kabupaten Cirebon memiliki tugas untuk mendukung program swasembada beras yang dicanangkan baik oleh gubernur juga presiden. Pada tahun 2024, luas tanam padi di Kabupaten Cirebon mencapai 91.395 ha,

dengan luas panen 90.587 ha dan total produksi Padi di Kabupaten Cirebon mencapai 683.880 Ton (GKP).

Tanaman pangan yang dikembangkan di Kabupaten Cirebon selain padi adalah jagung. Selain padi, tanah di Kabupaten Cirebon dapat juga ditanami berbagai macam tanaman sayuran dan buah-buahan antara lain : bawang merah, cabai rawit, petai, tomat, bawang daun, melon, semangka, alpukat, salak, rambutan dan berbagai macam sayur dan buah-buahan lain. Diantara berbagai tanaman sayuran tersebut, Bawang merah merupakan tanaman sayuran yang memiliki hasil panen terbesar di Kabupaten Cirebon di mana pada tahun 2024 produksi mencapai 320.944 kuintal.

Sektor perkebunan di Kabupaten Cirebon merupakan salah satu sektor strategis yang mendukung ketahanan ekonomi lokal, terutama di wilayah perdesaan. Namun, selama periode lima tahun terakhir (2020–2024), luas lahan produksi perkebunan menunjukkan tren yang fluktuatif seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pemanfaatan lahan perkebunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal daerah. Beberapa faktor yang berkontribusi antara lain:

1. Alih fungsi lahan akibat tekanan pembangunan infrastruktur, permukiman, dan kawasan industri, khususnya di wilayah barat dan tengah Kabupaten Cirebon yang berada pada koridor strategis Pantura.
2. Fluktuasi harga komoditas perkebunan seperti tebu, kelapa, dan mangga, yang memengaruhi minat dan kemampuan petani dalam mengelola lahan secara berkelanjutan.
3. Kondisi iklim ekstrem, seperti kemarau panjang maupun banjir musiman, yang menyebabkan sebagian lahan tidak dapat digunakan secara optimal pada tahun-tahun tertentu.
4. Keterbatasan dukungan sarana prasarana pertanian dan modal usaha, yang menyebabkan pengelolaan lahan menjadi tidak maksimal pada periode tertentu.

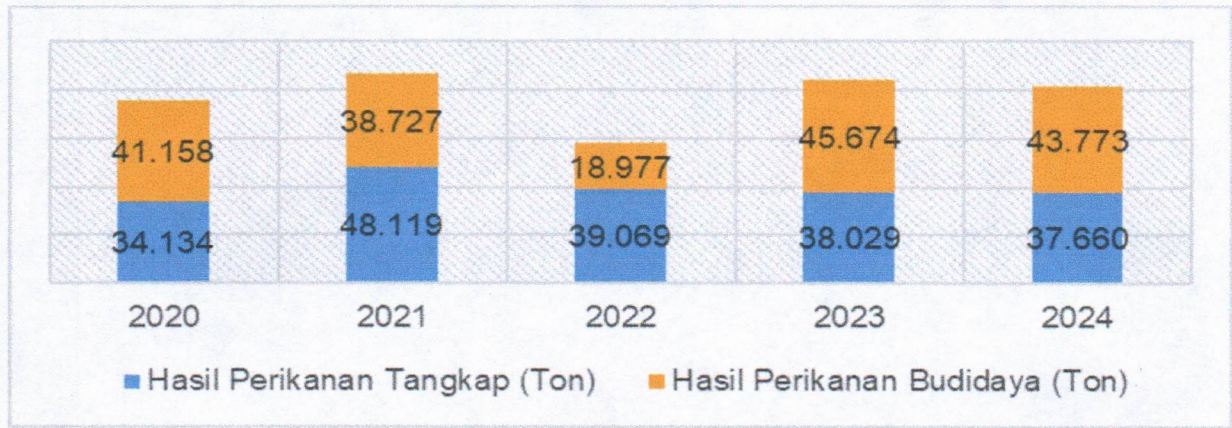
Kenaikan kembali luas lahan pada tahun 2024 diperkirakan merupakan hasil dari intervensi Pemerintah Daerah melalui program rehabilitasi perkebunan, pemberian bantuan bibit, pelatihan teknis kepada petani, serta peningkatan akses pasar dan teknologi. Meski demikian, data ini juga menunjukkan bahwa sektor perkebunan masih memiliki kerentanan struktural, sehingga dibutuhkan upaya penguatan tata kelola dan perencanaan jangka menengah secara lebih komprehensif.

B. Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya di Kabupaten Cirebon pada masa mendatang perlu menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan sumber daya ikan (SDI) merupakan salah satu sumber protein konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi ikan Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 sebesar 37,48 kg/kapita/tahun, sementara produksi perikanan Provinsi

Jawa Barat tahun 2023 mencapai 83.702,89 Ton sehingga terdapat ketimpangan antara konsumsi dengan produksi yang menyebabkan Kabupaten Cirebon belum swasembada ikan. Adapun faktor yang berpengaruh dalam capaian produksi perikanan Kabupaten Cirebon diantaranya karena telah diterapkannya penggunaan teknologi baik pada perikanan tangkap maupun budidaya yang efektif dalam meningkatkan produksi perikanan. Kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja jumlah produksi perikanan diantaranya pemberian *smart fishing* kepada nelayan, pembudidaya ikan millennial, pembinaan dan pendampingan pembudidaya ikan, peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan, revitalisasi tambak di pantai utara, dan penebaran benih di perairan umum.

Gambar 2.4
Produksi hasil perikanan Kabupaten Cirebon



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2020 – 2025), data yang dikelola dalam SIPD

Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang signifikan, baik dari sisi perikanan tangkap maupun budidaya. Selama periode 2020–2024, kinerja sektor perikanan menunjukkan pola fluktuatif yang berbeda antara subsektor tangkap dan budidaya, sebagaimana tergambar pada Gambar 2.4.

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Cirebon relatif stabil, dengan fluktuasi moderat. Produksi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 34.134 ton, sedangkan puncaknya terjadi pada 2021 mencapai 48.119 ton. Setelah itu, jumlah produksi cenderung mempertahankan kisaran tersebut. Stabilitas ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya laut dan aktivitas nelayan masih terjaga, meskipun kemungkinan terdapat variasi musiman atau dampak kebijakan penangkapan yang lebih berkelanjutan.

Sementara itu, subsektor perikanan budidaya menunjukkan volatilitas tinggi, dengan penurunan tajam pada tahun 2022 menjadi 18.977 ton dari kisaran di atas 40 ribu ton pada tahun sebelumnya. Meskipun produksi kembali meningkat pada 2023 (45.674 ton), terjadi sedikit penurunan lagi pada 2024 menjadi 43.773 ton. Fluktuasi tajam ini menunjukkan bahwa subsektor budidaya masih sangat rentan terhadap gangguan eksternal dan internal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun perikanan budidaya menyimpan potensi peningkatan produksi yang tinggi, namun diperlukan kebijakan intervensi yang lebih terstruktur dari Pemerintah Daerah

C. Pariwisata

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Cirebon terbentuk dari kondisi geografis (seperti obyek laut/bahari), sejarah (meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah) dan budaya yang dimiliki (meliputi keunikan masyarakat Kabupaten Cirebon dengan segala kebudayaannya. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.6 Tahun 2024, luas total Kawasan Pariwisata ini adalah sebesar 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) hektare. Adapun Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Cirebon meliputi:

- 1) Wisata Bukit Golf Ciperna yang berada di Kecamatan Beber dan Kecamatan Talun;
- 2) Agrowisata Sedong yang berada di Kecamatan Sedong;
- 3) Wisata Batik Trusmi yang berada di Kecamatan Plered dan Kecamatan Weru;
- 4) Wisata Pantai Baro yang berada di Kecamatan Gebang;
- 5) Wisata Setu Patok yang berada di Kecamatan Mundu; dan
- 6) Lokasi Pariwisata lainnya.

D. Iklim

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Cirebon menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, termasuk iklim tipe C dan D. Daerah Kabupaten Cirebon ini merupakan daerah beriklim tropis, dengan suhu minimum 19,2°C, suhu maksimum 38,1°C dan suhu rata-rata 28°C. Kabupaten Cirebon memiliki jumlah curah hujan sebesar 2.182,80 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Kapetakan (6.660 mm), sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Weru (911 mm). Sebagian besar dataran rendah di wilayah Kabupaten Cirebon berada di sepanjang pantai utara pulau Jawa, yang sangat rawan akan terjadinya air pasang. Begitu pula dengan wilayah Kabupaten Cirebon yang berada di sebelah selatan yang sebagian besar berada pada dataran tinggi juga berpotensi untuk menimbulkan permasalahan seperti tanah longsor. Tanah longsor itu sendiri dapat terjadi dikarenakan tingginya curah hujan yang mengikis lereng terutama terjadi di wilayah bagian selatan dengan wilayah yang rata-rata berada pada kemiringan > 40%.

E. Hidrologi

Kondisi hidrologis di Kabupaten Cirebon meliputi air tanah dan air permukaan, air tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis dan air permukaan menjadi 3 (tiga) jenis. Air tanah terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam sedangkan air permukaan terdiri dari sungai, danau/situ dan mata air.

F. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Status daya dukung air di Kabupaten Cirebon sebesar 55.418,86 ha atau 51,47% belum terlampaui dan sebesar 52.062,65 ha atau 48,35% terlampaui. Sedangkan status daya dukung pangan di Kabupaten Cirebon sebesar 67.869,87 ha atau 63,21% belum terlampaui dan sebesar 39.496,20 ha atau 36,79% telah terlampaui.

Untuk JE pengatur banjir di Kabupaten Cirebon dominan berada pada kelas JE pengatur banjir rendah, dengan luasan sebesar 85.742,72 ha (79,63 %). Sedangkan dominasi JE pengatur mitigasi bencana kebakaran berada pada kelas JE pengatur mitigasi bencana kebakaran sangat tinggi, dengan luasan sebesar 84.844,94 ha (78,79 %). Sedangkan dominasi JE pengatur longsor berada pada kelas JE pengatur longsor sedang, dengan luasan sebesar 97.986,82 ha (92,00%).

Bab II KONDISI UMUM DAERAH | 13

BAB III

PROFIL DAN ANALISIS KEMISKINAN DAERAH

3.1 Profil Kemiskinan di Kabupaten Cirebon

Profil kemiskinan di Kabupaten Cirebon mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks. Kabupaten Cirebon masih menghadapi tantangan struktural berupa tingginya ketergantungan pada sektor informal, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta ketimpangan antarwilayah desa-kota.

Analisis Kondisi Kemiskinan Daerah merupakan instrumen vital dalam memahami dan menangani isu-isu sosial-ekonomi di suatu wilayah. Studi ini meliputi beberapa aspek krusial, mencakup definisi dan indikator kemiskinan sebagai parameter pengukuran, faktor-faktor yang berkontribusi pada timbulnya kemiskinan, serta pemetaan tingkat kemiskinan per kecamatan di Kabupaten Cirebon. Dalam konteks Kabupaten Cirebon, data yang telah disajikan sebelumnya mengenai persentase dan jumlah penduduk miskin memberikan gambaran dinamis tentang fluktuasi tingkat kemiskinan di daerah ini. Analisis mendalam terhadap tren tersebut, dikombinasikan dengan pemahaman komprehensif tentang definisi, indikator, dan faktor penyebab kemiskinan, serta pemetaan rinci per kecamatan, akan menyediakan fondasi yang kokoh bagi para pembuat kebijakan untuk merancang strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran di Kabupaten Cirebon.

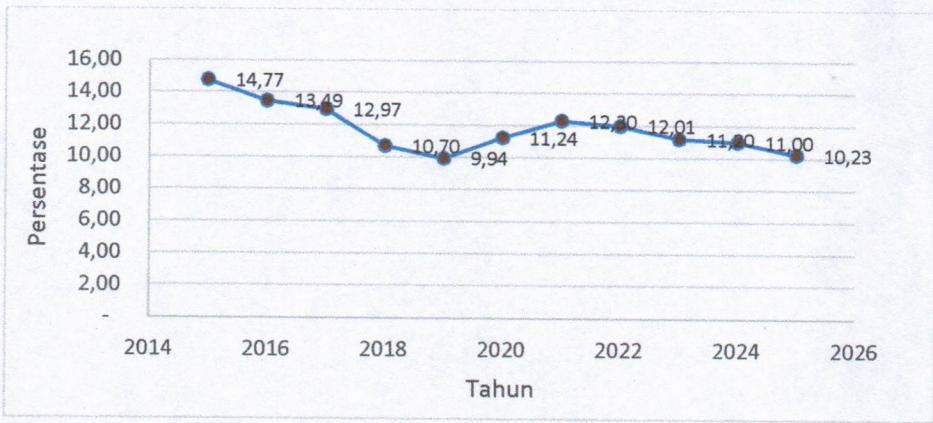
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Badan Pusat Statistik, 2025). Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2025).

Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum. Penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan dan dinyatakan dalam rupiah per bulan per kapita. Pengertian hidup layak secara minimum diwakili oleh 20% kelompok terbawah penduduk tidak miskin yang disebut sebagai **kelompok acuan**. Definisi Operasional Garis Kemiskinan adalah harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya.

Data jumlah penduduk miskin ini didapatkan dari pendataan **Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas)** yang dilakukan BPS setiap tahun. Karena data yang dikumpulkan merupakan **data sampel**, angka yang didapatkan dari pendataan ini merupakan **hasil estimasi**

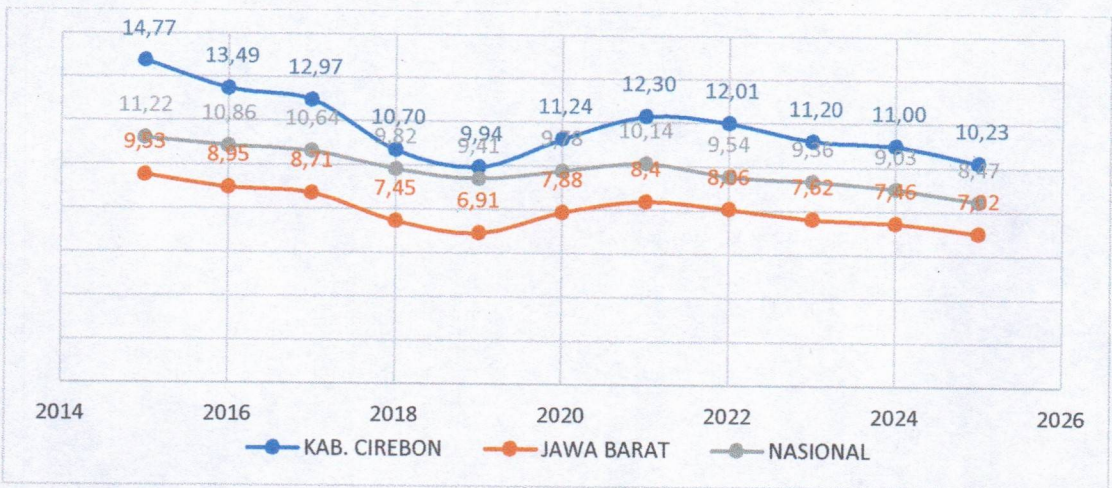
3.1.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon

Berdasarkan data yang ada terdapat fluktuasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon dari tahun 2015 hingga 2025. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan signifikan dari 12,97% pada tahun 2017 menjadi 10,70% pada tahun 2018 dan menurun lagi pada tahun 2019 dengan angka 9,94%, hal ini dapat dilihat dalam gambar 3.1 berikut, menandakan perbaikan kondisi ekonomi dalam periode tersebut. Namun, terjadi peningkatan tajam menjadi 11,24% pada tahun 2020, kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Tingkat kemiskinan kemudian mencapai puncaknya di 12,30% pada tahun 2021, sebelum mulai menurun kembali menjadi 12,01% pada 2022 dan 11,20% pada 2023. Pada tahun 2024 persentase penduduk dibawah garis kemiskinan turun sedikit menjadi 11,00 % dan tahun 2025 turun kembali menjadi 10,23 % Meskipun tren penurunan terlihat dalam dua tahun terakhir, angka kemiskinan masih belum kembali ke level terendah yang dicapai pada tahun 2019. Analisis ini menggambarkan dinamika kompleks dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon, dengan faktor eksternal seperti pandemi memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3.1 Persentase Penduduk Miskin di Kota Cirebon 2015-2025.
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2015-2025)

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.2 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2025
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2015-2025)

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan pada tahun 2021, yang mencerminkan dampak kondisi ekonomi saat itu terhadap kelompok masyarakat rentan. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menurunnya aktivitas ekonomi dan terbatasnya peluang kerja, yang berdampak pada daya beli masyarakat. Namun, sejak tahun 2022 hingga tahun-tahun berikutnya, persentase penduduk miskin menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Hal ini menandakan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah. Penurunan ini juga mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, peluang kerja, serta dukungan sosial yang lebih baik.

Tabel 3.1 Data Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Bogor	7,69	8,13	7,73	7,27	7,05	6,26
2.	Kabupaten Sukabumi	7,09	7,70	7,34	7,01	6,87	6,41
3.	Kabupaten Cianjur	10,36	11,18	10,53	10,22	10,14	9,82
4.	Kabupaten. Bandung	6,91	7,15	6,80	6,40	6,19	6,04
5.	Kabupaten Garut	9,98	10,65	10,42	9,77	9,68	9,39
6.	Kabupaten Tasikmalaya	10,34	11,15	10,73	10,28	10,23	10,15
7.	Kabupaten Ciamis	7,62	7,97	7,72	7,42	7,39	7,19
8.	Kabupaten Kuningan	12,82	13,10	12,76	12,12	11,88	10,74
9.	Kabupaten Cirebon	11,24	12,30	12,01	11,20	11,00	10,23
10.	Kabupaten Majalengka	11,43	12,33	11,94	11,21	10,82	10,31
11.	Kabupaten Sumedang	10,26	10,71	10,14	9,36	9,10	8,81
12.	Kabupaten Indramayu	12,70	13,04	12,77	12,13	11,93	11,02
13.	Kabupaten Subang	9,31	10,03	9,75	9,52	9,49	9,23
14.	Kabupaten Purwakarta	8,27	8,83	8,70	8,46	8,41	7,87
15.	Kabupaten Karawang	8,26	8,95	8,44	7,87	7,86	7,08
16.	Kabupaten Bekasi	4,82	5,21	5,01	4,93	4,80	4,36
17.	Kabupaten Bandung Barat	10,49	11,30	10,82	10,52	10,49	9,87
18.	Kabupaten Pangandaran	8,99	9,65	9,32	8,98	8,75	8,03
19.	Kota Bogor	6,68	7,24	7,10	6,67	6,53	5,89
20.	Kota Sukabumi	7,70	8,25	8,02	7,50	7,20	6,9
21.	Kota Bandung	3,99	4,37	4,25	3,96	3,87	3,78
22.	Kota Cirebon	9,52	10,03	9,82	9,16	9,02	8,66
23.	Kota Bekasi	4,38	4,74	4,43	4,10	4,01	3,96
24.	Kota Depok	2,45	2,58	2,53	2,38	2,34	2,31
25.	Kota Cimahi	5,11	5,35	5,11	4,66	4,39	4,2
26.	Kota Tasikmalaya	12,97	13,13	12,72	11,53	11,10	10,84
27.	Kota Banjar	6,09	7,11	6,73	6,14	5,85	5,73
Provinsi Jawa Barat		7,88	8,40	8,06	7,62	7,64	7,02

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel di atas, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2025 mencapai 10,23%, mengalami penurunan sebesar 0,77 % dibandingkan tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit perbaikan, Kabupaten Cirebon justru mengalami penurunan peringkat dalam tingkat kesejahteraan, naik ke posisi kelima sebagai kabupaten termiskin dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, lebih baik dibandingkan tahun 2024 yang berada di peringkat keempat termiskin. Kondisi ini menjadi

permasalahan yang mendesak dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, serta filantropi, untuk bersama-sama menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

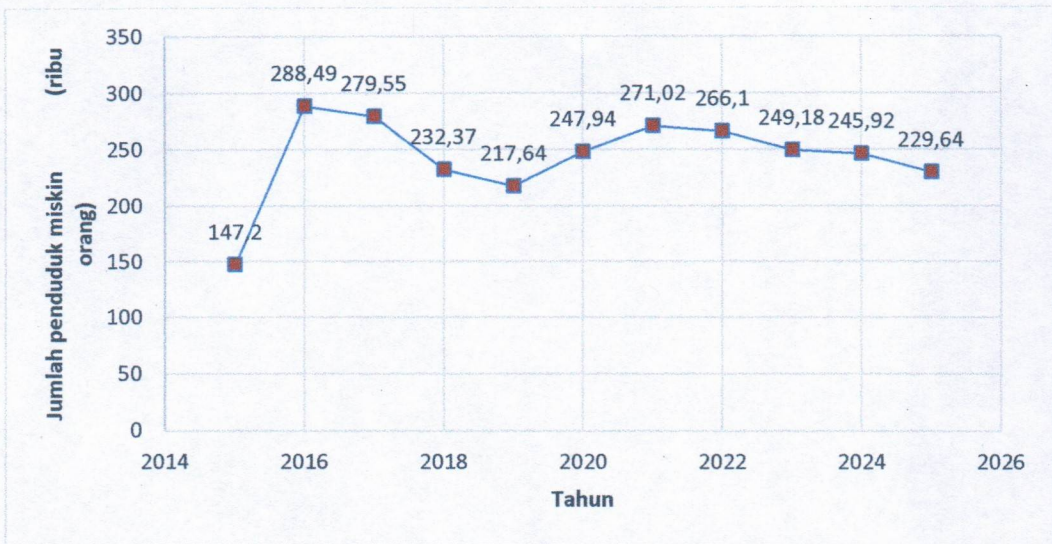
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menurunkan kemiskinan adalah dengan cara berkoordinasi dan melakukan penanganan langsung. Adapun koordinasi dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan penanganan langsung dilakukan pada kegiatan aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup upaya dalam bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya. Kegiatan koordinasi penanganan kemiskinan di Kabupaten Cirebon juga dilakukan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cirebon, upaya yang dilakukan mulai dari penanggulangan kemiskinan secara mikro (substantif) maupun secara makro (preventif).

3.1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon

Gambar 3.3 menggambarkan dinamika jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon dari tahun 2015 hingga 2025. Terjadi penurunan signifikan sebesar 16,88% dari 279,55 ribu jiwa pada 2017 menjadi 232,37 ribu jiwa pada 2018. Tren penurunan berlanjut hingga 2019 dengan penurunan tambahan sebesar 6,34%, mencapai titik terendah 217,64 ribu jiwa. Namun, pada tahun 2020 terjadi kenaikan tajam sebesar 13,92% menjadi 247,94 ribu jiwa, kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19. Kenaikan berlanjut pada 2021 dengan peningkatan 9,31% mencapai 271,02 ribu jiwa, yang merupakan titik tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Tahun 2022 menunjukkan perbaikan dengan penurunan 1,82% menjadi 266,10 ribu jiwa. Tren penurunan berlanjut pada 2023 dengan pengurangan lebih signifikan sebesar 6,36%, menghasilkan 249,18 ribu jiwa penduduk miskin. Pada tahun 2025 penduduk di bawah garis kemiskinan turun kembali menjadi 229.640 jiwa. Meskipun terjadi fluktuasi, jumlah penduduk miskin pada 2023 masih 10,89% lebih rendah dibandingkan angka awal pada 2017.

Tabel 3.2 Data Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2025

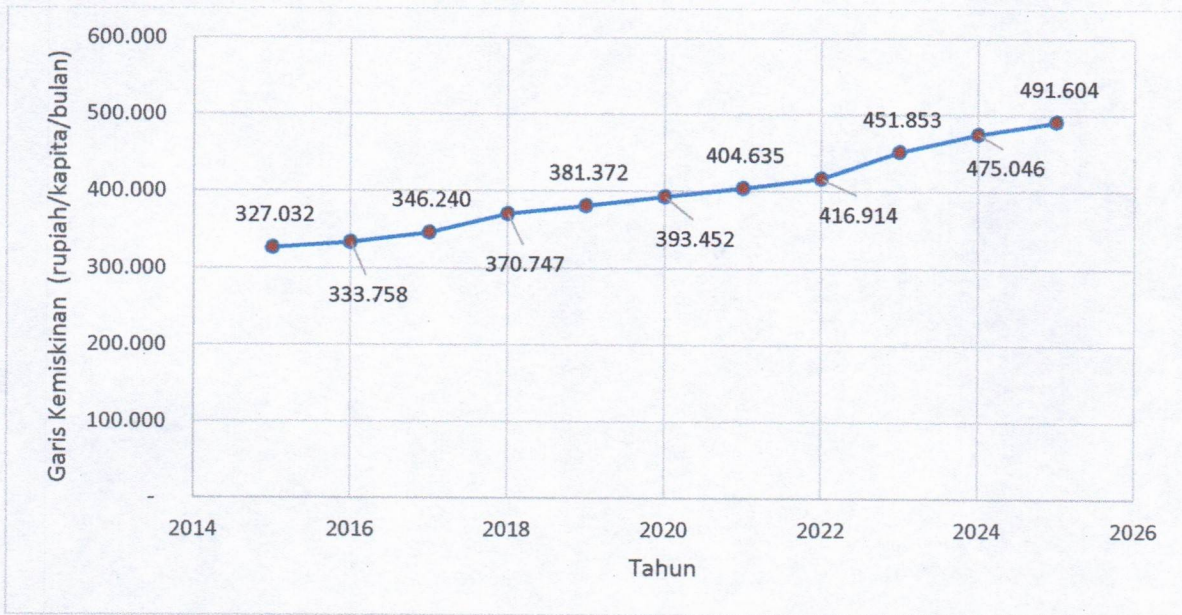
Tahun	Jml penduduk di bwh garis kemiskinan (jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp)	Persentase penduduk di bwh garis kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2015	147.200	327.032	14,77	2,42	0,57
2016	288.490	333.758	13,49	2,21	0,51
2017	279.550	346.240	12,97	2,13	0,50
2018	232.370	370.747	10,70	2,04	0,55
2019	217.640	381.372	9,94	1,29	0,26
2020	247.940	393.452	11,24	1,30	0,24
2021	271.000	404.635	12,30	1,94	0,47
2022	266.100	416.914	12,01	2,27	0,59
2023	249.180	451.853	11,20	1,34	0,26
2024	245.920	475.046	11,00	1,69	0,36
2025	229.640	491.604	10,23	1,79	0,47



Gambar 3.3 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon (ribu orang)
 Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2015-2025)

3.1.3 Garis Kemiskinan di Kabupaten Cirebon

Berdasarkan data dari BPS garis kemiskinan di Kabupaten Cirebon dari tahun 2015 hingga 2025, menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode tersebut. Analisis data menunjukkan kenaikan total sebesar 30,50% selama sepuluh tahun, dengan rata-rata peningkatan tahunan 4,53%. Kenaikan paling signifikan terjadi antara tahun 2022 dan 2023, mencapai 8,38%, sementara peningkatan terendah tercatat antara 2018 dan 2019 sebesar 2,87%. Peningkatan tahunan bervariasi, dengan 7,07% dari 2017 ke 2018, 2,87% (2018-2019), 3,17% (2019-2020), 2,84% (2020-2021), 3,03% (2021-2022), dan 8,38% (2022-2023). Fenomena ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor ekonomi makro dan mikro, termasuk inflasi, perubahan kebijakan pemerintah, dan dinamika pasar tenaga kerja lokal. Peningkatan garis kemiskinan ini mungkin juga mencerminkan upaya penyesuaian standar hidup minimum seiring dengan perkembangan ekonomi daerah, namun juga bisa mengindikasikan tantangan yang dihadapi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon.



Gambar 3.4 Garis Kemiskinan di Kabupaten Cirebon (rupiah/kapita/bulan)
 Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2015-2025)

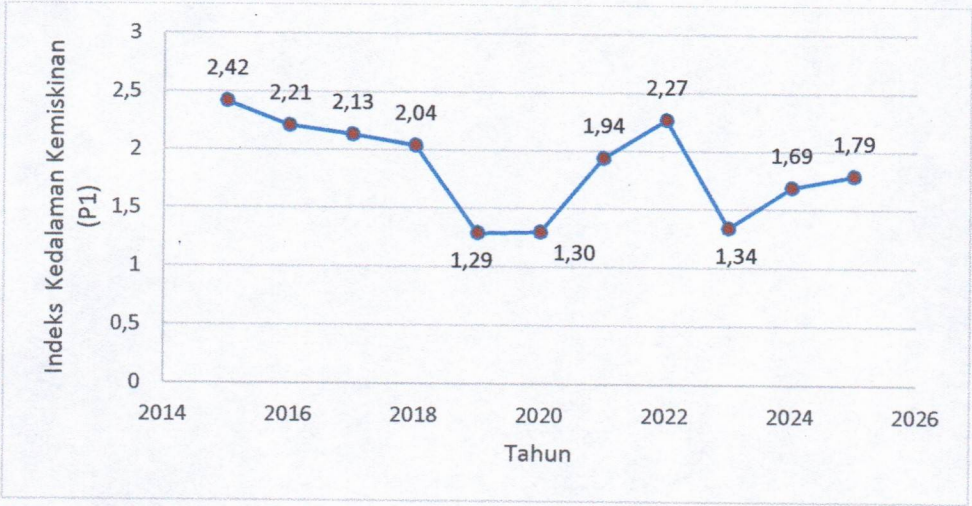
Garis kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan secara konsisten dari tahun 2015 hingga 2025. Meskipun demikian, jumlah total dan persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin masih cukup tinggi, namun tren positif mulai terlihat dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat meskipun biaya hidup yang diperlukan untuk memenuhi standar garis kemiskinan terus meningkat.

3.1.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Cirebon

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan

Gambar 3.5 menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Cirebon dari tahun 2017 hingga 2023. Terjadi fluktuasi yang signifikan selama periode tersebut. Dari 2017 ke 2018, indeks menurun 4,23%. Penurunan tajam sebesar 36,76% terjadi dari 2018 ke 2019. Namun, tren berubah dengan kenaikan kecil 0,78% pada 2020, diikuti peningkatan signifikan 49,23% di 2021. Tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sebesar 17,01%. Pada 2023 indeks menurun 12,78% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun mengalami beberapa kenaikan, indeks di 2023 (1,98) masih lebih rendah 7,04% dibandingkan nilai awal di 2017 (2,13), menunjukkan adanya perbaikan jangka panjang meski dengan fluktuasi tahunan yang cukup besar.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Cirebon terjadi peningkatan dari 1,69 pada tahun 2024 menjadi 1,79 pada tahun 2025. Ini menandakan jarak pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin menjauh. Indeks Kedalaman Kemiskinan ini mengukur rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, dengan nilai lebih rendah menandakan kondisi yang lebih baik. Fluktuasi yang terlihat mungkin mencerminkan berbagai faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi Kabupaten Cirebon selama periode tersebut.



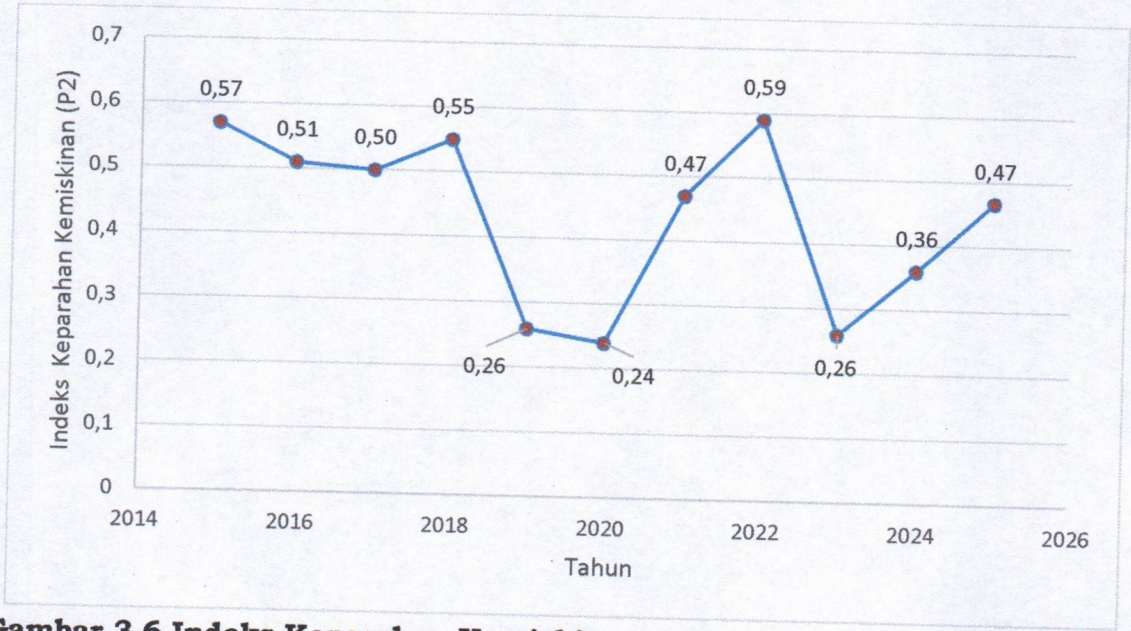
Gambar 3.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Cirebon
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2015-2025)

3.1.5 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar kesenjangan pengeluaran di dalam kelompok masyarakat miskin

Gambar 3.6 menampilkan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon dari tahun 2015 hingga 2025. Terjadi fluktuasi yang cukup signifikan selama periode tersebut. Dari 2017 ke 2018, indeks meningkat 10%. Kemudian terjadi penurunan tajam sebesar 52,73% dari 2018 ke 2019, diikuti penurunan kecil 7,69% pada 2020. Namun, tren berubah dengan peningkatan drastis 95,83% di 2021, dan kenaikan lebih lanjut 25,53% pada 2022. Akhirnya, pada 2023 indeks menurun 10,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun mengalami beberapa kenaikan signifikan, indeks di 2023 (0,53) masih 6% lebih tinggi dibandingkan nilai awal di 2017 (0,50), menunjukkan adanya sedikit peningkatan keparahan kemiskinan selama periode tersebut. Fluktuasi yang terlihat mungkin mencerminkan berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, atau peristiwa khusus seperti pandemi COVID-19 yang dapat mempengaruhi tingkat dan distribusi kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Cirebon terjadi peningkatan dari 0,36 pada tahun 2024 menjadi 0,47 pada tahun 2025. Ini menunjukan ketimpangan (gap) pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri semakin membesar.



Gambar 3.6 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2015-2025)

3.1.6 Profil Penduduk Miskin Ekstrem

Ada beberapa konsep dan Definisi kemiskinan eksterm

1. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).

2. Berdasarkan Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.
3. Identifikasi penduduk miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi
- Untuk mengetahui jumlah dan angka miskin ekstrem setiap tahunnya digunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 3.3 Tabel Estimasi Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023

No	Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (ribu jiwa)			Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		
		2021*	2022*	2023**	2021*	2022*	2023**
1.	Kabupaten Bogor	107,25	146,12	47,22	1,77	2,38	0,79
2.	Kabupaten Sukabumi	24,61	19,90	24,05	0,98	0,78	0,94
3.	Kabupaten Cianjur	57,04	36,16	11,89	2,45	1,55	0,51
4.	Kabupaten. Bandung	66,96	56,43	46,81	1,78	1,48	1,22
5.	Kabupaten Garut	30,32	82,17	9,55	1,15	3,10	0,36
6.	Kabupaten Tasikmalaya	28,24	15,74	27,12	1,57	0,87	1,49
7.	Kabupaten Ciamis	5,51	17,90	1,32	0,45	1,47	0,11
8.	Kabupaten Kuningan	24,03	31,89	15,70	2,20	2,90	1,42
9.	Kabupaten Cirebon	64,44	81,89	36,64	2,92	3,70	1,65
10.	Kabupaten Majalengka	43,84	24,13	10,64	3,58	1,96	0,86
11.	Kabupaten Sumedang	31,71	36,82	6,37	2,69	3,11	0,53
12.	Kabupaten Indramayu	75,82	53,05	38,55	4,32	3,01	2,18
13.	Kabupaten Subang	57,51	35,44	34,61	3,63	2,23	2,16
14.	Kabupaten Purwakarta	18,58	16,93	10,19	1,95	1,76	1,06
15.	Kabupaten Karawang	28,22	64,02	17,89	1,20	2,70	0,75
16.	Kabupaten Bekasi	56,00	25,82	19,82	1,44	0,64	0,48
17.	Kabupaten Bandung Barat	28,25	33,59	15,04	1,67	1,98	0,88
18.	Kabupaten Pangandaran	5,61	5,93	2,65	1,38	1,46	0,65
19.	Kota Bogor	13,59	14,45	4,93	1,23	1,30	0,44
20.	Kota Sukabumi	9,98	4,49	2,54	3,03	1,35	0,76
21.	Kota Bandung	24,79	25,37	9,14	0,96	0,98	0,35
22.	Kota Cirebon	13,06	5,32	1,09	4,10	1,66	0,34
23.	Kota Bekasi	33,25	61,75	0,00	1,09	1,99	0,00
24.	Kota Depok	9,44	17,57	0,00	0,38	0,69	0,00
25.	Kota Cimahi	8,34	2,63	2,98	1,37	0,43	0,49

No	Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (ribu jiwa)			Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		
		2021*	2022*	2023**	2021*	2022*	2023**
26.	Kota Tasikmalaya	27,17	23,88	6,59	3,99	3,49	0,96
27.	Kota Banjar	2,08	2,49	0,08	1,10	1,32	0,04
Provinsi Jawa Barat		895,64	941,86	403,38	1,79	1,86	0,79

Keterangan :

- * : Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
- ** : Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan pada tahun 2021 Kabupaten Cirebon terdapat penduduk miskin ekstrim sebesar 2,92 % atau menempati peringkat 6 termiskin dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Namun dalam tahun 2022 berdasarkan data BPS persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Cirebon melonjak menjadi 3,70 % menjadi kabupten termiskin dari 27 kabupaten Kota di Jawa Barat. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Cirebon, Alhamdulillah turun lagi menjadi 1,65 % menjadi peringkat 3 termiskin di Jawa Barat setelah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang. Hal ini antara lain karena beberapa strategi penanggulangan kemiskinan seperti mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.



Berdasarkan data grafik di atas persentase penduduk miskin tahun 2024 (11,93 %) dan persentase kemiskinan ekstrem tahun 2024 (1,72 %) di Jawa Barat yang tertinggi pada Kabupaten Indramayu. Dari aspek persentase kemiskinan ekstrem tahun 2024 Kabupaten Cirebon menempati peringkat 8 termiskin dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan persentase 1,13 % hal ini menunjukkan perunanan yang terus konsisten.

3.1.7 Profil Kemiskinan Mikro Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Gambaran Kemiskinan mikro dari aspek Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

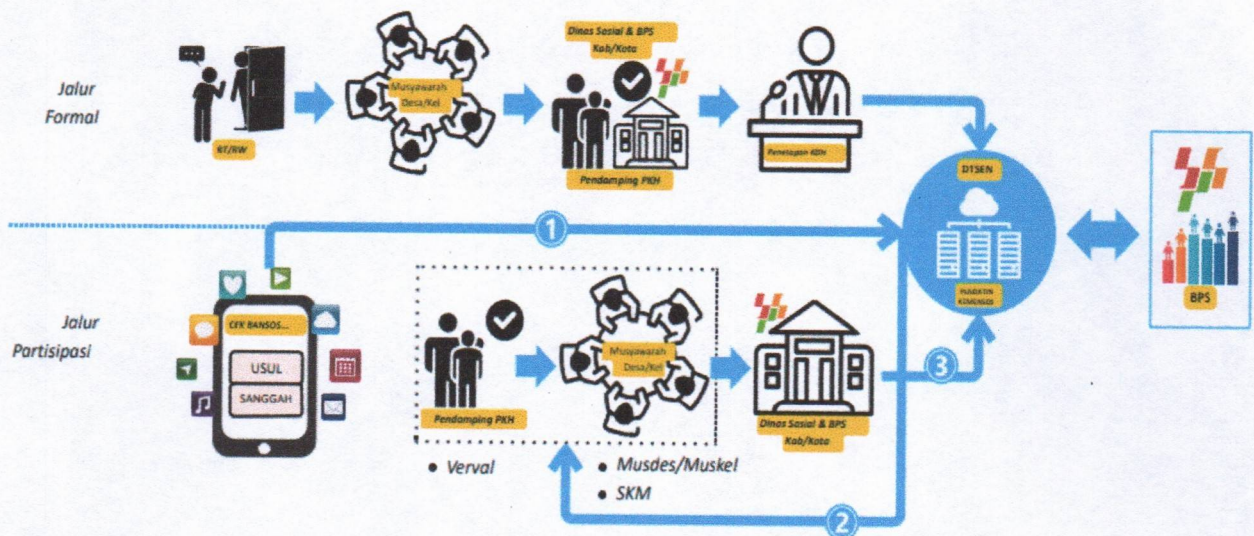
Pada tanggal 5 Februari 2025 Preseiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional kepada para menteri di Kabinet Merah Putih dan Lembaga. Dalam instruksi tersebut agar mendukung pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi nasional, meliputi:

- a. penguatan mekanisme verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara berkala;
- b. peningkatan interoperabilitas dan aksesibilitas data antar kementerian/lembaga; dan
- c. pengembangan infrastruktur teknologi untuk mendukung integrasi data yang andal dan aman
- d. menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.

DTSEN adalah adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan. DTSEN dibangun dari 3 sumber data utama: DTKS, P3KE, REGSOSEK yang kemudian ditunggalkan dan dipadupadankan dengan Dukcapil. DTSEN untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.

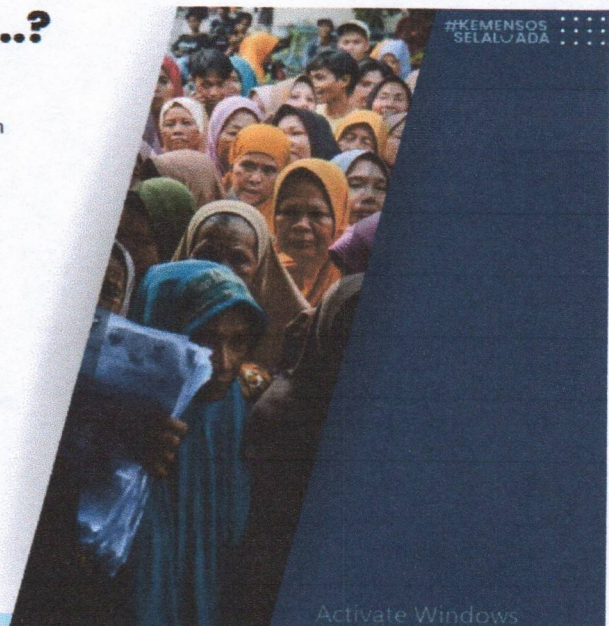
Dalam DTSEN berisi populuasi individu dan keluarga penduduk Indonesia, memuat profil sosial ekonomi lebih lengkap, memiliki pemeringkatan (desil dari desil 1 samapi desil 10) sebagai sumber data tunggal pensasaran program pembangunan.

Variabel lengkap DTSEN Data keluarga meliputi aspek wilayah domisil, tingkat kesejahteraan (desil 1-10) kondisi tempat tinggal, kepemilikan asset dan daya listrik. Sedangkan variable lengkap DTSEN data Individu meliputi : identitas dari individu, pekerjaan, kesehatan, Pendidikan



●●● APA MANFAAT DTSEN...?

- ✔ untuk mengarahkan kebijakan pemerintah lebih konvergen dan mengurangi bias akibat tumpang tindih data;
- ✔ untuk memudahkan pensasaran program pembangunan pemerintah menjadi lebih tepat;
- ✔ untuk memudahkan pemerintah menetapkan strategi pengentasan kemiskinan agar lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- ✔ untuk mengetahui profil sosial ekonomi penduduk Indonesia lebih lengkap;
- ✔ untuk membantu pengalokasian anggaran pembangunan lebih efisien, efektif dan akuntabel;
- ✔ untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;



NO.	KECAMATAN	KELUARGA	ANGGOTA KELUARGA	JUMLAH DAN PERSENTASI									
				DESI 1		DESI 2		DESI 3		DESI 4		DESI 5	
				Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota
1	Ajeningan	25.811	77.225	1.765 (6.44%)	5.361 (6.94%)	2.093 (7.00%)	6.556 (8.44%)	2.547 (10.26%)	8.056 (10.43%)	2.535 (9.82%)	8.005 (10.37%)	2.305 (9.56%)	8.744 (11.32%)
2	Astansapura	26.674	89.295	3.181 (10.80%)	10.088 (11.30%)	2.847 (9.93%)	9.665 (10.82%)	3.194 (11.14%)	10.022 (11.22%)	3.067 (10.70%)	10.247 (11.48%)	3.276 (11.22%)	9.959 (11.85%)
3	Babakan	27.743	78.011	3.389 (12.21%)	9.723 (12.46%)	3.225 (11.62%)	9.956 (12.76%)	3.486 (12.57%)	9.962 (12.77%)	3.063 (10.92%)	9.937 (12.46%)	3.275 (11.85%)	9.781 (11.89%)
4	Beber	15.702	49.728	1.725 (10.99%)	5.882 (11.67%)	1.965 (12.50%)	7.044 (14.37%)	2.120 (13.50%)	6.957 (13.95%)	2.036 (12.97%)	6.952 (13.77%)	1.990 (12.67%)	6.362 (12.78%)
5	Ciledug	49.417	1.727 (9.85%)	4.757 (9.68%)	1.588 (9.06%)	4.984 (9.75%)	1.981 (10.94%)	5.489 (11.03%)	1.924 (10.96%)	5.002 (12.56%)	2.040 (11.64%)	5.571 (12.77%)	
6	Ciwaringin	15.127	43.248	1.352 (8.94%)	4.186 (9.59%)	1.387 (9.17%)	4.325 (10.00%)	1.722 (11.38%)	5.099 (11.79%)	1.496 (9.89%)	4.502 (10.43%)	1.792 (11.85%)	5.095 (11.69%)
7	Depok	23.330	73.167	2.312 (9.86%)	7.981 (10.36%)	2.452 (10.25%)	8.268 (11.30%)	2.774 (11.99%)	8.952 (11.89%)	2.754 (11.51%)	8.906 (11.63%)	3.222 (10.46%)	9.994 (13.10%)
8	Dukupuntang	24.693	72.929	2.387 (9.67%)	7.135 (9.77%)	2.736 (11.09%)	9.069 (12.44%)	3.305 (10.38%)	9.089 (10.96%)	2.025 (12.25%)	9.009 (12.35%)	2.206 (10.39%)	9.886 (13.30%)
9	Gebang	25.658	74.763	3.760 (12.28%)	9.284 (12.40%)	3.034 (11.82%)	9.956 (13.88%)	3.451 (13.45%)	10.042 (10.43%)	2.877 (11.79%)	9.046 (12.70%)	3.084 (12.06%)	9.534 (12.95%)
10	Gegesik	27.698	76.671	2.259 (8.18%)	5.246 (6.85%)	2.809 (10.14%)	6.571 (11.03%)	3.428 (12.38%)	9.870 (12.87%)	3.582 (12.93%)	10.678 (13.93%)	4.063 (14.67%)	11.234 (14.60%)
11	Gempol	17.225	50.786	2.213 (12.85%)	7.197 (14.17%)	1.883 (10.47%)	5.591 (10.99%)	1.916 (10.54%)	5.961 (10.95%)	1.795 (10.42%)	5.394 (10.62%)	1.975 (11.49%)	5.730 (11.28%)
12	Greged	20.590	64.846	4.353 (21.14%)	6.039 (23.18%)	3.428 (16.85%)	10.673 (16.00%)	2.914 (11.14%)	8.902 (10.73%)	2.730 (12.26%)	8.884 (10.70%)	2.182 (10.05%)	6.709 (10.51%)
13	Gunung Jati	29.738	87.765	1.363 (4.58%)	4.141 (4.72%)	1.404 (4.72%)	4.343 (4.95%)	1.576 (5.44%)	5.787 (6.58%)	2.094 (7.04%)	5.675 (7.63%)	3.172 (10.67%)	9.384 (10.36%)
14	Jambi	14.395	41.620	1.908 (13.25%)	5.620 (13.86%)	1.974 (13.75%)	1.820 (12.64%)	5.405 (12.98%)	1.716 (11.50%)	5.097 (12.26%)	1.948 (13.53%)	5.305 (12.75%)	
15	Kaliwedi	16.454	45.653	1.187 (7.27%)	3.359 (7.36%)	1.429 (8.68%)	4.456 (9.76%)	1.894 (11.51%)	5.471 (11.98%)	1.887 (11.53%)	5.698 (12.39%)	2.337 (14.20%)	6.543 (14.33%)
16	Kapetakan	22.220	67.117	1.006 (4.51%)	5.844 (8.71%)	1.811 (8.15%)	6.041 (9.00%)	2.715 (12.22%)	6.295 (12.30%)	2.369 (10.66%)	7.537 (11.23%)	2.611 (11.75%)	7.816 (11.65%)
17	Karangsembung	13.110	39.356	1.751 (13.37%)	5.151 (13.10%)	1.700 (12.48%)	5.449 (13.85%)	1.680 (12.34%)	5.089 (12.93%)	1.611 (10.64%)	4.034 (12.20%)	1.600 (12.34%)	4.682 (11.90%)
18	Karangweng	10.882	30.680	1.740 (15.98%)	4.918 (15.70%)	1.590 (14.68%)	4.685 (15.86%)	1.503 (13.80%)	4.480 (14.50%)	1.273 (11.70%)	3.707 (12.06%)	1.170 (10.10%)	3.529 (11.60%)
19	Kedawung	21.890	64.723	1.452 (6.63%)	4.586 (7.09%)	1.486 (6.83%)	5.026 (7.76%)	1.889 (10.52%)	5.579 (10.62%)	1.702 (7.76%)	5.331 (10.47%)	2.187 (10.04%)	5.959 (11.74%)
20	Klangenan	19.593	57.304	2.232 (11.39%)	7.033 (12.27%)	2.365 (12.46%)	7.438 (12.97%)	2.547 (10.00%)	7.676 (13.40%)	2.439 (12.45%)	7.411 (12.93%)	2.550 (13.05%)	7.225 (12.81%)
21	Lemahabang	20.571	61.057	2.624 (12.76%)	9.102 (14.42%)	2.607 (12.67%)	8.250 (13.52%)	2.445 (10.89%)	7.324 (12.00%)	2.186 (10.68%)	6.726 (11.02%)	2.499 (12.61%)	7.088 (11.61%)
22	Losari	23.332	68.185	2.707 (11.60%)	8.049 (11.80%)	2.490 (10.67%)	8.063 (11.83%)	3.251 (13.93%)	9.726 (14.26%)	2.839 (12.14%)	8.695 (12.68%)	3.020 (12.98%)	8.946 (13.12%)
23	Mundu	29.012	90.131	1.866 (6.50%)	6.287 (6.96%)	1.967 (6.75%)	6.696 (7.43%)	3.047 (10.50%)	9.453 (10.43%)	2.874 (12.15%)	9.563 (10.61%)	3.408 (11.95%)	10.313 (11.44%)
24	Pabedian	23.177	64.444	2.637 (11.38%)	6.981 (10.73%)	2.763 (11.92%)	8.361 (12.97%)	3.861 (16.43%)	9.106 (14.85%)	3.048 (13.80%)	9.022 (14.00%)	3.232 (13.94%)	8.347 (13.88%)
25	Pabuaran	14.029	40.175	1.651 (11.77%)	4.962 (11.60%)	1.659 (11.83%)	5.273 (13.13%)	1.782 (12.70%)	5.181 (12.92%)	1.514 (10.79%)	4.908 (12.20%)	1.787 (12.97%)	4.902 (12.20%)
26	Palimanan	22.367	66.704	2.059 (9.21%)	6.833 (10.24%)	2.231 (9.93%)	7.567 (11.34%)	2.418 (10.70%)	8.102 (12.83%)	2.444 (10.93%)	7.393 (10.80%)	2.579 (11.53%)	7.188 (10.73%)
27	Pangeran	17.177	52.305	1.382 (10.05%)	4.255 (8.15%)	1.514 (8.06%)	4.664 (9.12%)	1.850 (10.78%)	5.651 (10.82%)	2.245 (10.07%)	7.156 (10.71%)	2.495 (14.28%)	7.425 (14.22%)
28	Panguragan	17.078	48.081	1.567 (9.25%)	4.546 (9.45%)	1.466 (8.58%)	4.382 (9.17%)	1.859 (10.88%)	5.394 (11.22%)	1.561 (9.40%)	4.696 (10.10%)	2.278 (12.94%)	6.381 (13.30%)
29	Pasaleman	10.549	29.675	1.332 (12.63%)	3.325 (11.20%)	1.251 (11.88%)	3.689 (12.43%)	1.424 (13.50%)	4.078 (14.74%)	1.371 (12.43%)	4.046 (13.63%)	1.370 (12.42%)	3.663 (12.34%)
30	Plered	19.678	59.763	1.960 (9.99%)	5.946 (9.93%)	1.824 (9.30%)	5.822 (9.91%)	2.866 (10.64%)	6.928 (11.59%)	1.981 (10.10%)	6.374 (10.77%)	2.212 (10.27%)	6.566 (10.98%)
31	Plumbon	29.951	88.859	1.737 (5.80%)	5.280 (5.94%)	1.932 (6.45%)	6.206 (7.07%)	2.708 (9.03%)	7.993 (9.00%)	2.953 (9.86%)	9.012 (10.14%)	3.273 (10.93%)	9.343 (10.40%)
32	Sedong	15.456	46.952	1.575 (10.18%)	4.861 (10.35%)	2.030 (10.10%)	6.646 (14.15%)	2.185 (10.68%)	6.442 (10.72%)	2.031 (10.14%)	6.294 (10.41%)	2.216 (14.38%)	6.782 (14.44%)
33	Sumber	33.687	107.253	2.539 (6.72%)	10.153 (9.47%)	3.174 (9.43%)	11.230 (10.47%)	3.896 (10.57%)	12.494 (11.65%)	3.608 (10.70%)	11.822 (11.41%)	2.216 (14.38%)	6.782 (14.44%)
34	Suranenggala	17.098	50.593	1.244 (7.28%)	3.758 (7.43%)	1.071 (6.85%)	3.678 (7.35%)	1.918 (8.89%)	4.429 (10.75%)	1.956 (9.10%)	4.524 (9.73%)	1.960 (10.40%)	5.538 (10.96%)
35	Susukan	28.677	78.395	2.208 (7.70%)	6.269 (8.00%)	1.853 (6.46%)	5.427 (6.92%)	2.852 (10.25%)	7.101 (9.06%)	2.463 (8.59%)	7.191 (9.17%)	3.068 (10.66%)	8.278 (10.56%)
36	Susukan Lebak	14.917	44.476	2.443 (16.36%)	7.806 (17.33%)	2.296 (15.39%)	7.396 (16.63%)	2.115 (14.18%)	6.375 (14.33%)	1.837 (12.31%)	5.348 (12.82%)	1.864 (12.50%)	5.106 (11.55%)
37	Talun	25.010	79.786	1.843 (7.39%)	6.383 (8.00%)	2.140 (8.50%)	7.479 (9.37%)	2.686 (10.72%)	8.604 (10.78%)	2.507 (10.34%)	8.126 (10.44%)	2.629 (10.91%)	7.859 (10.85%)
38	Tengah Tani	16.020	49.215	1.052 (11.96%)	5.834 (11.85%)	1.528 (9.54%)	8.162 (10.47%)	1.880 (11.26%)	5.662 (11.50%)	1.506 (9.38%)	4.838 (10.93%)	1.801 (12.43%)	5.366 (12.90%)
39	Waled	21.370	62.969	2.780 (13.00%)	8.126 (12.90%)	2.811 (9.75%)	9.078 (14.42%)	3.071 (14.37%)	9.316 (14.79%)	2.887 (13.57%)	8.963 (14.20%)	3.245 (13.40%)	8.795 (14.45%)
40	Weru	24.970	76.664	3.038 (12.17%)	9.885 (12.89%)	2.896 (11.60%)	9.891 (12.95%)	3.082 (12.34%)	9.565 (12.48%)	2.757 (10.40%)	8.965 (11.87%)	2.970 (11.89%)	8.786 (11.45%)
TOTAL				843.227	2.499.893	84.552 (10.03%)	274.514 (10.96%)	90.016 (11.62%)	294.634 (11.79%)	92.215 (10.94%)	285.399 (11.42%)	102.211 (12.12%)	295.246 (11.81%)
DESI 1-5						461.699 (54.75%)	1.410.294 (56.42%)						

NO.	KECAMATAN	KELUARGA	ANGGOTA KELUARGA	JUMLAH DAN PERSENTASI			
				DESI 6-10		BELUM PEMERINKATAN	
				Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota
1	Ajeningan	25.811	77.225	11.682 (45.26%)	36.220 (46.90%)	2.180 (8.45%)	4.286 (5.55%)
2	Astansapura	26.674	89.295	11.479 (40.03%)	36.691 (41.09%)	1.746 (6.09%)	2.600 (2.91%)
3	Babakan	27.743	78.011	9.661 (34.82%)	28.008 (35.90%)	1.692 (6.10%)	2.268 (2.91%)
4	Beber	15.702	49.728	5.242 (33.38%)	16.278 (32.73%)	614 (3.91%)	947 (1.90%)
5	Ciledug	17.527	49.417	7.462 (42.57%)	21.509 (43.53%)	967 (4.95%)	1.219 (2.47%)
6	Ciwaringin	15.127	43.248	6.088 (40.25%)	17.977 (41.57%)	1.287 (8.51%)	2.120 (4.90%)
7	Depok	23.330	73.167	9.542 (39.87%)	29.248 (39.97%)	870 (3.64%)	1.386 (1.89%)
8	Dukupuntang	24.693	72.929	8.891 (35.97%)	26.564 (36.42%)	1.070 (4.33%)	1.555 (2.13%)
9	Gebang	25.658	74.763	8.299 (32.34%)	25.851 (33.64%)	1.750 (6.82%)	2.425 (3.24%)
10	Gegesik	27.698	76.671	9.943 (35.90%)	27.829 (36.30%)	1.600 (5.78%)	2.267 (2.96%)
11	Gempol	17.225	50.786	6.856 (39.80%)	20.644 (40.65%)	763 (4.43%)	1.067 (2.10%)
12	Greged	20.590	64.846	4.323 (12.00%)	13.315 (20.53%)	653 (3.17%)	852 (11.31%)
13	Gunung Jati	29.738	87.765	17.702 (59.53%)	54.205 (61.76%)	2.020 (6.78%)	3.512 (4.00%)
14	Jambi	14.395	41.620	4.554 (31.64%)	12.942 (31.10%)	473 (3.29%)	859 (1.98%)
15	Kaliwedi	16.454	45.653	6.665 (40.51%)	18.708 (40.36%)	1.041 (6.33%)	1.434 (3.14%)
16	Kapetakan	22.220	67.117	9.443 (42.50%)	29.282 (43.33%)	1.462 (6.58%)	2.316 (3.45%)
17	Karangsembung	13.110	39.356	4.667 (34.29%)	13.440 (34.15%)	519 (3.81%)	646 (1.64%)
18	Karangweng	10.882	30.680	3.142 (28.87%)	8.902 (29.02%)	308 (2.83%)	391 (1.27%)
19	Kedawung	21.890	64.723	11.228 (51.29%)	34.269 (52.96%)	1.947 (8.89%)	3.601 (5.56%)
20	Klangenan	19.593	57.304	6.708 (34.24%)	19.280 (33.65%)	869 (4.44%)	1.258 (2.20%)
21	Lemahabang	20.571	61.057	7.296 (35.48%)	22.090 (36.18%)	898 (4.37%)	1.357 (2.22%)
22	Losari	23.332	68.185	7.737 (33.16%)	22.945 (33.65%)	1.285 (5.51%)	1.777 (2.61%)
23	Mundu	29.012	90.131	14.379 (49.56%)	45.622 (50.62%)	1.359 (4.68%)	2.170 (2.42%)
24	Pabedian	23.177	64.444	7.401 (31.93%)	20.881 (32.40%)	933 (4.03%)	1.171 (1.82%)
25	Pabuaran	14.029	40.175	5.101 (36.36%)	14.810 (36.86%)	614 (4.36%)	828 (2.06%)
26	Palimanan	22.367	66.704	9.562 (42.75%)	28.232 (42.32%)	870 (3.93%)	1.349 (2.02%)
27	Pangeran	17.177	52.305	7.079 (41.20%)	21.882 (41.92%)	649 (3.78%)	969 (

DTSN PERIODE OKTOBER 2025 KABUPATEN CIREBON PER KECAMATAN

		JUMLAH																				
NO	KECAMATAN	KELUARGA 87668.00	ANGGOTA KELUARGA 2532216.00	DESIL 1			DESIL 2			DESIL 3			DESIL 4		DESIL 5		DESIL 6-10		BELUM PEMERINKATA		NONAKTIF	
				Keluarga 94842.00	Anggota 204688.00	% Anggota Desil 1	Keluarga 85650.00	Anggota 270140.00	% Anggota Desil 2	Keluarga 87354.00	Anggota 280255.00	% Anggota Desil 3	Keluarga 87347.00	Anggota 270380.00	Keluarga 86621.00	Anggota 257135.00	Keluarga 367753.8 0	Anggota 1074786.00	Keluarga 42495.00	Anggota 74019.00	Keluarga 24606.00	Anggota 20013.00
1	Ajawinangun	26,771	78,152	2,258	6,773	8.67	2,154	6,807	8.71	2,134	6,933	8.87	2,597	8,282	2,434	7,342	12,257	36,755	2,152	4,593	785	667
2	Astanajapura	29,885	90,595	3,691	11,270	12.44	2,999	9,882	10.69	2,800	9,516	10.50	3,152	10,438	2,888	9,271	11,991	37,055	1,693	2,879	661	484
3	Babakan	28,848	78,950	3,744	10,401	13.17	3,142	9,516	12.85	3,178	9,689	12.25	2,857	8,451	2,749	7,911	10,736	29,976	1,657	2,583	785	523
4	Beber	16,493	50,494	1,899	6,245	12.37	1,809	6,331	12.54	1,873	6,385	12.66	1,825	5,989	1,743	5,517	6,194	18,471	576	1,855	574	541
5	Ciledug	18,242	50,053	1,854	5,913	10.02	1,617	4,863	9.72	1,778	5,296	10.50	1,746	5,407	1,776	5,110	8,197	22,712	806	1,279	468	373
6	Ciwaringin	15,725	43,890	1,607	4,692	10.69	1,584	4,712	10.74	1,447	4,065	10.63	1,544	4,616	1,568	4,576	6,292	18,852	1,289	2,167	474	418
7	Depok	24,904	74,039	2,525	8,248	11.14	2,323	7,760	10.48	2,465	8,289	11.89	2,559	7,924	2,580	7,838	10,854	31,828	856	1,527	732	705
8	Dukupuntang	25,883	74,246	2,667	7,757	10.45	2,568	8,295	11.17	2,869	9,298	12.52	2,946	8,687	2,831	8,386	10,229	29,343	1,085	1,727	796	753
9	Gebang	26,733	75,753	3,697	10,448	13.78	3,887	9,591	12.66	2,921	9,262	12.23	2,788	8,588	2,489	7,426	9,489	27,281	1,639	2,566	711	607
10	Gegesik	28,729	77,588	2,584	6,924	8.92	2,797	8,887	10.42	2,951	9,139	11.78	3,213	9,615	3,129	8,936	11,661	31,674	1,539	2,516	855	697
11	Gempol	17,955	51,514	2,346	7,363	14.29	1,893	5,682	10.87	1,737	5,284	10.26	1,777	5,354	1,666	4,918	7,386	21,474	745	1,170	485	348
12	Greged	21,454	65,778	4,685	15,845	24.89	3,381	11,291	17.17	2,875	9,482	14.42	2,187	6,849	1,823	5,418	5,247	15,413	618	990	638	498
13	Gunung Jati	30,840	88,756	1,711	5,852	5.69	1,612	4,759	5.36	1,699	5,322	6.80	1,996	6,415	2,585	7,851	18,496	55,132	1,998	3,758	743	467
14	Jamblang	14,978	42,872	2,088	6,877	14.44	1,942	6,186	14.51	1,782	5,382	12.98	1,668	4,888	1,485	4,888	5,259	14,484	446	729	476	380
15	Kaliwedi	17,862	46,281	1,482	3,718	8.63	1,482	4,459	9.63	1,589	5,182	11.82	1,748	5,285	1,927	5,512	7,438	28,285	989	1,516	474	384
16	Kapetakan	23,871	67,953	2,176	6,725	9.90	1,991	6,418	9.44	2,085	6,978	10.26	2,443	7,688	2,294	7,119	9,965	29,924	1,448	2,585	659	544
17	Karangsembur	14,158	39,886	1,814	5,329	13.37	1,576	5,042	12.65	1,683	5,133	12.88	1,478	4,514	1,446	4,081	5,289	14,678	581	717	451	372
18	Karangwareng	11,322	31,865	1,781	4,758	15.32	1,594	4,814	15.58	1,582	4,618	14.87	1,227	3,558	1,892	3,856	3,547	9,579	586	488	353	222
19	Kedawung	22,824	65,724	1,728	5,233	7.96	1,648	5,318	8.89	1,555	5,819	7.64	1,674	5,225	1,878	5,455	11,858	35,155	1,884	3,771	614	548
20	Klangenan	28,338	57,912	2,439	7,569	13.87	2,246	7,238	12.58	2,381	7,488	12.93	2,252	6,867	2,111	5,983	7,498	28,842	835	1,362	664	563
21	Lemahabang	21,438	61,943	2,866	8,724	14.88	2,451	7,688	12.43	2,372	7,557	12.28	2,147	6,327	1,995	5,888	8,197	23,587	872	1,489	538	453

DISEN PERIODE OKTOBER 2025 KABUPATEN CIREBON PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	KELUARGA 876668.00	ANGGOTA KELUARGA A 2532216.00	JUMLAH																			
				DESIL 1			DESIL 2			DESIL 3			DESIL 4		DESIL 5		DESIL 6-10		BELUM PEMERINKAT		NONAKTIF		
				Keluarga 94842.00	Anggota 284688.00	% Anggota Desil 1	Keluarga 85650.00	Anggota 270140.00	% Anggota Desil 2	Keluarga 87354.00	Anggota 280255.00	% Anggota Desil 3	Keluarga a 270380.00	Anggota 86621.00	Keluarga 257135.00	Anggota a 367753.0	Keluarga a 1074786.00	Anggota 42495.00	Keluarga 74019.00	Anggota a 24606.00	Keluarga a 28013.0	Anggota a	
22	Losari	24,326	68,172	3,029	8,667	12.53	2,530	7,838	11.33	2,742	8,820	12.75	2,683	8,257	2,519	7,603	8,804	25,204	1,209	1,986	810	797	
23	Mundu	30,060	91,199	2,390	7,574	8.30	2,074	6,927	7.60	2,610	8,642	9.40	2,994	9,581	3,109	9,596	14,841	45,706	1,284	2,376	758	797	
24	Pabedian	24,154	65,380	2,801	7,356	11.25	2,639	7,801	12.05	2,966	8,930	13.66	2,605	7,689	2,727	7,666	8,820	23,999	900	1,312	696	547	
25	Pabuaran	14,516	40,664	1,810	5,012	12.33	1,649	5,100	12.54	1,619	5,044	12.40	1,500	4,549	1,440	4,259	5,533	15,501	589	878	368	321	
26	Palimanan	23,304	67,481	2,278	7,464	11.06	2,234	7,423	11.00	2,358	7,691	11.40	2,358	7,127	2,252	6,542	10,223	29,123	857	1,498	744	613	
27	Pangenan	17,776	52,810	1,580	4,546	8.61	1,478	4,645	8.80	1,763	5,645	10.69	1,957	6,306	2,095	6,474	7,885	23,740	628	1,043	462	411	
28	Panguragan	17,651	48,620	1,814	5,065	10.42	1,766	5,113	10.52	1,676	5,106	10.50	1,665	5,167	1,903	5,630	6,966	19,712	1,379	2,363	482	464	
29	Pasaleman	10,905	29,900	1,395	3,382	11.34	1,242	3,543	11.85	1,337	4,072	13.62	1,191	3,639	1,178	3,375	3,849	11,000	387	544	326	335	
30	Plered	20,413	60,412	2,173	6,609	10.94	1,919	6,102	10.10	2,045	6,731	11.14	1,887	6,829	2,025	6,111	8,928	26,327	846	1,456	590	447	
31	Plumbon	31,159	89,940	2,011	6,908	6.68	1,902	6,087	6.77	2,258	7,238	8.85	2,710	8,331	2,715	7,995	17,361	51,182	1,287	2,302	915	797	
32	Sedong	16,074	47,477	1,633	5,032	10.60	1,882	6,085	12.82	2,071	6,668	14.04	1,923	6,802	1,941	5,771	5,801	16,910	378	635	425	374	
33	Sumber	35,045	100,670	3,427	11,639	10.71	3,182	10,785	9.92	3,439	11,760	10.82	3,276	10,763	3,340	10,400	15,845	49,463	1,543	2,933	993	927	
34	Suranenggala	17,776	51,188	1,456	4,271	8.34	1,254	3,682	7.19	1,331	4,330	8.46	1,555	4,875	1,660	4,982	9,044	27,083	967	1,644	509	321	
35	Susukan	29,671	79,499	2,770	7,410	9.52	2,295	6,274	7.89	2,028	6,057	7.62	2,605	7,585	2,597	7,300	13,942	39,717	2,587	4,364	847	712	
36	Susukan Lebar	15,538	45,016	2,531	8,153	10.11	2,201	6,974	15.49	2,017	6,317	14.03	1,653	4,868	1,502	4,204	4,826	13,549	300	583	588	448	
37	Talun	25,986	80,791	2,111	7,161	8.86	2,170	7,372	9.12	2,353	7,907	9.79	2,384	7,715	2,431	7,446	12,783	40,356	1,855	2,224	689	610	
38	Tengah Tani	16,639	49,804	2,088	6,450	12.95	1,687	5,229	10.58	1,579	5,226	10.49	1,511	4,768	1,578	4,858	7,172	21,558	742	1,419	362	296	
39	Waled	22,217	63,811	2,922	8,245	12.92	2,811	8,913	13.97	2,888	9,150	14.34	2,632	8,887	2,629	7,622	7,169	20,259	681	1,059	585	476	
40	Weru	25,885	77,758	3,273	10,478	13.48	2,916	9,778	12.57	2,838	9,262	11.91	2,558	7,925	2,471	7,519	10,856	30,067	1,182	2,141	671	588	
JUMLAH		876,668	2,532,216	94,842	284,688	11.24	85,650	270,140	10.67	87,354	280,255	11.07	87,347	270,380	86,621	257,135	367,753	1,074,786	42,495	74,019	24,606	28,013	
Jumlah individu Desil 1- Di				1,362,588				Desil 1-10 + non peringkat individu				2,511,403											
Persentase desil 1-desil 5				53.81				Desil 1-10 + non peringkat															

Berdasarkan data Tabel DTSEN Kab Cirebon per 22 Oktober 2025 menunjukkan pada kelompok desil 1 (sangat miskin) kecamatan yang paling banyak persentase desil 1 adalah Kecamatan Gregeed dengan angka 24,09 %, disusul Kecamatan Susukan lebak (18,11%) Kecamatan Karangwareng (15,32 %) Kecamatan Jamblang (14,44 %) Kecamatan Gempol (14,29 %). Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit persentase desil 1-nya adalah Kecamatan Gunungjati (5,69 %)

Berdasarkan data Tabel DTSEN Kab Cirebon per 22 Oktober 2025 menunjukkan pada kelompok desil 2 (miskin) kecamatan yang paling banyak persentase desil 2 adalah Kecamatan Gregeed dengan angka 17,17 %, disusul Kecamatan Karangwareng (15,50%) Susukan lebak (15,49 %) Kecamatan Jamblang (14,51 %) Kecamatan Sedong (12,82 %). Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit persentase desil 2-nya adalah Kecamatan Gunungjati (5,36 %)

Berdasarkan data Tabel DTSEN Kab Cirebon per 22 Oktober 2025 menunjukkan pada kelompok desil 3 (hamper miskin) kecamatan yang paling banyak persentase desil 3 adalah Kecamatan Karangwareng (14,87 %) Kecamatan Gregeed dengan angka 14,42 %, disusul Kecamatan Waled (14,34 %) Kecamatan Sedong (14,04 %) Susukan lebak (14,03 %) Kecamatan Pabedilan (13,66 %), Kecamatan Pasaleman (13,62. Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit persentase desil 3-nya adalah Kecamatan Gunungjati (6,00 %).

Data individu jumlah penduduk desil 1 sampai desil 5 adalah 1.362.598 jiwa atau 53,81 %. Sedangkan jumlah penduduk desil 6-desil 10 adalah 1.074.786 jiwa. Penduudk individu yang belum mendapat pemeringkatan adalah 74.019 jiwa bisa jadi hal ini karena mereka belum mendapat layanan perekaman e-KTP. Berdasarkan data DTSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kabupaten Cirebon Periode Oktober 2025 yang mencakup Desil 1 (Kemiskinan Ekstrem) hingga Desil 5 (Kelompok Rentan), berikut adalah analisis lengkap dan terperinci.

3.2 Analisis Data DTSEN Kabupaten Cirebon

3.2.1 Gambaran Umum Kabupaten Cirebon

Data DTSEN mencakup 50% penduduk dengan status kesejahteraan terendah (Desil 1 hingga Desil 5).

Indikator	Anggota Keluarga (Jiwa)	Persentase dari Total Penduduk Kab. Cirebon	Implikasi
Total Anggota Keluarga	2.532.216	100%	Basis populasi DTSEN
Total Anggota Desil 1-5	1.362.598	53.81%	Lebih dari separuh penduduk Cirebon masuk dalam kategori miskin (Desil 1) atau rentan miskin (Desil 2-5) ¹ .

Distribusi Anggota Keluarga per Desil:

Desil	Status Kesejahteraan	Jumlah Anggota (Jiwa)	Persentase Total Penduduk
Desil 1	Kemiskinan Ekstrem (10% Termiskin)	284.688	11.24%
Desil 2	Sangat Miskin (10-20% Termiskin)	270.140	10.67%
Desil 3	Miskin (20-30% Termiskin)	280.255	11.07%
Desil 4	Rentan (30-40% Termiskin)	270.380	10.68%
Desil 5	Rentan Ringan (40-50% Termiskin)	257.135	10.15%

Kesimpulan Awal: Distribusi persentase anggota keluarga di lima desil pertama di Kabupaten Cirebon relatif merata (sekitar 10%-11% untuk setiap desil). Angka 11.24% untuk Desil 1 menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem harus menjadi fokus kebijakan utama.

3.2.2 Analisis Disparitas Regional (Tingkat Kecamatan)

Analisis ini membandingkan konsentrasi Kemiskinan Ekstrem (Desil 1) dan Kelompok Rentan Ringan (Desil 5) per kecamatan.

A. Fokus Kemiskinan Ekstrem (Desil 1)

Kecamatan dengan konsentrasi Desil 1 tertinggi memerlukan intervensi bantuan sosial, kesehatan, dan pangan yang cepat.

Peringkat	Kecamatan	% Anggota Desil 1	Implikasi
1	Gebang	13.78%	Konsentrasi kemiskinan ekstrem tertinggi, di atas rata-rata kabupaten (11.24%) ⁹ .
2	Karangsembung	13.37%	Perlu intervensi intensif.
3	Babakan	13.17%	Memiliki kantong kemiskinan akut di tingkat desa.
4	Losari	12.53%	
5	Astanajapura	12.44%	

Kecamatan dengan konsentrasi Desil 1 terendah menunjukkan keberhasilan relatif dalam menekan kemiskinan ekstrem, namun kelompok rentan (Desil 2-5) tetap perlu diawasi.

Peringkat	Kecamatan	% Anggota Desil 1
Terendah	Gunung Jati	5.69%
Kedua Terendah	Plumbon	6.68%
Ketiga Terendah	Arjawinangun	8.67%

B. Analisis Pola Distribusi (Desil 1 vs. Desil 5)

Perbandingan Desil 1 dan Desil 5 menunjukkan bentuk piramida kemiskinan di tingkat kecamatan.

- 1. Daerah dengan Konsentrasi Tinggi di Desil 1 ($D1 > D5$):
 - o Gebang ($D1: 13.78\%$ vs. $D5: 9.80\%$), Babakan ($D1: 13.17\%$ vs. $D5: 10.02\%$), Karangsembung ($D1: 13.37\%$ vs. $D5: 10.24\%$).
 - o Implikasi: Mayoritas penduduk miskin berada di lapisan paling bawah (ekstrem), menunjukkan kesulitan mobilitas ekonomi ke atas dan perlunya fokus pada program bantuan langsung dan padat karya.
- 2. Daerah dengan Konsentrasi Tinggi di Desil 5 ($D1 < D5$):
 - o Ciledug ($D1: 10.02\%$ vs. $D5: 10.21\%$).
 - o Implikasi: Populasi miskin cenderung terdistribusi di kelompok rentan ringan, yang mengindikasikan peluang lebih besar untuk intervensi pemberdayaan (misalnya pelatihan keterampilan) agar kelompok ini dapat keluar sepenuhnya dari data DTSEN.

3.2.3 Analisis Kantong Kemiskinan Akut (Tingkat Desa/Kelurahan)

Tingkat Desil 1 per desa menunjukkan kantong-kantong kemiskinan (pockets of poverty) yang membutuhkan intervensi yang sangat terfokus.

Peringkat	Desa/Kelurahan	Kecamatan	% Anggota Desil 1
1	Nanggela	Greged	32.09%
2	Lebak Mekar	Greged	28.37%
3	Kudukeras	Babakan	23.56%
4	Sigong	Lemahabang	23.12%
5	Tuk Karangsuwung	Lemahabang	19.97%
6	Ciledug Wetan	Ciledug	17.97%
7	Kondangsari	Beber	17.45%

Poin Kunci:

- Kecamatan Greged memiliki dua desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi (Desil 1) di Cirebon, di mana lebih dari seperempat hingga sepertiga populasinya masuk kategori termiskin. Hal ini menuntut program khusus dan masif untuk wilayah Greged, Lemahabang, dan Babakan.
- Desa-desa dengan Desil 1 di atas 17% (termasuk Ciledug Wetan, Kondangsari, Cipinang, Patapan, Munjul, dsb.) harus segera divalidasi dan diintervensi.

3.2.4 Rekomendasi Strategis

1. Targeting Program (Lokasi)

- Prioritas Ekstrem (Intervensi Cepat): Alokasikan Bantuan Sosial Tunai/Non-Tunai (seperti PKH, BPNT) secara maksimal dan tepat waktu di desa-desa yang berada di 5 besar Desil 1, khususnya Nanggela (Greged), Lebak Mekar (Greged), Kudukeras (Babakan), dan Sigong (Lemahabang)³⁰.
- Prioritas Struktural (Intervensi Jangka Menengah): Pusatkan program peningkatan kualitas hidup (sanitasi, air bersih, listrik, perbaikan RTLH) di kecamatan dengan konsentrasi Desil 1 tinggi seperti Gebang, Karangsembung, Babakan, dan Losari.

2. Strategi Desil (Jenis Intervensi)

- Desil 1 & 2 (Kelompok Miskin & Sangat Miskin): Program harus fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli.
- Desil 3, 4, & 5 (Kelompok Rentan): Intervensi harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi (misalnya, pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja lokal, bantuan modal usaha mikro) untuk mendorong mobilitas sosial ke atas dan mencegah mereka jatuh ke Desil 1 atau 2.

3. Data dan Monitoring

- Lakukan verifikasi faktual segera di desa-desa dengan persentase Desil 1 di atas 20% untuk memastikan ketepatan data dan intervensi.
- Tindaklanjuti kelompok Desil 5 di Kecamatan Ciledug dengan program *coaching* dan fasilitasi akses permodalan untuk mendorong mereka menjadi non-miskin

BAB IV
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH DAN ANALISIS ANGGARAN

4.1 Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuan keuangan daerah merupakan daya dukung manajemen pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Secara mendasar, analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD ini menguraikan perkembangan kinerja tiga komponen keuangan daerah, yaitu kinerja pengelolaan Pendapatan Daerah, kinerja pengelolaan Belanja Daerah, dan kinerja pengelolaan Pembiayaan Daerah.

1) Kinerja Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Cirebon

Pendapatan daerah dibagi dalam 3 kategori: pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Pembahasan terkait kinerja pengelolaan pendapatan daerah akan difokuskan pada analisis terkait masing masing kelompok pendapatan. Time frame yang digunakan sebanyak 5 tahun untuk dapat melihat pola pendapatan serta dapat melakukan proyeksi pendapatan dengan lebih akurat.

Pada tahun 2020, Kabupaten Cirebon mencatatkan total pendapatan daerah sebesar Rp3.770.704.066.601,01 (tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh milyar tujuh ratus empat juta enam puluh enam ribu enam ratus satu koma nol satu rupiah) dalam kurun waktu 5 tahun di tahun 2024, total pendapatan Kabupaten Cirebon meningkat menjadi Rp4,118,065,753,301.00 (empat triliun seratus delapan belas milyar enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah). Dengan kata lain, dalam jangka waktu 5 tahun, terdapat peningkatan pendapatan sebesar 17,57%, dengan rata rata pertumbuhan sebesar 4,20% per tahunnya.



Gambar 4.1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tahun 2020-2024

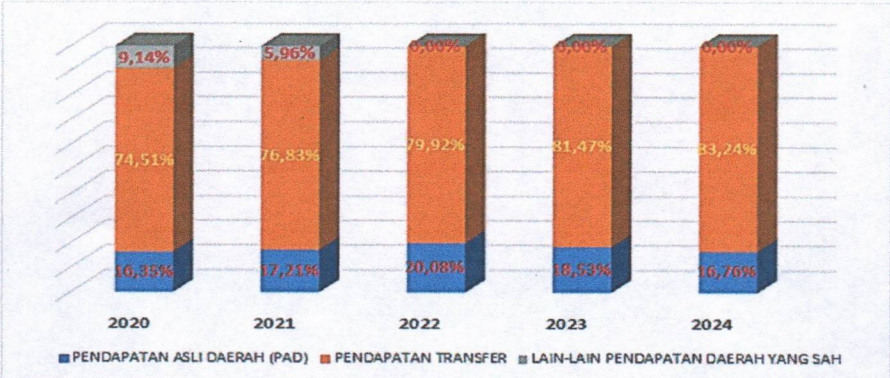
Secara keseluruhan, Pendapatan Kabupaten Cirebon didominasi oleh pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer. Di setiap tahunnya, lebih dari 70% pendapatan Kabupaten Cirebon berasal dari pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Komposisi pendapatan Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN					
4.1	Pendapatan asli daerah	616.573.116.956,01	680.580.760.013,27	795.263.789.810,52	744.524.538.980,82	772.488.538.477,28
4.1.01	Pajak daerah	223.610.292.769,00	263.053.751.571,00	308.442.409.838,00	328.734.776.136,00	348.566.584.116,00
4.1.02	Retribusi daerah	31.122.706.929,00	31.964.789.501,00	27.897.867.887,00	32.401.830.073,00	385.446.568.081,28
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.312.545.336,00	13.072.073.353,00	13.702.211.968,00	14.458.949.796,00	14.683.818.841,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	352.527.571.922,01	372.490.145.588,27	445.221.300.117,52	368.928.982.975,82	23.791.567.439,00
4.2	Pendapatan Transfer	2.809.568.527.462,00	3.039.308.119.975,00	3.165.686.559.063,00	3.272.743.455.707,00	3.692.146.542.020,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.526.434.600.243,00	2.616.119.457.786,00	2.706.565.604.541,00	2.796.514.952.898,00	3.142.049.119.624,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	283.133.927.219,00	423.188.662.189,00	459.120.954.522,00	476.228.502.809,00	550.097.422.396,00
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	344.562.422.183,00	235.799.044.000,00	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	233.724.450.000,00	-	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat	110.837.972.183,00	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		235.799.044.000,00	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (4.1+4.2+4.3)		3.770.704.066.601,01	3.955.687.923.988,27	3.960.950.348.873,52	4.017.267.994.687,82	4.464.635.080.497,28

Sumber : LRA Tahun 2020-2023 (audited), data yang dikelola dalam SIPD

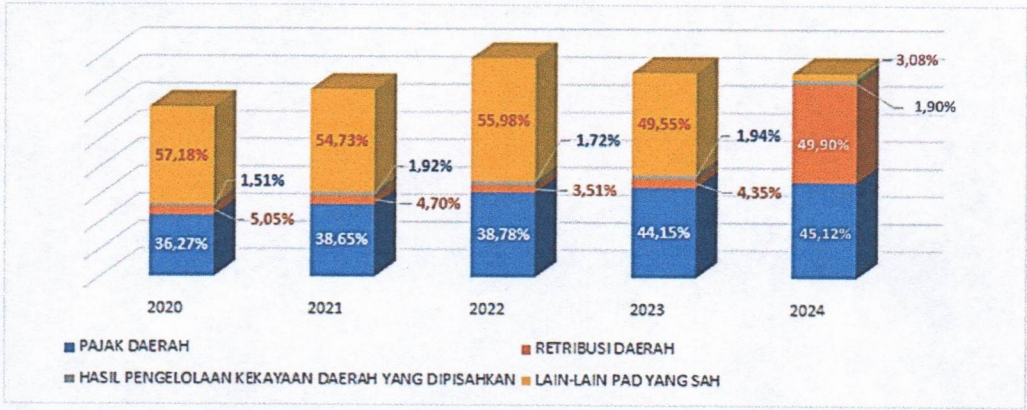
Jika dilihat dari tren persentase masing-masing komponen Pendapatan Daerah, dapat diketahui bahwa sumber pendapatan dari PAD mengalami fluktuasi di tahun 2020 pertumbuhan pendapatan daerah bernilai negatif namun kembali meningkat tahun 2021. di tahun 2022 kembali melambat namun pada tahun berikutnya meningkat sangat tinggi. Bila dilihat berdasarkan komponennya, Proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.2 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024
Sumber : LRA Kabupaten Cirebon 2020-2024, data yang dikelola dalam SIPD

Apabila dilihat dari proporsi komponen pembentuk Pendapatan Daerah Proporsi Pendapatan Transfer selalu menjadi komponen dengan kontribusi terbesar. Pendapatan Asli Daerah mengalami tren positif meningkat di tiap tahunnya Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan sangat baik. Adapun Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi paling rendah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Pada sektor pendapatan Asli daerah, Kabupaten Cirebon memperlihatkan perkembangan dalam pengelolaan PAD. Di tahun 2020, realisasi PAD sebesar Rp616,573,116,956,01 (enam ratus enam belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh enam koma nol satu rupiah) dan pada tahun 2024 realisasi PAD ini meningkat menjadi Rp772.488.538.477,28 (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma dua delapan. Dengan begitu, dalam kurun waktu 5 tahun, terdapat peningkatan PAD sebesar 25,29%.

Dilihat dari tren pertumbuhan, Pendapatan Asli daerah mengalami pertumbuhan sebesar rata rata 4,19% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Terjadi penurunan pendapatan di tahun 2020 sampai dengan -3,64% akibat pandemi covid 19. Namun di tahun 2021, Kabupaten Cirebon berhasil mencatatkan pertumbuhan PAD yang positif di angka 10,38%. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh sektor pajak yang secara umum dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

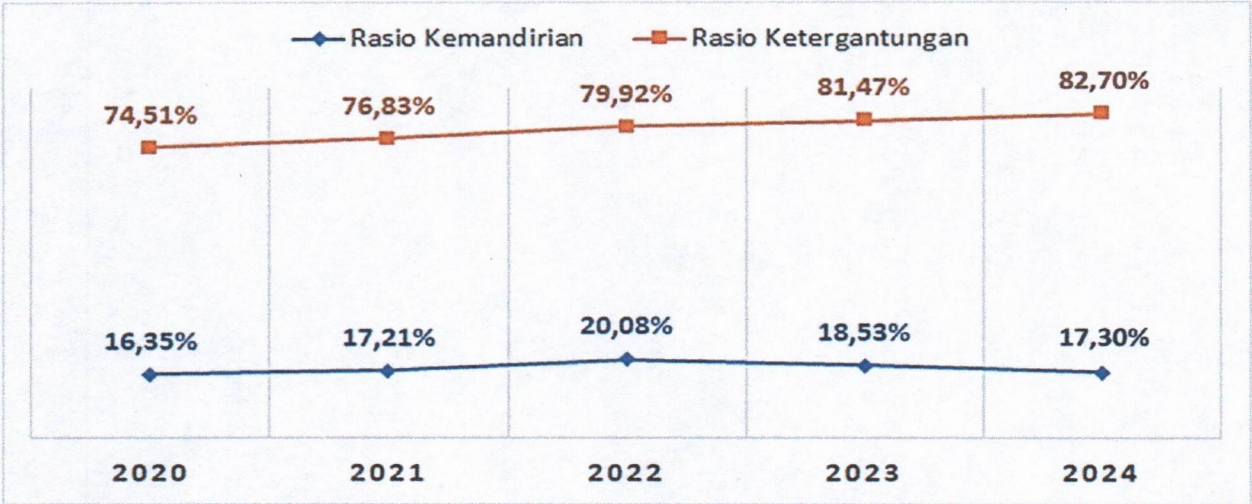


Gambar 4.3
Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024
Sumber : LRA Kabupaten Cirebon 2020-2024, data yang dikelola dalam SIPD

Kontribusi utama PAD di Kabupaten Cirebon berasal dari pendapatan pajak daerah. Di tahun 2020, kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar Rp616,57 miliar atau 36,27% dari total PAD di tahun tersebut. Potret ini berubah di tahun 2024. Pendapatan dari pajak daerah mengalami peningkatan signifikan dibanding 4 tahun lalu, sehingga Kabupaten Cirebon mampu mencatatkan realisasi pendapatan pajak di tahun 2024 sebesar Rp348,57 miliar atau sebesar 45,12% dari total Pendapatan Asli daerah. Pendapatan dari pajak ini berkontribusi sebesar 7.86% terhadap total pendapatan daerah Cirebon tahun 2024.

Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat

Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang rendah.



Gambar 4.4 Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024
Sumber : Data diolah Bappelitbangda (2024), data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 Rasio Kemandirian Daerah dengan besarnya persentase 16,35% dikategorikan kemampuannya rendah sekali. kemudian pada tahun berikutnya sempat mengalami peningkatan kemandirian namun pada tahun 2024 kembali turun di angka 17,30%. Kemandirian keuangan Kabupaten Cirebon masuk pada kategori “instruktif” artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

2) Kinerja pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon

Penyajian belanja daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah berubah dari belanja langsung dan tidak langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

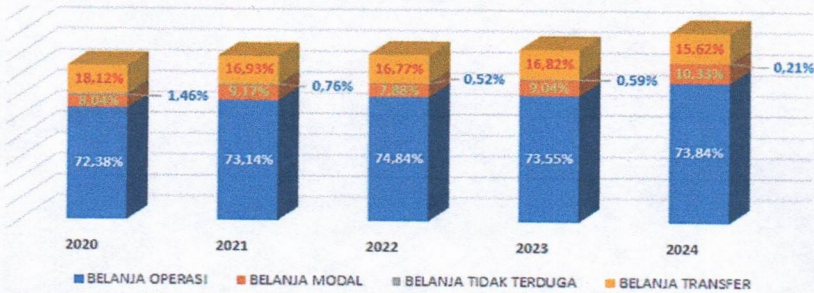
Tabel 4.2
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	2.673.701.396.925,00	2.883.934.084.927,00	2.985.149.828.252,00	3.039.524.743.697,47	3.410.559.545.501,00
5.1.01	Belanja pegawai	1.779.497.848.207,00	1.662.463.933.066,00	1.561.612.475.084,00	1.609.712.189.701,00	1.849.376.765.355,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	847.795.538.818,00	1.084.743.606.859,00	1.315.507.381.917,00	1.266.210.801.307,47	1.331.187.948.343,00
5.1.05	Belanja Hibah	45.483.165.900,00	121.940.891.002,00	83.174.048.251,00	139.814.249.339,00	218.601.651.803,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	924.844.000,00	14.785.654.000,00	24.855.923.000,00	23.787.503.350,00	11.393.180.000,00
5.2	BELANJA MODAL	296.952.045.604,00	361.539.825.251,00	314.155.622.794,00	373.623.487.361,00	478.767.157.553,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	3.856.430.287,00	2.691.148.916,00	250.600.000,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.412.280.354,56	128.376.893.068,00	90.156.368.652,00	140.514.929.375,00	148.888.092.294,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.175.480.974,00	83.206.661.924,00	43.119.333.179,00	56.348.808.375,00	115.833.547.378,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	72.994.260.369,44	145.616.768.872,00	177.695.224.847,00	175.083.760.411,00	213.012.113.581,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	370.023.906,00	483.071.100,00	493.547.200,00	1.425.389.200,00	1.033.404.300,00
5.2.06	Belanja Modal BLUD	-	-	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	53.968.319.820,00	29.784.447.691,00	20.656.013.104,00	24.313.927.365,00	9.344.507.869,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	53.986.319.820,00	29.784.447.691,00	20.656.013.104,00	24.313.927.365,00	9.344.507.869,00
5.4	BELANJA TRANSFER	669.574.737.908,00	667.552.823.974,00	668.961.158.476,00	695.288.264.205,00	709.885.059.607,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	26.867.504.952,00	27.316.112.874,00	24.700.989.476,00	28.784.091.205,00	34.252.775.007,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	642.707.232.956,00	640.236.711.100,00	644.260.169.000,00	666.504.173.000,00	675.632.284.600,00
JUMLAH BELANJA DAERAH (5.1+5.2+5.3+5.4)		3.694.214.500.257,00	3.942.811.181.843,00	3.988.922.622.626,00	4.132.750.422.628,47	4.608.556.270.530,00
SURPLUS / (DEFISIT)		76.489.566.344,01	1.287.674.214.527,00	(27.972.273.752,00)	(115.482.427.940,65)	(143.921.190.032,72)

Sumber : LRA Tahun 2020-2024 (audited), data yang dikelola dalam SIPD

Realisasi Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Cirebon menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024). Pada tahun 2020 sebesar Rp3.694,21 miliar meningkat menjadi Rp4.608,55 miliar di tahun 2024.

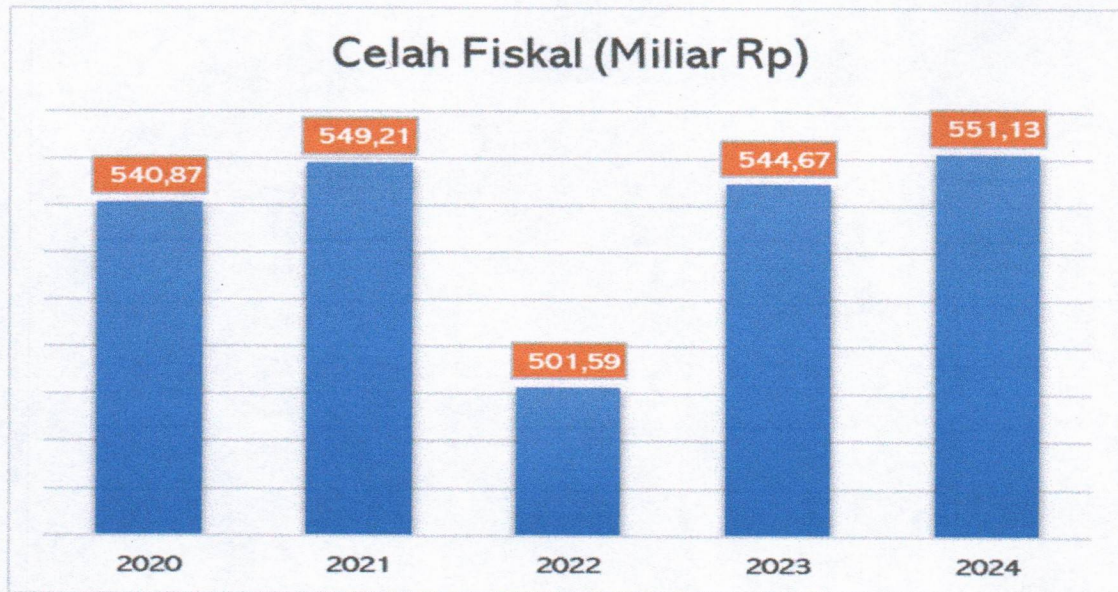
Bila dilihat berdasarkan komponennya, Proporsi masing-masing komponen belanja daerah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.5 Proporsi Masing- Masing Komponen Belanja Daerah Kabupaten CirebonTahun 2020-2024
Sumber : LRA Kabupaten Cirebon 2020-2024, data yang dikelola dalam SIPD

3) Analisis Celah Fiskal Tahun 2020-2024

Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan pendanaan pembangunan dengan kapasitas fiskal daerah yang tersedia. Berdasarkan data yang diperoleh, tren celah fiskal dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Berikut adalah rincian data celah fiskal dari tahun 2020 hingga tahun 2024:



Gambar 4.6 Celah Fiskal Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber : LRA Kabupaten Cirebon 2020-2024 (Data diolah 2025), yang dikelola dalam SIPD

Nilai celah fiskal (*fiscal gap*) yang dimiliki Kabupaten Cirebon relatif tinggi hal itu menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antara kapasitas fiskal dengan kebutuhan fiskal tidak berjalan seimbang. Dengan meningkatnya celah fiskal hampir setiap tahunnya hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah tersebut tidak cukup untuk menutupi besarnya kebutuhan fiskal, Kabupaten Cirebon juga menerima dana perimbangan yang sangat besar dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan kapasitas fiskal merupakan acuan yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk memberikan bantuan dana perimbangan. Apabila kapasitas fiskal yang dimiliki daerah kecil maka bantuan dana perimbangan nya pun besar, begitu pula sebaliknya.

Dengan tingginya nilai celah fiskal yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon juga menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon belum bisa menciptakan kemandirian daerah dalam hal keuangan hal tersebut disebabkan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan fiskal yang tergolong tinggi. Dengan rendahnya nilai kapasitas fiskal daerah yang dimiliki sehingga daerah tersebut terus mendapat bantuan dana perimbangan dari pusat, hal tersebut juga menunjukkan Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya menjalankan konsep desentralisasi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

4) Kinerja pengelolaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Cirebon

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 70 ayat (1), Pembiayaan Daerah terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan. Pasal 70 ayat (3) peraturan yang sama menyebutkan

bahwa terdapat enam sumber Penerimaan Pembiayaan, yaitu: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan (6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 70 ayat (4) disebutkan bahwa Pembiayaan Daerah tersebut dapat digunakan untuk lima hal, yaitu: (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (2) Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembentukan Dana Cadangan; (4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan (5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto, dimana Pembiayaan Netto ini digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Sama halnya dengan analisis Belanja Daerah, analisis Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan Pembangunan daerah. Adapun hasil analisis pembiayaan daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Hasil Analisis Pembiayaan Daerah Kabupaten Cirebon

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024 (audited)
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	288.834.438. 356,06	365.329.668. 174,07	378.206.410. 319,34	344.957.927. 434,86	184.475.499. 831,21
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	40.000.000.0 00,00
6.1.03	Penerimaan Piutang Daerah					
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		288.834.438. 356,06	365.329.668. 174,07	378.206.410. 319,34	344.957.927. 434,86	224.475.499. 831,21
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		-	-	-	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	40.000.000. 000,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		-	5.276.261. 600,00	4.999.999. 663,00	-
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang					
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN			-	5.276.261. 600,00	44.999.999. 663,00	-
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (6.1-6.2)		288.834.438. 356,06	365.329.668. 174,07	372.930.148. 719,34	299.957.927. 771,86	224.475.499. 831,21
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		288.834.438. 356,06	365.324.004. 700,07	372.930.148. 719,34	184.475.499. 831,21	80.554.309.7 98,49

Sumber : LRA Tahun 2020-2024 (audited), data yang dikelola dalam SIPD

Dari Tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai SILPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp80.554.309.798,49 merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran selama tahun berjalan. Total Penerimaan Tahun 2024 adalah senilai Rp40.000.000.000,00 dikurangi dengan jumlah belanja Rp143.921.190.032,72 ditambah dengan penerimaan pembiayaan senilai Rp184.475.499.831,21 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan senilai Rp0,00.

Kerangka Pendanaan

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cirebon selama periode Tahun 2026-2030 bergantung pada anggaran selama dua tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah. Perkiraan Pendapatan Daerah disajikan secara indikator dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Prioritas pendanaan pembangunan periode Tahun 2026 - 2030 diarahkan pada:

1. Pendanaan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
2. Pencapaian target yang belum terpenuhi pada periode RPJMD sebelumnya
3. Dukungan terhadap prioritas nasional dan prioritas provinsi sebagai bentuk sinkronisasi antar tingkatan pemerintahan.

Tabel 4.5
 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030

No	RINCIAN	APBD 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
4	PENDAPATAN	4.628.091.592.372,00	4.795.642.946.112,03	4.958.838.281.499,95	5.132.447.545.352,15	5.317.375.676.281,07	5.514.326.889.267,14
4.1	PAD	1.067.915.168.215,00	1.201.933.890.059,45	1.273.844.031.008,21	1.352.187.967.254,84	1.437.595.758.040,69	1.490.843.120.192,04
4.1.01	Pajak Daerah	587.949.082.583,00	624.316.255.052,33	686.747.880.557,56	755.422.668.613,32	830.964.935.474,65	861.743.191.884,23
4.1.01.09.	Pajak Reklame	6.758.000.000,00	7.176.011.285,04	7.893.612.413,54	8.682.973.654,90	9.551.271.020,39	9.905.042.227,75
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	4.913.725.440,00	5.217.660.433,42	5.739.426.476,76	6.313.369.124,43	6.944.706.036,88	7.201.932.225,33
4.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	54.000.000,00	57.340.131,61	63.074.144,77	69.381.559,24	76.319.715,17	79.146.534,52
4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.590.400.000,00	13.369.170.240,18	14.706.087.264,20	16.176.695.990,62	17.794.365.589,68	18.453.454.226,74
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	105.552.250.000,00	112.081.109.375,73	123.289.220.313,31	135.618.142.344,64	149.179.956.579,10	154.705.459.231,19
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	106.901.081.138,00	113.513.371.504,75	124.864.708.655,23	137.351.179.520,75	151.086.297.472,82	156.682.409.420,60
4.1.01.19.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	153.246.995.412,00	162.725.979.354,06	178.998.577.289,47	196.898.435.018,42	216.588.278.520,26	224.610.529.865,67
4.1.01.20.	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	118.753.341.099,00	126.098.744.578,64	138.708.619.036,50	152.579.480.940,16	167.837.429.034,17	174.053.989.090,33
4.1.01.21.	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	79.179.289.494,00	84.076.868.148,90	92.484.554.963,79	101.733.010.460,17	111.906.311.506,19	116.051.229.062,09
4.1.02	Restribusi	455.372.410.642,00	516.465.036.553,17	524.212.012.101,47	532.075.192.282,99	540.056.320.167,23	560.059.561.204,38
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	433.691.075.488,00	491.874.939.983,54	499.253.064.083,30	506.741.860.044,54	514.342.987.945,21	533.393.828.347,28
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	6.475.335.154,00	7.344.064.174,40	7.454.225.137,01	7.566.038.514,07	7.679.529.091,78	7.963.972.520,62
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	15.206.000.000,00	17.246.032.395,23	17.504.722.881,16	17.767.293.724,38	18.033.803.130,25	18.701.760.336,48
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.853.360.903,00	18.294.195.793,42	19.382.859.648,75	20.536.308.477,58	21.758.397.549,65	22.564.310.663,74
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	15.853.360.903,00	18.294.195.793,42	19.382.859.648,75	20.536.308.477,58	21.758.397.549,65	22.564.310.663,74
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	8.740.314.087,00	42.858.402.660,53	43.501.278.700,44	44.153.797.880,94	44.816.104.849,16	46.476.056.439,70
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00	2.451.765.590,68	2.488.542.074,54	2.525.870.205,66	2.563.758.258,75	2.658.717.751,85
4.1.04.05.	Jasa Giro	3.564.123.887,00	17.476.792.614,15	17.738.944.503,37	18.005.028.670,91	18.275.104.100,98	18.951.998.896,32
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	4.656.190.200,00	22.831.773.832,07	23.174.250.439,55	23.521.864.196,14	23.874.692.159,08	24.758.991.081,46
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	20.000.000,00	98.070.623,63	99.541.682,98	101.034.808,23	102.550.330,35	106.348.710,07
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.546.737.384.157,00	3.593.709.056.052,58	3.684.994.250.491,73	3.780.259.578.097,32	3.879.779.918.240,37	4.023.483.769.075,08
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.286.947.759.000,00	3.074.087.879.856,21	3.136.390.943.000,83	3.200.352.723.839,20	3.266.030.437.816,25	3.387.001.513.688,63
4.2.01.05.	Dana Desa	476.017.395.745,17	445.190.923.054,44	454.213.683.390,03	463.476.660.040,19	472.988.138.973,87	490.507.229.850,68
4.2.01.07.	Dana Bagi Hasil (DBH)	104.438.184.282,80	97.674.858.269,00	99.654.451.273,57	101.686.747.721,23	103.773.565.553,00	107.617.252.901,02
4.2.01.08.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.824.901.145.021,78	1.706.722.133.470,68	1.741.312.561.918,98	1.776.823.904.248,65	1.813.287.926.261,46	1.880.450.616.714,80
4.2.01.09.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	881.591.033.950,26	824.499.965.062,08	841.210.246.418,26	858.365.411.829,15	875.980.807.027,92	908.426.414.222,13

No	RINCIAN	APBD 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	259.789.625.157,00	519.621.176.196,37	548.603.307.490,90	579.906.854.258,12	613.749.480.424,12	636.482.255.386,46
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	237.371.049.460,00	474.780.406.803,51	501.261.521.731,83	529.863.725.316,62	560.785.898.150,31	581.556.945.672,66
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	22.418.575.697,00	44.840.769.392,87	47.341.785.759,07	50.043.128.941,50	52.963.582.273,81	54.925.309.713,80
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.439.040.000,00	-	-	-	-	-
4.3.01.	Pendapatan Hibah	13.439.040.000,00	-	-	-	-	-
5	BELANJA	4.728.637.373.172,00	4.955.027.358.658,54	5.151.430.877.110,07	5.338.055.558.162,82	5.549.054.743.424,63	5.775.034.781.630,15
5.1	BELANJA OPERASI	3.372.410.263.004,00	3.729.416.173.854,60	3.787.095.745.467,39	3.849.064.429.304,86	3.915.922.159.710,21	4.075.394.408.620,67
5.1.01	Belanja Pegawai	2.080.541.333.289,00	2.117.942.266.515,00	2.128.531.977.847,57	2.139.174.637.736,81	2.149.870.510.925,50	2.237.421.966.562,44
5.1.02	Belanja Barang Jasa	1.171.273.028.116,00	1.418.401.617.789,37	1.439.926.762.653,31	1.461.778.565.253,40	1.483.961.982.828,13	1.544.394.939.625,40
5.1.05	Belanja Hibah	111.205.967.599,00	168.859.642.394,17	194.551.001.257,30	224.151.203.647,96	258.254.965.392,75	268.772.156.093,63
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.389.934.000,00	24.212.647.156,06	24.086.003.709,20	23.960.022.666,69	23.834.700.563,84	24.805.346.339,22
5.2	BELANJA MODAL	399.332.697.004,00	472.387.312.375,50	542.559.867.179,05	586.473.463.389,04	634.490.324.662,14	660.329.346.700,64
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	6.850.000.000,00	-	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.278.475.786,00	79.419.648.691,43	83.390.631.126,00	87.560.162.682,30	91.938.170.816,42	95.868.080.568,46
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.750.581.318,00	41.015.829.144,97	42.041.224.873,59	43.092.255.495,43	44.169.561.882,82	46.057.595.878,33
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	206.843.389.600,00	351.635.054.313,21	386.798.559.744,53	425.478.415.718,98	468.026.257.290,88	488.032.104.007,28
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	893.536.300,00	316.780.225,89	329.451.434,93	342.629.492,32	356.334.672,02	371.566.246,57
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	716.714.000,00	-	-	-	-	-
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	235.694.286.000,00	82.364.220.147,94	108.611.799.393,59	143.223.877.386,61	188.866.027.155,30	196.557.418.573,43
5.3.01	Belanja Tak Terduga	235.694.286.000,00	82.364.220.147,94	108.611.799.393,59	143.223.877.386,61	188.866.027.155,30	196.557.418.573,43
5.4	BELANJA TRANSFER	721.200.127.164,00	670.859.652.280,50	713.163.465.070,05	759.293.788.082,31	809.776.231.896,98	842.753.607.735,42
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	37.051.670.264,00	60.279.169.887,57	72.053.958.557,47	86.128.806.244,10	102.953.000.966,87	107.145.665.153,40
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	684.148.456.900,00	610.580.482.392,93	641.109.506.512,58	673.164.981.838,21	706.823.230.930,12	735.607.942.582,03
	Surplus/defisit	(100.545.780.800,00)	(159.384.412.547,00)	(192.592.595.610,13)	(205.608.012.810,67)	(231.679.067.143,56)	(180.707.892.363,01)
6	PEMBIAYAAN	100.545.780.800,00	159.384.412.547,00	192.592.595.610,13	205.608.012.810,67	231.679.067.143,56	180.707.892.363,01
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	106.545.780.800,00	165.384.412.546,51	232.592.595.610,13	245.608.012.810,67	241.679.067.143,56	220.707.892.363,01
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	106.545.780.800,00	165.384.412.546,51	232.592.595.610,13	245.608.012.810,67	171.679.067.143,56	220.707.892.363,01
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	70.000.000.000,00	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	10.000.000.000,00	40.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	30.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0	30.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN (SILPA)	-	-	-	-	-	-

Sumber : RAPBD 2025, data diolah Bappeltibangda 2025, data yang dikelola dalam SIP

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PERAN PEMERINTAH SWASTA/DUNIA USAHA MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Koordinasi kelembagaan merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Pentingnya koordinasi ini tidak hanya mencakup sinergi antar lembaga pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat itu sendiri untuk mencapai hasil yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dalam banyak kasus, keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi program penanggulangan kemiskinan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program tersebut (Murdiansyah, I. (2014).

Koordinasi kelembagaan menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas kemiskinan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur dasar. Dengan adanya koordinasi yang baik, setiap pihak dapat menjalankan peran masing-masing sesuai kapasitas dan keahlian yang dimiliki. Menurut Riant Nugroho (2018), tanpa adanya koordinasi yang solid, program-program penanggulangan kemiskinan sering kali berjalan tumpang tindih atau bahkan tidak tepat sasaran. Keterpaduan langkah dan kebijakan dari berbagai sektor menjadi dasar bagi program penanggulangan kemiskinan yang holistik dan sesuai dengan karakteristik sosial-ekonomi lokal.

Selain itu, koordinasi kelembagaan yang efektif dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya yang sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Melalui pembagian tugas yang jelas dan kolaborasi yang kuat, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran serta meningkatkan keterlibatan publik untuk memastikan program yang berjalan berdampak langsung bagi masyarakat miskin. Hal ini juga disoroti dalam studi oleh Eryana, R. (2023) yang menemukan bahwa koordinasi antar lembaga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan outcome program penanggulangan kemiskinan.

Secara keseluruhan, koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan daerah bukan hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan pendekatan-pendekatan inovatif dalam menangani kemiskinan sesuai dengan kebutuhan lokal. Keterpaduan ini memungkinkan kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi lebih adaptif dan relevan dengan kondisi daerah masing-masing, sehingga memiliki dampak yang lebih besar bagi masyarakat rentan (Tamboto, H. J., & Manongko, A. A. C. (2019).

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon telah dilakukan melalui berbagai program dengan pendekatan koordinasi antar lembaga. Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya menyelaraskan peran instansi pemerintahan, swasta, serta organisasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan. Upaya ini mencakup peningkatan

akses pendidikan, kesehatan, perumahan, serta penyediaan lapangan kerja melalui kolaborasi dengan sektor industri lokal. Selain itu, pemerintah berfokus pada integrasi data kemiskinan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, terutama melalui program seperti *Bantuan Langsung Tunai* dan *Kartu Indonesia Sehat* yang didukung oleh basis data terpadu dari Kementerian Sosial (Cirebon News, 2021).

Langkah strategis yang telah dilakukan termasuk pembentukan tim koordinasi pengentasan kemiskinan daerah, yang melibatkan Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Tim ini bekerja untuk memetakan data kemiskinan, menentukan prioritas program, dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Selain itu, koordinasi dengan lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat juga terus diperkuat untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang program pemerintah, terutama di wilayah pedesaan yang masih memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi (Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. 2016).

Rencana ke depan, Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan mengoptimalkan kemitraan dengan organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat miskin dan membuka akses ekonomi yang lebih luas. Selain itu, rencana strategis meliputi pengembangan pusat data kemiskinan terpadu berbasis digital untuk memudahkan pemantauan program dan mencegah duplikasi penerima bantuan (Annisa, M., & Laksmono, B. S. 2023).

Melalui koordinasi yang lebih terpadu dan penggunaan teknologi, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Kabupaten Cirebon melalui TKPKD memiliki strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan setiap perangkat daerah maupun mitra pemerintah Kabupaten Cirebon. Ada 3 (tiga) strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam upaya pengentasan kemiskinan.

1. Mengurangi Beban Pengeluaran

- 1.1. Melalui Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan pengelolaan jaminan Kesehatan masyarakat melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dialokasikan untuk masyarakat miskin pada desil 1-5.
- 1.2. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan fasilitasi pendaftaran penduduk. Kegiatan ini merupakan pelayanan jemput bola bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan, seperti disabilitas, ODGJ, masyarakat yang sakit parah, lansia, dan penduduk rentan lainnya.
- 1.3. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan pemerintah berbasis digital untuk masyarakat miskin sehingga efektif dan efisien. Dalam hal ini, adalah penggunaan aplikasi SIPEPEG untuk pengajuan bantuan sosial bagi masyarakat miskin pada desil 1-5.

- 1.4. Melalui Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan pendataan fakir miskin (verval DTSEN) dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat melalui bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi fakir miskin dan perempuan rawan sosial ekonomi. Hal ini bertujuan agar masyarakat miskin bisa berdaya, memiliki keterampilan, dan bisa menjual/memasarkan produk usahanya. Selain itu, melalui Dinas Sosial ada juga program kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan langsung tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT-DBHCHT). Disamping itu Dinas Sosial juga memiliki kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial dengan penyediaan alat bantu, pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar, serta pemberian layanan kedaruratan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
- 1.5. Melalui Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pengelolaan Dana BOP bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF).
- 1.6. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan untuk masyarakat rentan pangan, dampak gejolak harga, bencana alam, stunting, bencana sosial, dan keadaan darurat, dengan memberikan bantuan beras. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dishanpangan melaksanakan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen dengan menyediakan subsidi harga. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dengan memberikan fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil serta bagi kelompok pengolah dan pemasar ikan/masyarakat juga menjadi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk strategi penanggulangan kemiskinan berbasis pengurangan beban pengeluaran.
- 1.7. Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki program kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar Kawasan permukiman dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah.
- 1.8. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan memasang jaringan

perpipaan di Kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Peningkatan Pendapatan

- 2.1. Melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan melibatkan peran serta masyarakat/pelaku usaha untuk pelatihan peningkatan keterampilan SDM. Agar pelaku usaha di Kabupaten Cirebon bisa bersaing secara global dalam memasarkan produk usahanya.
- 2.2. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro dengan melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon, guna mendorong kemampuan/kapasitas pelaku UMKM, sehingga dapat bersaing dengan pelaku UMKM lainnya. Selain itu juga melaksanakan peningkatan pemberdayaan koperasi. Hal ini bertujuan agar koperasi di Kabupaten Cirebon dapat menunjang pelaku UMKM dan nelayan dalam permodalan.
- 2.3. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan pemberdayaan dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sesuai dengan angka kecukupan gizi. Hal ini bertujuan agar terjadi perputaran ekonomi di kalangan petani lokal dan masyarakat Kabupaten Cirebon. Selain itu, untuk peningkatan pendapatan khususnya di kalangan nelayan, Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan pemberdayaan pengembangan kapasitas nelayan kecil dan Kelompok Usaha Bersama Nelayan, serta fasilitasi rekomendasi penyelenggaraan tempat pelelangan ikan bagi nelayan kecil dan bakul ikan. Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pemantauan bagi pembudidaya ikan, juga merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam upaya pengentasan kemiskinan.
- 2.4. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan pemberdayaan dan pelatihan bagi perempuan kepala keluarga dan perempuan usia produktif.

3. Pengurangan Kantong-kantong Kemiskinan

- 3.1. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), pembangunan tanggul, rehabilitasi tanggul sungai, rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, serta penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa. Hal ini bertujuan untuk mengelola air secara efektif, efisien, adil, dan merata untuk kebutuhan masyarakat

Kabupaten Cirebon guna meningkatkan produktivitas hasil panen. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

1. Kelembagaan yang Terlibat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon

Analisis kelembagaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga memiliki peran kunci dalam memastikan setiap program dan inisiatif penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan efisien. Berikut ini adalah uraian peran masing-masing pihak, yaitu Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal, Lembaga Swasta dan Korporasi, serta Lembaga Masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintah:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon merupakan lembaga utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Cirebon. Pemerintah Daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan program yang berfokus pada aspek-aspek penting seperti kesehatan, pendidikan, dan akses ekonomi bagi masyarakat miskin. Selain itu, Pemerintah Daerah memegang peran dalam memetakan kondisi sosial-ekonomi daerah secara mendalam, sehingga program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran. Melalui berbagai dinas, seperti Dinas Sosial, Bappeda, dan Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah memastikan bahwa bantuan sosial dan layanan dasar dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan. Pemerintah Daerah juga bertugas mengintegrasikan berbagai program dari pusat agar selaras dengan kondisi daerah dan mengadakan forum koordinasi yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan berbagai pihak untuk menyinergikan sumber daya yang ada.

B. Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal

Pemerintah Pusat, melalui instansi-instansi vertikal seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, memiliki peran dalam penyusunan kebijakan makro yang dapat diadaptasi di tingkat daerah. Mereka menyediakan pedoman, pendanaan, dan pengawasan untuk memastikan standar layanan minimum di berbagai daerah. Pemerintah Pusat juga menyelenggarakan program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Kartu Indonesia Pintar yang merupakan langkah untuk mendukung pengentasan kemiskinan secara langsung.

Instansi vertikal di tingkat daerah, seperti kantor perwakilan kementerian, bertanggung jawab untuk mendistribusikan bantuan dari pusat dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam penerapan program. Dalam beberapa kasus, Pemerintah Pusat juga membantu

dengan teknologi dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengevaluasi program-program penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, pemerintah pusat juga memiliki peran krusial sebagai penyedia sekaligus mengorkestrasikan *updating* data keluarga miskin. Akurasi data mengenai keluarga miskin di level daerah menjadi hal penting, hal tersebut menjadi faktor kunci pada efektifitas berbagai program penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat kuratif maupun preventif.

C. Lembaga Swasta dan Korporasi

Lembaga swasta dan korporasi berperan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan berbagai inisiatif sosial lainnya yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di masyarakat miskin. Peran mereka sering kali terfokus pada penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal usaha bagi kelompok masyarakat yang rentan. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, perusahaan dapat terlibat dalam program-program pelatihan bagi UMKM, penyaluran bantuan untuk pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung kegiatan ekonomi di masyarakat miskin.

Seperti yang dilakukan pada berbagai daerah, perusahaan besar juga ikut berkontribusi dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan fasilitas air bersih atau perbaikan fasilitas umum. Melalui inisiatif CSR yang terintegrasi dengan program daerah, lembaga swasta mampu memperluas dampak sosial positif yang mendorong pengurangan tingkat kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Di Kabupaten Cirebon, Baznas sebagai mitra sangat berperan aktif dalam pemberian CSR dan dana taktis untuk penanggulangan kemiskinan. CSR Baznas tidak terlepas dari peran ASN di Kabupaten Cirebon melalui iuran bulanan yang diambil dari TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan).

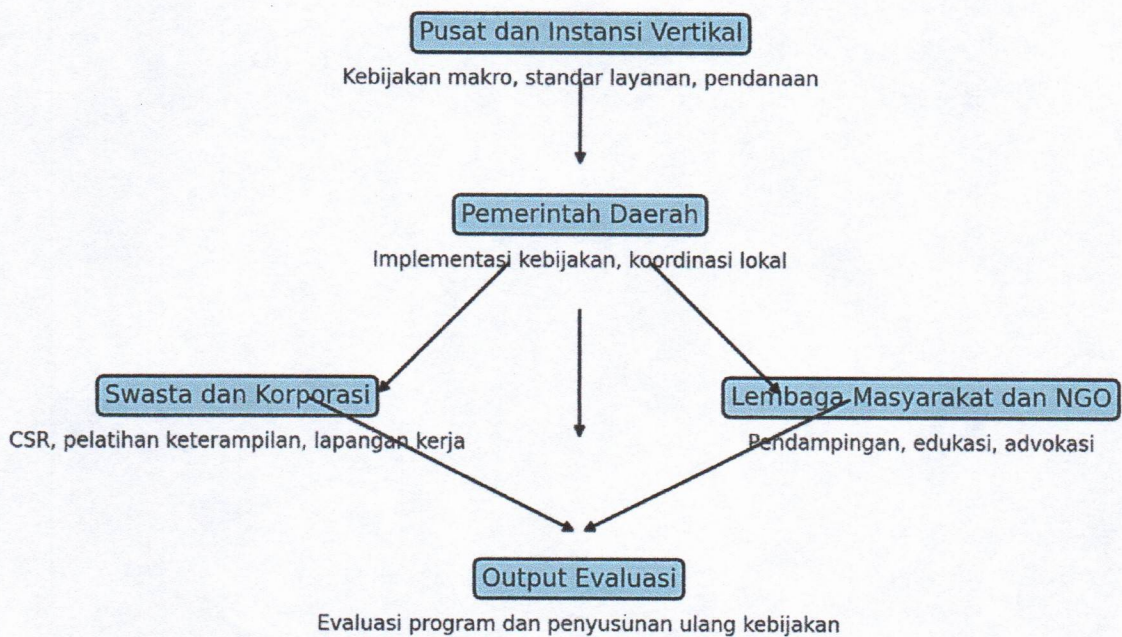
D. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintah

Lembaga masyarakat dan NGO berperan sebagai mitra penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah, terutama dalam hal advokasi, pendidikan, serta pendampingan masyarakat miskin. Mereka bekerja langsung di tingkat akar rumput (*grassroots*) untuk memastikan masyarakat yang rentan mendapatkan akses terhadap hak-hak dasar dan informasi mengenai program-program bantuan yang tersedia. NGO berperan dalam mengisi kesenjangan layanan yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah, seperti edukasi kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, hingga advokasi terhadap hak-hak kelompok marginal.

Lembaga masyarakat dan NGO juga memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang

berbasis pada kebutuhan masyarakat, NGO dapat mengidentifikasi dan menangani isu-isu spesifik yang dialami oleh komunitas lokal dan berkontribusi pada penguatan kapasitas masyarakat untuk secara mandiri meningkatkan taraf hidup mereka.

Di Kabupaten Cirebon ada beberapa NGO yang selama ini membantu dalam penanggulangan kemiskinan. Diantaranya Lembaga Langgeng Mutiara Insan, yang bergerak dalam membantu permodalan kewirausahaan bagi eks Wanita pekerja seks di wilayah Kabupaten Cirebon, bantuan permakanan bagi anak yang menderita HIV, dan diklat vokasi peningkatan kapasitas tenaga kerja bagi lulusan SMA atau sederajat yang berusia 17 sampai 25 tahun yang belum bekerja. Selain itu ada juga Lembaga Mawar Balqis yang bergerak dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan beberapa NGO lainnya yang selalu bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penanggulangan kemiskinan.



Gambar 5.1
Alur Peran Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1.1. Peran dan Fungsi Kelembagaan dalam Penanggulangan Kemiskinan

Berikut adalah analisis kelembagaan berdasarkan empat fungsi utama yang penting dalam dokumen penanggulangan kemiskinan daerah: Penyedia Layanan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi, Peran Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan, serta Penguatan Kapasitas Kelembagaan. Setiap fungsi memiliki perannya masing-masing dalam memastikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dapat berlangsung secara komprehensif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

A. Penyediaan Layanan Sosial

Fungsi Penyedia Layanan Sosial di tingkat kelembagaan daerah bertanggung jawab untuk memastikan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pangan, dan

perumahan. Pemerintah Daerah, melalui Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, berperan dalam mendistribusikan layanan sosial kepada masyarakat rentan yang membutuhkan. Program bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan, serta program pendidikan gratis, dirancang untuk meringankan beban finansial keluarga miskin dan memberi kesempatan kepada generasi muda untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Layanan ini bersifat krusial karena kemiskinan sering kali mempengaruhi kesehatan dan tingkat pendidikan, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan adanya layanan sosial yang terjangkau dan berkualitas, masyarakat miskin memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan.

B. Pemberdayaan Ekonomi

Fungsi Pemberdayaan Ekonomi difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin agar mereka dapat mandiri secara finansial dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Fungsi ini dijalankan oleh dinas terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi dan UMKM, serta mendapat dukungan dari lembaga swasta dan NGO. Program pemberdayaan ekonomi mencakup pelatihan keterampilan, fasilitasi modal usaha bagi UMKM, dan pengembangan pasar untuk produk lokal. Selain itu, program ini juga mendorong masyarakat miskin untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan. Melalui program pemberdayaan ekonomi yang menysasar kebutuhan lokal, pemerintah daerah dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong terciptanya wirausaha di kalangan masyarakat rentan, sehingga mereka memiliki pendapatan yang stabil dan berkelanjutan.

C. Peran Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

Fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan berperan sebagai penghubung yang memastikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan dari berbagai lembaga berjalan harmonis dan tidak tumpang tindih. Pemerintah Daerah, terutama melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), berperan sebagai koordinator dalam menyinergikan kebijakan yang melibatkan berbagai dinas, instansi vertikal dari Pemerintah Pusat, swasta, dan NGO. Koordinasi ini melibatkan penyusunan rencana aksi daerah, penyelarasan data kemiskinan, serta penyelenggaraan forum bersama untuk membahas dan mengevaluasi hasil program yang telah berjalan. Peran koordinasi sangat penting untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran dan sumber daya, serta memastikan bahwa kebijakan dan program-program yang dijalankan tidak saling bertentangan. Dengan sinkronisasi yang baik, Pemerintah Daerah dapat menanggulangi kemiskinan dengan pendekatan terpadu yang mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara serentak.

D. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Fungsi Penguatan Kapasitas Kelembagaan berfokus pada peningkatan kompetensi, sumber daya, dan sistem kelembagaan daerah agar lebih responsif dan efektif dalam menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan. Penguatan kapasitas melibatkan pelatihan pegawai, peningkatan teknologi informasi, dan pengelolaan data kemiskinan yang terintegrasi. Kelembagaan yang kuat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin secara cepat, menyusun program yang relevan, serta memantau dan mengevaluasi hasil program dengan lebih baik. Pemerintah Pusat sering kali memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan atau teknologi kepada Pemerintah Daerah agar mereka dapat mengelola program kemiskinan secara lebih mandiri. Di sisi lain, NGO juga berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan keterampilan hidup (life skills) dan program pengembangan komunitas. Dengan kapasitas kelembagaan yang kuat, setiap program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, dan masyarakat dapat lebih diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Untuk memperkuat peran kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cirebon melaksanakan rapat koordinasi dan rapat evaluasi kinerja dengan seluruh perangkat daerah, akademisi, NGO, maupun mitra kerja yang tergabung dalam SK TKPKD Kabupaten Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali.

E. Sinergi Keempat Fungsi dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Keempat fungsi ini tidak bekerja secara terpisah melainkan saling melengkapi dalam menciptakan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif. Penyedia Layanan Sosial memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, sementara Pemberdayaan Ekonomi mendorong kemandirian finansial. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan mengarahkan jalannya program agar lebih efektif dan terintegrasi, dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan menjamin bahwa setiap lembaga memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melaksanakan program dengan baik. Sinergi yang terjalin antara keempat fungsi ini memungkinkan Pemerintah Daerah dan seluruh pihak yang terlibat untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan dan adaptif, yang secara bertahap mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

1.2. Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga

Koordinasi dan sinergitas antar lembaga menjadi aspek penting dalam upaya holistik penanggulangan kemiskinan daerah pada aspek penguatan kelembagaan. Secara umum terdapat beberapa dimensi pada fokus peningkatan koordinasi dan sinergitas antar lembaga yaitu:

- **Mekanisme Koordinasi.** Mekanisme koordinasi adalah sistem yang dirancang untuk menyelaraskan peran, tanggung jawab, serta kegiatan antar-lembaga yang terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam mekanisme ini, pemerintah daerah biasanya menetapkan

struktur dan jadwal pertemuan reguler yang melibatkan lembaga-lembaga terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta lembaga swasta dan organisasi non-pemerintah. Melalui pertemuan berkala ini, setiap lembaga dapat menyampaikan kemajuan, hambatan, serta kebutuhan mereka dalam pelaksanaan program kemiskinan.

Mekanisme ini bertujuan untuk memfasilitasi aliran informasi antar-lembaga sehingga tidak ada program yang tumpang tindih atau bertentangan. Koordinasi yang kuat memungkinkan lembaga-lembaga untuk berbagi data dan memperbarui target prioritas sesuai perkembangan lapangan. Mekanisme ini juga memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja yang terintegrasi dan memastikan anggaran dapat digunakan secara optimal. Mekanisme koordinasi yang efektif, terutama dengan adanya sistem data terpadu, memastikan bahwa setiap upaya menuju penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih terarah dan konsisten.

- **Kolaborasi Multi-Pihak.** Kolaborasi multi-pihak merupakan upaya untuk menggabungkan sumber daya dan keahlian dari berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Pihak-pihak ini meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swasta, NGO, akademisi, dan masyarakat. Dalam kolaborasi ini, setiap pihak memiliki peran spesifik: pemerintah daerah dan pusat sebagai penyusun kebijakan dan penyedia anggaran, lembaga swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang menyasar program pemberdayaan ekonomi, serta NGO dan akademisi yang melakukan pendampingan dan riset untuk mengidentifikasi kebutuhan lokal. Kolaborasi multi-pihak memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih besar dan lebih beragam, seperti pendanaan, teknologi, dan jaringan yang lebih luas, sehingga dampak dari program penanggulangan kemiskinan dapat lebih maksimal. Kolaborasi ini juga memperluas keterlibatan masyarakat sehingga mereka memiliki peran dalam setiap tahap implementasi. Pendekatan ini bukan hanya memastikan bahwa program lebih efektif, tetapi juga menciptakan keberlanjutan melalui pemberdayaan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam peningkatan taraf hidupnya. Kolaborasi multi-pihak memberikan kesempatan bagi setiap pihak untuk saling melengkapi dalam keahlian dan kapasitas, menciptakan solusi yang lebih holistik dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat miskin.
- **Identifikasi Potensi Konflik dan Solusi.** Dalam proses koordinasi dan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, potensi konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari. Konflik ini dapat muncul karena perbedaan prioritas, keterbatasan sumber daya, atau ketidaksesuaian dalam prosedur pelaksanaan program. Identifikasi potensi konflik ini menjadi bagian penting dalam analisis kelembagaan untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan menemukan solusi sejak dini.

Pemerintah daerah biasanya membentuk forum atau kelompok kerja khusus yang bertugas untuk mendeteksi potensi konflik, misalnya ketidaksesuaian antara kepentingan swasta dan kebijakan publik, atau perbedaan data dan metode yang digunakan oleh lembaga pemerintah dan NGO. Melalui identifikasi potensi konflik ini, pemerintah daerah dapat mengambil langkah pencegahan, seperti mengembangkan standar prosedur kerja yang disepakati bersama atau mengadakan pelatihan bersama untuk menyamakan pemahaman antar-lembaga. Selain itu, pendekatan mediasi dan dialog terbuka juga penting untuk mencegah konflik menjadi hambatan yang signifikan.

Ketika konflik dapat diidentifikasi dan diatasi sejak awal, setiap pihak dapat bekerja secara lebih harmonis dan fokus pada tujuan bersama, yaitu penanggulangan kemiskinan. Solusi yang didiskusikan secara terbuka membantu membangun kepercayaan antar-pihak, serta menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan transparan. Identifikasi potensi konflik dan solusi memastikan bahwa setiap perbedaan dapat diatasi dengan bijak, memungkinkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih efektif.

Dengan adanya mekanisme koordinasi, kolaborasi multi-pihak, serta identifikasi potensi konflik dan solusi, pemerintah daerah bersama lembaga-lembaga terkait dapat membangun sinergi yang kuat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Setiap elemen ini memiliki peran spesifik yang saling mendukung untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Mekanisme koordinasi memberikan dasar yang kuat untuk menyelaraskan program, kolaborasi multi-pihak memperluas cakupan sumber daya, dan identifikasi potensi konflik memastikan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Bersama-sama, elemen-elemen ini memungkinkan berbagai lembaga untuk berperan optimal dalam menciptakan solusi kemiskinan yang tepat guna dan efektif di tingkat daerah.

1.3. Rekomendasi Penguatan Kelembagaan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa rumusan rekomendasi yang dapat memperkuat peran dan kapasitas kelembagaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Beberapa aspek tersebut antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan dan pengembangan SDM di berbagai lembaga yang terlibat.
2. Perbaikan Koordinasi dan Komunikasi. Membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan terintegrasi.
3. Peningkatan Penggunaan Data. Penguatan basis data kemiskinan yang lebih akurat dan terupdate, yang dapat digunakan bersama oleh seluruh pihak yang terlibat.
4. Optimalisasi Pendanaan. Pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran dan transparan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan.

BAB VI

LOKASI PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

6.1 Penentuan Lokasi Prioritas

Penanggulangan kemiskinan yang efektif memerlukan penentuan lokasi prioritas yang berbasis data dan analisis kontekstual. Kabupaten Cirebon menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) sebagai satu-satunya sumber data resmi untuk pemeringkatan kesejahteraan masyarakat. DTSEN mencakup klasifikasi desil 1 hingga desil 10, di mana desil 1 mewakili kelompok termiskin (kemiskinan ekstrim) dan desil 2-5 mencerminkan kelompok miskin hingga rentan miskin.

Penentuan lokasi prioritas dalam dokumen ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang OPPKPKE serta Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 yang mengamanatkan penyelarasan strategi penanggulangan kemiskinan dengan dokumen perencanaan daerah. Analisis dilakukan secara tematik, mencakup variabel sosial-ekonomi seperti rumah tidak layak huni (RTLH), akses air minum dan sanitasi, listrik, pendidikan dan kesehatan.

6.2 Gambaran Umum Kemiskinan Kabupaten Cirebon

Berdasarkan data DTSEN per Oktober 2025, Kabupaten Cirebon memiliki total penduduk 2.532.216 jiwa dalam sistem. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.362.598 jiwa atau 53,81 % berada dalam kelompok desil 1 hingga desil 5. Artinya lebih dari sebagian penduduk Kabupaten Cirebon tergolong miskin atau rentan miskin.

Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di kabupaten Cirebon bukan hanya bersifat ekstrim, tetapi juga tersebar dalam bentuk kerentanan struktural yang memerlukan pendekatan berlapis, seperti bantuan sosial, perbaikan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi.

6.3 Konsentrasi Kemiskinan Ekstrim (Desil 1)

Lima Kecamatan dengan konsentrasi tertinggi penduduk Desil 1 berturut-turut adalah Kecamatan Gregeed sebesar 22,94%, Kecamatan Susukan Lebak sebesar 18,65%, Kecamatan Karangwareng sebesar 15,67%, Kecamatan Jamblang sebesar 14,44% dan Kecamatan Gempol sebesar 14,72%. Sebaliknya Kecamatan Gunungjati memiliki persentase Desil 1 terendah sebesar 5,96%.

Kecamatan Gregeed terpilih sebagai lokus kemiskinan ekstrem dengan dua desa Nanggela dan desa Lebak Mekar karena memiliki lebih dari 2950 penduduk dalam kategori Desil 1. Hal ini menuntut intervensi cepat dan masif, seperti bantuan sosial tunai atau non tunai (Bansos, BPNT,dll), layanan kesehatan gratis seperti PBI JKN atau PBPU, perbaikan infrsatruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi.

6.4 Konsentrasi Kemiskinan Miskin-Rentan (Desil 2-5)

Tiga kecamatan dengan konsentrasi tertinggi penduduk Desil 2 atau Kelompok Miskin berturut-turut adalah Kecamatan Greged sebesar 16,63%, Kecamatan Karangwareng sebesar 15,80% dan Kecamatan Susukan Lebak sebanyak 15,35%.

Tiga kecamatan dengan konsentrasi tertinggi penduduk Desil 3 atau Hampir miskin berturut-turut adalah Kecamatan Karangwareng sebesar 15,05%, Kecamatan Waled sebesar 14,44% dan Kecamatan Greged sebanyak 14,04%.

Tiga kecamatan dengan konsentrasi tertinggi penduduk Desil 4 atau Menengah Kebawah berturut-turut adalah Kecamatan Sedong sebesar 12,81% dan Kecamatan Waled sebanyak 12,81%, dan Kecamatan Pasaleman 12,08%. waled 1209 pangenan 1241 sedong 1214

Pada Desil 5, Kecamatan yang memiliki konsentrasi tertinggi adalah Kecamatan Sedong sebesar 12,41%, Kecamatan Sedong sebesar 12,14% dan Kecamatan Waled 12,09%.

6.5 Kantong Kemiskinan Akut (Tingkat Desa)

Desa dengan persentase Desil 1 tertinggi terdiri dari Desa Nanggela Kecamatan Greged sebesar 32,09%, Desa Lebak Mekar Kecamatan Greged sebesar 28,37%, Desa Kudukeras Kecamatan Babakan sebesar 23,56%, Desa Sigong Kecamatan Lemahabang sebesar 23,12% dan Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang sebesar 19,97%.

Desa-desa tersebut menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan sosial, perbaikan infrastruktur dasar. Verifikasi dan validasi data serta pemetaan harus dilakukan secara kolaboratif antara TKPK, Perangkat Daerah dan Perangkat Desa.

6.6 Analisis Kuadran Lokasi Prioritas

Untuk memperjelas strategi intervensi, dilakukan analisis kuadran berdasarkan kombinasi antara tingkat kemiskinan (Desil 1) dan kondisi sosial-ekonomi (RTLH, sanitasi, listrik dan pendidikan).

- **Kuadran I (Prioritas Utama):** Kecamatan Greged, Kecamatan Susukan Lebak, dan Kecamatan Karangwareng.
- **Kuadran II (Prioritas Menengah):** Kecamatan Babakan, Kecamatan Jamblang, dan Kecamatan Gempol.
- **Kuadran III (Pemberdayaan):** Kecamatan Ciledug, Kecamatan Sedong, dan Kecamatan Waled
- **Kuadran IV (Pemeliharaan):** Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Kapetakan

Analisis ini membantu merancang program yang sesuai dengan karakteristik wilayah, baik berupa bantuan langsung, perbaikan struktural, maupun pemberdayaan ekonomi.

6.7 Rekomendasi Strategis

Rekomendasi strategis yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa adalah sebagai berikut:

1. **Intervensi Cepat:** Alokasikan bantuan sosial di desa dengan Desil 1 > 20%, seperti Desa Nanggela dan Desa Lebak Mekar.
2. **Intervensi Struktural:** Perbaiki RTLH, sanitasi, air bersih, dan listrik di kecamatan Kecamatan Gebang, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Babakan, dan Kecamatan Losari.
3. **Intervensi Pemberdayaan:** Pelatihan keterampilan dan akses modal usaha di kecamatan dengan dominasi Desil 5.
4. **Intervensi Preventif:** Monitoring kecamatan dengan Desil rendah agar tidak terjadi kemiskinan baru.

Tabel 6.1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Kabupaten Cirebon Tahun 2025

NO	KECAMATAN	KELUARGA	ANGGOTA KELUARGA	DESIL 1		DESIL 2		DESIL 3		DESIL 4		DESIL 5		DESIL 6-10		BELUM PEMERINGKATAN		NONAKTIF	
				Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota
1	Arjawinangun	26.771	78.152	2.273	6.794	2.158	6.817	2.139	6.944	2.601	8.290	2.437	7.348	12.264	36.772	2.156	4.597	743	590
2	Astanajapura	29.885	90.595	3.696	11.275	3.001	9.686	2.800	9.517	3.152	10.440	2.898	9.271	11.992	37.060	1.699	2.885	647	461
3	Babakan	28.848	78.950	3.748	10.409	3.144	9.519	3.179	9.672	2.860	8.456	2.750	7.914	10.742	29.991	1.663	2.509	762	480
4	Beber	16.493	50.494	1.907	6.261	1.813	6.341	1.874	6.398	1.827	5.943	1.744	5.518	6.196	18.480	577	1.056	555	497
5	Ciledug	18.242	50.053	1.859	5.019	1.618	4.865	1.781	5.301	1.746	5.408	1.776	5.111	8.207	22.731	815	1.288	440	330
6	Ciwaringin	15.725	43.890	1.618	4.712	1.594	4.724	1.449	4.669	1.547	4.621	1.569	4.579	6.296	18.061	1.213	2.171	439	353
7	Depok	24.904	74.039	2.534	8.262	2.327	7.765	2.469	8.216	2.561	7.928	2.594	7.842	10.862	31.842	862	1.533	695	651
8	Dukupuntang	25.803	74.246	2.674	7.767	2.566	8.306	2.875	9.308	2.846	8.693	2.833	8.389	10.239	29.357	1.010	1.732	760	694
9	Gebang	26.733	75.753	3.706	10.453	3.090	9.597	2.924	9.268	2.782	8.585	2.489	7.426	9.417	27.295	1.651	2.579	674	550
10	Gegesik	28.729	77.588	2.594	6.938	2.799	8.092	2.952	9.143	3.215	9.618	3.129	8.938	11.664	31.684	1.542	2.519	834	656
11	Gempol	17.955	51.514	2.347	7.365	1.894	5.605	1.737	5.287	1.777	5.354	1.666	4.918	7.306	21.477	748	1.173	480	335
12	Greged	21.454	65.778	4.705	15.875	3.388	11.301	2.879	9.492	2.189	6.852	1.824	5.421	5.249	15.417	622	995	598	425
13	Gunung Jati	30.840	88.756	1.714	5.056	1.615	4.763	1.701	5.324	1.997	6.417	2.585	7.852	18.497	55.147	2.000	3.761	731	436
14	Jamblang	14.978	42.072	2.027	6.101	1.947	6.115	1.706	5.306	1.661	4.888	1.486	4.100	5.266	14.507	451	736	434	319
15	Kaliwedi	17.062	46.281	1.406	3.723	1.492	4.459	1.599	5.104	1.741	5.298	1.928	5.514	7.447	20.318	991	1.519	458	346
16	Kapetakan	23.071	67.953	2.188	6.738	1.993	6.423	2.097	6.976	2.444	7.692	2.298	7.131	9.976	29.941	1.457	2.574	618	478
17	Karangsembung	14.158	39.866	1.849	5.365	1.580	5.049	1.606	5.139	1.480	4.516	1.448	4.086	5.293	14.685	503	719	399	307
18	Karangwareng	11.322	31.065	1.712	4.771	1.597	4.817	1.504	4.620	1.227	3.559	1.092	3.056	3.547	9.581	306	460	337	201
19	Kedawung	22.824	65.724	1.732	5.238	1.653	5.325	1.556	5.020	1.675	5.229	1.871	5.457	11.855	35.165	1.890	3.777	592	513

NO	KECAMATAN	KELUARGA	ANGGOTA KELUARGA	DESIL 1		DESIL 2		DESIL 3		DESIL 4		DESIL 5		DESIL 6-10		BELUM PEMERINGKATAN		NONAKTIF	
				Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota
20	Klangenan	20.338	57.912																
21	Lemahabang	21.438	61.943	2.875	8.745	2.457	7.708	2.374	7.561	2.147	6.530	1.997	5.902	8.203	23.610	876	1.494	509	393
22	Losari	24.326	69.172	3.053	8.716	2.542	7.865	2.752	8.842	2.686	8.271	2.523	7.619	8.814	25.243	1.219	1.997	737	619
23	Mundu	30.060	91.199	2.392	7.578	2.077	6.932	2.611	8.644	2.994	9.587	3.110	9.601	14.847	45.723	1.293	2.385	736	749
24	Pabedilan	24.154	65.380	2.827	7.387	2.654	7.900	2.977	8.943	2.610	7.698	2.735	7.678	8.841	24.030	907	1.321	603	423
25	Pabuaran	14.516	40.664	1.827	5.032	1.656	5.108	1.619	5.046	1.504	4.553	1.448	4.260	5.541	15.513	596	885	325	267
26	Palimanan	23.304	67.481	2.289	7.478	2.235	7.424	2.361	7.698	2.359	7.130	2.253	6.545	10.226	29.139	859	1.500	722	567
27	Pangenan	17.776	52.810	1.524	4.566	1.490	4.659	1.766	5.651	1.958	6.313	2.100	6.480	7.885	23.744	628	1.044	425	353
28	Panguragan	17.651	48.620	1.825	5.076	1.768	5.116	1.678	5.111	1.666	5.169	1.904	5.633	6.968	19.720	1.385	2.370	457	425
29	Pasaleman	10.905	29.900	1.400	3.398	1.245	3.546	1.340	4.076	1.192	3.640	1.179	3.376	3.858	11.017	393	550	298	297
30	Plered	20.413	60.412	2.186	6.623	1.929	6.116	2.048	6.734	1.890	6.034	2.028	6.114	8.936	26.947	850	1.460	546	384
31	Plumbon	31.159	89.940	2.023	6.026	1.908	6.094	2.261	7.245	2.712	8.340	2.715	7.996	17.374	51.220	1.291	2.306	875	713
32	Sedong	16.074	47.477	1.664	5.046	1.884	6.090	2.077	6.675	1.926	6.006	1.944	5.777	5.810	16.921	380	637	389	325
33	Sumber	35.045	108.670	3.457	11.675	3.187	10.793	3.441	11.766	3.279	10.769	3.343	10.406	15.854	49.483	1.551	2.941	933	837
34	Suranenggala	17.776	51.188	1.459	4.277	1.255	3.686	1.331	4.333	1.555	4.876	1.660	4.982	9.044	27.088	970	1.647	502	299
35	Susukan	29.671	79.499	2.791	7.436	2.305	6.287	2.032	6.066	2.610	7.597	2.598	7.382	13.955	39.741	2.600	4.377	780	613
36	Susukan Lebak	15.538	45.016	2.554	8.187	2.209	6.990	2.027	6.337	1.657	4.877	1.503	4.207	4.833	13.561	305	509	450	348
37	Talun	25.986	80.791	2.139	7.197	2.176	7.382	2.360	7.918	2.386	7.717	2.436	7.452	12.792	40.378	1.060	2.229	637	518
38	Tengah Tani	16.639	49.804	2.099	6.470	1.608	5.238	1.582	5.234	1.515	4.778	1.578	4.861	7.179	21.572	748	1.425	330	226
39	Waled	22.217	63.811	2.931	8.261	2.813	8.919	2.873	9.157	2.633	8.090	2.630	7.625	7.176	20.278	683	1.064	478	417
40	Weru	25.885	77.758	3.289	10.501	2.919	9.784	2.840	9.267	2.562	7.936	2.473	7.522	10.059	30.079	1.106	2.147	637	522

BAB VII

PRIORITAS PROGRAM

Penyusunan prioritas program dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Cirebon periode 2025-2029 merupakan langkah strategis untuk menerjemahkan mandat pembangunan jangka menengah ke dalam aksi nyata yang terukur. Segala upaya penanggulangan kemiskinan yang dirumuskan dalam dokumen ini secara fundamental bermuara pada pencapaian **visi** besar Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, yaitu: **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, dan Aman."** Visi ini bukan sekadar cita-cita abstrak, melainkan ruh yang menjiwai setiap intervensi program, di mana pengentasan kemiskinan diletakkan sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Melalui bab ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak dilakukan secara parsial, melainkan terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih luas, guna memastikan bahwa hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kelompok rentan.

Selaras dengan mandat **Misi Ketiga** pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, **menciptakan masyarakat yang maju dan modern tanpa meninggalkan jati diri adat dan budaya lokal**. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi yang berbasis pada inklusivitas menjadi salah satu prioritas utama, dengan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya penduduk miskin, dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Transformasi ekonomi ini dirancang untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap kesempatan kerja dan peluang usaha, sehingga kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam dinamika kemajuan daerah. Peningkatan kualitas manusia menjadi perhatian utama dalam misi ini, di mana pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta pelestarian dan penguatan budaya lokal menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat Cirebon yang maju, berdaya saing, namun tetap memiliki identitas dan jati diri yang kuat.

Realisasi dari misi tersebut dituangkan dalam **tujuan** untuk **mewujudkan masyarakat yang maju, modern, sejahtera, dan berkualitas**. Hal ini dijabarkan melalui **sasaran-sasaran** konkret, yakni **meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi, infrastruktur, dan ketahanan pangan yang inklusif**. Dalam konteks RPKD, pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan menjadi instrumen krusial untuk memperkuat fondasi ekonomi rumah tangga miskin, sehingga mereka memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap gejolak ekonomi. Selain itu, sasaran **peningkatan kualitas manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, budaya, dan pembangunan keluarga** menjadi target antara yang sangat menentukan. Pemerintah Kabupaten Cirebon meyakini bahwa dengan memutus

rantai kemiskinan melalui akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, akan tercipta generasi masa depan yang mandiri dan mampu membawa keluarga mereka keluar dari garis kemiskinan secara permanen.

Lebih lanjut, keberhasilan penanggulangan kemiskinan juga sangat bergantung pada kondisi lingkungan sosial dan alam yang mendukung, sebagaimana tertuang dalam **Misi Kelima**, yaitu **menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman**. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Aman”, yang merupakan aspek penting dalam perlindungan masyarakat miskin. Fokus utama dari misi ini adalah meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap berbagai tantangan, termasuk bencana dan degradasi lingkungan. Masyarakat miskin seringkali menjadi kelompok yang paling terdampak ketika terjadi bencana alam atau kerusakan lingkungan; oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan dalam RPKD ini juga mencakup aspek mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset-aset produktif dan tempat tinggal masyarakat miskin tetap terlindungi dari risiko eksternal yang dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka.

Guna mendukung terciptanya lingkungan yang ideal bagi penanggulangan kemiskinan, arah kebijakan dalam bab ini juga mengacu pada **tujuan** untuk **mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman**. **Sasaran** utama yang ingin dicapai adalah **meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan serta penguatan ketahanan daerah**. Ketahanan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur fisik, tetapi juga mengenai ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi berbagai guncangan. Dengan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, masyarakat miskin dapat mengakses sumber daya alam secara lebih adil dan sehat, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan produktivitas mereka. Melalui integrasi antara pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta penciptaan lingkungan yang aman dan lestari, prioritas program dalam RPKD ini diharapkan mampu menjadi akselerator dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon secara signifikan dan berkelanjutan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029.

7.1. Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Cirebon 2025-2029 diformulasikan sebagai respons strategis terhadap tantangan struktural yang dihadapi daerah, meliputi rendahnya kualitas modal manusia, keterbatasan infrastruktur dasar di kantong-kantong kemiskinan, serta kerentanan ekonomi masyarakat pesisir dan agraris. Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat karitatif dan parsial menuju pendekatan yang bersifat pemberdayaan, perlindungan sosial adaptif, dan pengembangan ekonomi inklusif.

Prinsip utama yang memandu arah kebijakan ini adalah "Konvergensi Intervensi". Konvergensi mensyaratkan bahwa penurunan kemiskinan tidak dapat dicapai jika intervensi dilakukan secara terfragmentasi. Keluarga miskin

di Kecamatan Astanajapura atau Greged, misalnya, tidak hanya membutuhkan bantuan pangan, tetapi secara simultan membutuhkan akses air bersih, pelatihan vokasi untuk angkatan kerjanya, dan jaminan kesehatan untuk lansianya. Oleh karena itu, arah kebijakan ini mewajibkan seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk menanggalkan ego sektoral dan menyatukan program mereka pada lokus prioritas yang sama.

Bagian ini menguraikan komitmen strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menetapkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sinkron dengan target pembangunan makro. Arah kebijakan ini ditetapkan sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan agar terjadi integrasi antara target nasional dengan intervensi daerah. Target penurunan angka kemiskinan yang dirumuskan bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari upaya peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui perencanaan yang sistematis dan akuntabel. Penentuan target ini menjadi landasan bagi operasionalisasi program prioritas selama periode 2026-2030.

7.1.1 Penyelarasan Visi Misi: Transformasi Pengentasan Kemiskinan Menuju Kemandirian Daerah

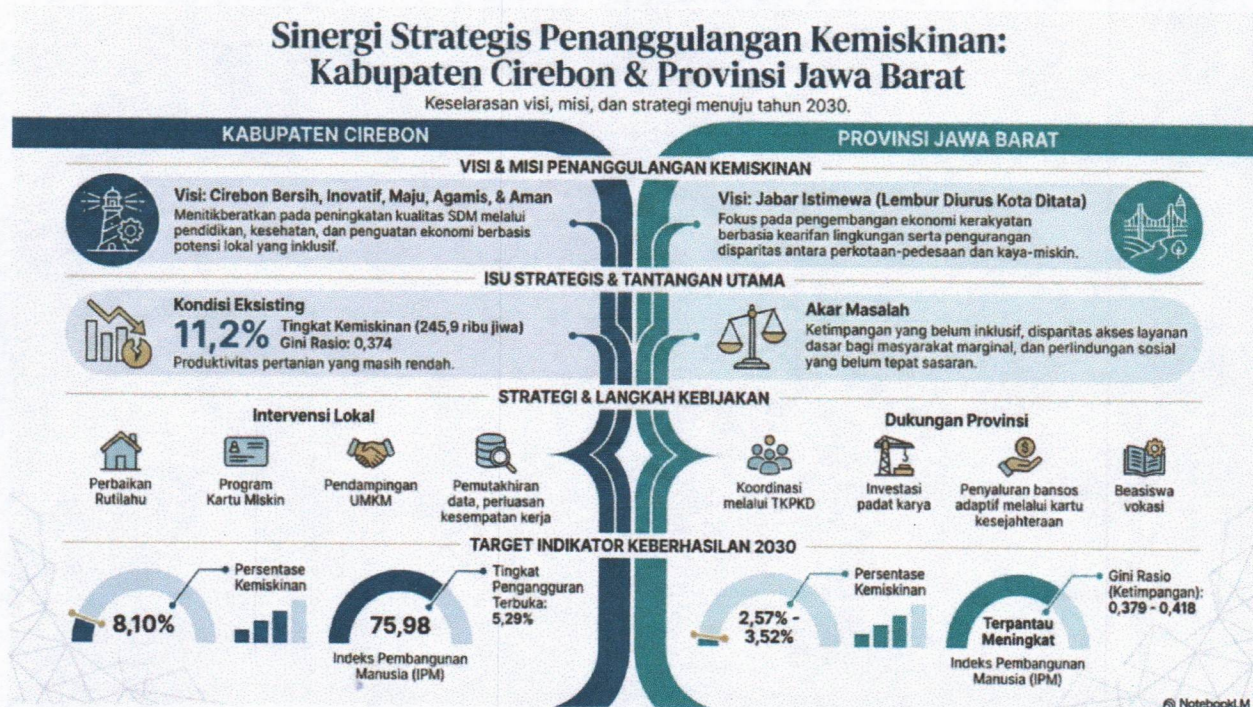
Dalam arsitektur perencanaan pembangunan, sinkronisasi antara visi kabupaten dan provinsi bukan sekadar formalitas administratif dalam penyusunan dokumen daerah. Penyelarasan ini merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin **efektivitas birokrasi dan koherensi anggaran**, di mana setiap rupiah yang dialokasikan harus terkonvergensi pada target makro pembangunan yang seragam.

Keselarasan ini menjadi fondasi bagi penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Tanpa visi yang padu, intervensi kemiskinan akan terjebak dalam pola parsial dan tumpang tindih sektoral. Oleh karena itu, integrasi kebijakan antara Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat menjadi landasan filosofis sekaligus teknokratis untuk memastikan bahwa akselerasi kesejahteraan rakyat berjalan dalam rel yang sama.

7.1.1.1. Visi "Cirebon BERIMAN" dan "Jabar Istimewa"

Visi Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam "**Cirebon BERIMAN**" (Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, dan Aman) memiliki resonansi kuat dengan visi besar RPJMD Jawa Barat, "**Jabar Istimewa**". Analisis strategis menunjukkan bahwa nilai religiusitas dan martabat (dignity) dalam "BERIMAN" merupakan pilar utama penyangga standar keistimewaan pelayanan dan kesejahteraan di Jawa Barat.

Gambar 7.1. Sinergi Strategis



Sumber : RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029

Secara konseptual, "Keistimewaan" Jawa Barat hanya dapat divalidasi jika kabupaten-kabupaten di dalamnya, termasuk Cirebon, mampu mengangkat derajat hidup masyarakat miskinnya secara signifikan. **Religiusitas tanpa martabat sosial (kesejahteraan) adalah sebuah ketimpangan.** Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon adalah instrumen non-negosiasbel untuk mencapai predikat Jawa Barat yang unggul. Penyatuan visi ini menempatkan penghapusan kemiskinan ekstrem bukan lagi sebagai program marginal, melainkan sebagai prioritas strategis tertinggi yang mengikat seluruh perangkat daerah.

7.1.1.2. Pengentasan Kemiskinan Sebagai Instrumen Kemandirian dan Kemajuan

Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan transformasi paradigma dari bantuan sosial yang bersifat karitatif (jangka pendek) menuju pemberdayaan produktif yang berkelanjutan. Pergeseran ini merupakan motor penggerak bagi **kemandirian daerah** dan peningkatan daya saing ekonomi secara makro. Melalui konvergensi program yang didukung koordinasi terpadu dan pemanfaatan teknologi, masyarakat yang selama ini berada di lapisan rentan harus didorong untuk naik kelas.

Strategi ini bertujuan mengubah status kelompok rentan dari **Mustahik** (penerima manfaat) menjadi **Muzakki** atau pelaku ekonomi produktif. Secara fiskal, penurunan jumlah penduduk miskin akan secara langsung mengurangi beban belanja perlindungan sosial (belanja wajib) dan secara simultan memperluas basis pajak serta retribusi daerah (PAD). Dengan demikian, masyarakat yang mandiri akan berubah dari beban fiskal menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pergeseran paradigma ini membutuhkan jangkar empiris yang kuat agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.

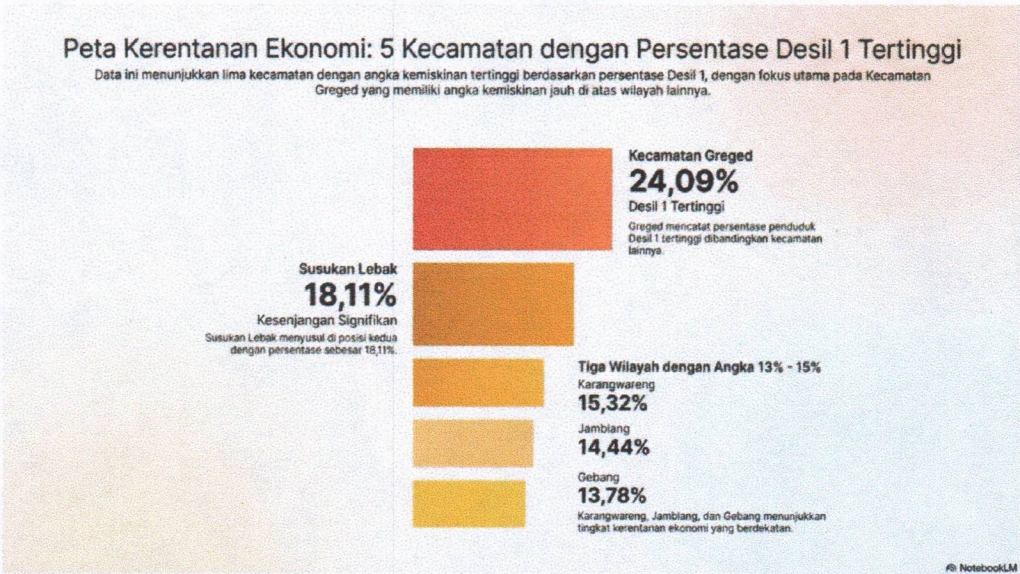
7.1.1.3. Analisis Urgensi Berbasis Data DTSEN Oktober 2025

Urgensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon dalam periode perencanaan ini didasarkan pada fakta objektif yang tergambar melalui analisis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) per 22 Oktober 2025. Berdasarkan data tersebut, penanganan kemiskinan bukan lagi sekadar pemenuhan target administratif, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk merespons kondisi riil masyarakat yang berada dalam jerat kerentanan ekonomi.

Hal utama yang mendasari urgensi ini adalah besarnya populasi yang berada dalam spektrum kesejahteraan rendah. Data DTSEN mencakup 50% penduduk dengan status kesejahteraan terendah (Desil 1 hingga Desil 5), dimana total anggota keluarga dalam kategori ini mencapai 1.362.598 jiwa. Angka ini merepresentasikan **53,81% dari total penduduk Kabupaten Cirebon**, yang berarti lebih dari separuh penduduk Kabupaten Cirebon masuk dalam kategori miskin (Desil 1) atau rentan miskin (Desil 2-5). Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih bersifat struktural dan masif, sehingga memerlukan langkah akselerasi yang luar biasa (*extra ordinary*).

Secara kewilayahan, urgensi penanganan kemiskinan ekstrem (Desil 1) sangat terlihat pada disparitas antar kecamatan. Terdapat konsentrasi penduduk sangat miskin yang jauh melampaui rata-rata kabupaten di beberapa wilayah, antara lain:

Gambar 7.2. Peta Kerentanan Ekonomi



Sumber : DTSEN Oktober 2025

Kedalaman kemiskinan ini menjadi semakin kritis jika dianalisis hingga tingkat desa yang menjadi kantong kemiskinan akut (*pockets of poverty*). Desa Nanggela di Kecamatan Greged mencatatkan 32,09% populasinya berada di Desil 1, disusul Desa Lebak Mekar (Kecamatan Greged) sebesar 28,37%, dan Desa Kudukeras (Kecamatan Babakan) sebesar 23,56%. Tingginya persentase pada level mikro ini menunjukkan adanya wilayah yang terisolasi secara ekonomi, di mana hampir sepertiga warganya terjebak dalam kemiskinan ekstrem, sehingga menuntut intervensi bantuan sosial, kesehatan, dan pangan yang cepat dan tepat sasaran.

Urgensi lain ditemukan pada analisis pola distribusi kemiskinan (Desil 1 vs Desil 5). Di wilayah seperti Kecamatan Gebang, Babakan, dan Karangsembung, jumlah penduduk di Desil 1 justru lebih besar dibandingkan Desil 5. Hal ini mencerminkan bentuk piramida kemiskinan di mana mayoritas penduduk miskin berada di lapisan paling bawah (ekstrem), yang mengindikasikan adanya **hambatan mobilitas ekonomi ke atas** yang serius. Tanpa intervensi struktural seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), penyediaan air bersih, dan sanitasi di wilayah-wilayah tersebut, kelompok ini akan sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Kondisi data DTSEN Oktober 2025 ini menjadi rujukan utama bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menyelaraskan program prioritas dengan target penurunan angka kemiskinan menuju **8,10% pada tahun 2030** sebagaimana mandat RPJPD,. Analisis ini memberikan tekanan kuat bahwa fokus pembangunan selama periode 2026-2030 harus diarahkan pada lokus-lokus dengan kerentanan tertinggi guna mewujudkan visi "Cirebon Beriman" dalam mengurangi disparitas pembangunan antara kelompok kaya dan miskin.

7.1.2. Target Tahunan (Milestones) Penurunan Kemiskinan Kabupaten Cirebon 2025-2029

Penetapan *milestones* tahunan dalam penurunan angka kemiskinan merupakan instrumen teknokratis vital untuk memastikan target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 terjaga linearitasnya. Transisi angka kemiskinan dari *baseline* 10,23% pada tahun 2025 menuju 8,10% pada tahun 2030 bukan sekadar target administratif, melainkan jembatan strategis menuju sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Evaluasi terhadap gap sebesar 2,13% dalam kurun waktu enam tahun menuntut adanya optimalisasi *fiscal space* dan pergeseran paradigma penganggaran. Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak lagi bisa mengandalkan program yang bersifat generik; diperlukan intervensi yang mampu menyentuh akar kemiskinan multidimensi. Efektivitas program perlindungan sosial harus divalidasi melalui data mikro agar setiap rupiah yang dialokasikan mampu menekan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan. Untuk mengoperasionalkan sasaran strategis tersebut, lintasan penurunan tahunan harus dijaga secara ketat melalui trajektori berikut.

Tabel 7.1. Target Tahunan Penurunan Angka Kemiskinan

Tahun	Target Persentase Kemiskinan (%)	Fokus Kebijakan Utama
2025	10,23% (<i>Baseline</i>)	Konsolidasi DTSEN & Eliminasi <i>Exclusion Error</i>
2026	9,80%	Sinergitas Jaring Pengaman Sosial Terintegrasi
2027	9,37%	Konektivitas Infrastruktur Kantong Kemiskinan
2028	8,95%	Akselerasi Produktivitas Ekonomi Teritorial
2029	8,53%	Transformasi Graduasi Sejahtera Mandiri
2030	8,10%	Pemantapan Kemandirian & Keberlanjutan RPJPN

Sumber : RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029

Logika di balik penurunan bertahap (*incremental reduction*) sebesar rata-rata 0,42% per tahun ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi mikro di tingkat desa. Penurunan yang konsisten sangat krusial untuk mencegah terjadinya stagnansi ekonomi, di mana masyarakat rentan berisiko jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan akibat guncangan eksternal. Strategi ini akan dioperasionalkan melalui logika intervensi sistematis yang menitikberatkan pada keakuratan data dan sinkronisasi lintas sektor.

7.1.2.1. Intervensi dan Fokus Kebijakan Tahunan

Pencapaian target tersebut didukung oleh pendekatan pentahapan (*phasing*) yang bertransformasi dari penguatan basis data menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Mengacu pada data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Oktober 2025, Kabupaten Cirebon memiliki basis data fundamental yang mencakup 876.668 keluarga. Fokus utama tahun pertama adalah **Targeting Accuracy Improvement** melalui verifikasi faktual terhadap klaster Desil 1 yang mencakup 11,59% anggota keluarga (285.379 jiwa).

Sebagai konsultan strategis, saya menekankan bahwa urgensi fase ini adalah eliminasi *exclusion error*—memastikan warga yang benar-benar miskin tidak terlewat dari sistem bantuan. Dengan data yang telah terpetakan hingga level individu per desa (seperti pada Kecamatan Arjawinangun dan Astanajapura), pemerintah daerah dapat mengoptimalkan alokasi anggaran dengan memastikan bantuan tepat sasaran pada kelompok paling rentan, sehingga menekan angka kemiskinan ekstrem sejak tahun pertama.

Fase 2026: Penguatan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*)

Fokus tahun 2026 adalah sinkronisasi lintas Perangkat Daerah untuk mengintegrasikan skema bantuan (PKH, BPNT, KIS) ke dalam satu intervensi yang koheren. Dengan basis data 2025 yang akurat, penguatan jaring pengaman sosial diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap guncangan inflasi. Integrasi ini bertujuan menciptakan bantalan ekonomi yang solid, mencegah rumah tangga miskin dari kerentanan lebih dalam sebelum memasuki fase pemberdayaan ekonomi.

Fase 2027-2028: Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi dan Infrastruktur Dasar

Pada fase ini, intervensi bergeser dari bantuan karitatif menuju pemberdayaan produktif dengan penekanan pada **Konektivitas Kantong Kemiskinan**. Pembangunan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, jalan lingkungan) akan difokuskan secara spasial pada desa-desa dengan konsentrasi kemiskinan tinggi berdasarkan data DTSEN.

Pemerintah akan memprioritaskan "hotspots" kemiskinan seperti **Desa Kudukeras (Babakan)** dengan populasi Desil 1 sebesar 21,53%, **Desa Melakasari (Gebang)** sebesar 18,10%, serta **Desa Gumulung Lebak (Gregar)**

yang mencapai 26,46%. Pembangunan infrastruktur di wilayah ini berkorelasi langsung terhadap penurunan biaya hidup (*cost of living*) masyarakat miskin dan membuka aksesibilitas menuju pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

Fase 2029-2030: Pemantapan Kemandirian dan Graduasi Sejahtera

Tahun-tahun terakhir dirancang sebagai masa "Graduasi", di mana keluarga miskin mampu keluar dari status penerima bantuan secara mandiri. Strategi keberlanjutan pasca-2030 diarahkan untuk memastikan target 8,10% menjadi pondasi kuat bagi pencapaian target jangka panjang nasional. Fokus utama adalah penguatan ekosistem kewirausahaan desa dan akses pasar, memastikan bahwa kesejahteraan yang dicapai bersifat permanen dan tidak lagi bergantung pada intervensi pemerintah pusat.

7.1.2.2. Kesimpulan Target dan Monitoring Evaluasi

Keberhasilan pencapaian target tahunan ini sangat bergantung pada sinergitas antar-Perangkat Daerah dan keakuratan data dinamis yang dikelola melalui DTSEN. Monitoring berkala harus dilakukan untuk memastikan setiap intervensi memberikan dampak nyata pada penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Indikator Keberhasilan Utama (*Key Performance Indicators*) yang ditetapkan adalah:

- **Akurasi Penetapan Sasaran:** Tercapainya minimal 95% tingkat ketepatan sasaran penerima manfaat program berdasarkan data Desil 1 dan Desil 2 pada sistem DTSEN.
- **Laju Graduasi Mandiri:** Meningkatnya jumlah keluarga yang keluar dari status miskin melalui jalur pemberdayaan ekonomi produktif sebesar minimal 5% setiap tahun.
- **Pemenuhan Layanan Dasar Spasial:** Terpenuhinya akses 100% terhadap air bersih dan sanitasi layak bagi 285.379 jiwa yang berada dalam klaster Desil 1, dengan prioritas pada desa-desa *high-poverty* yang telah teridentifikasi.

7.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Pendekatan Tiga Pilar)

Pendekatan Tiga Pilar merupakan arsitektur kebijakan strategis yang dirancang sebagai respons komprehensif terhadap visi "Cirebon BERIMAN" (Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, dan Aman). Strategi ini menjadi instrumen teknokratik vital untuk mengentaskan kemiskinan yang mencakup 245,9 ribu jiwa penduduk sebagai target basis penerima manfaat di Kabupaten Cirebon. Formulasi ini tidak lagi memandang kemiskinan secara sektoral-parsial, melainkan melalui intervensi simultan yang menysasar akar permasalahan dari dimensi pengeluaran, pendapatan, dan kewilayahan secara terintegrasi.

Sinergitas antara ketiga pilar ini diproyeksikan menciptakan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang kuat guna mempercepat pencapaian target-target makro dalam RPJMD 2025-2029. Dengan mengedepankan konvergensi

program, setiap alokasi fiskal diarahkan untuk tidak hanya menjadi bantuan sosial konsumtif, tetapi menjadi fondasi bagi akselerasi kesejahteraan yang berkelanjutan. Upaya ini merupakan pengejawantahan dari Misi 1 Kabupaten Cirebon, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani, dimana efektivitas belanja daerah dioptimalkan untuk perlindungan masyarakat paling rentan. Menangani penyebab proksimal kemiskinan melalui pilar pertama menjadi syarat mutlak sebelum melangkah pada penguatan kapasitas ekonomi yang lebih kompleks.

7.2.1. Pilar 1: Penurunan Beban Pengeluaran melalui Perlindungan Sosial Komprehensif

Pilar pertama difokuskan pada penciptaan bantalan ekonomi (*economic cushion*) bagi penduduk Desil 1 untuk memitigasi risiko kerentanan akibat guncangan eksternal. Fokus utama pilar ini adalah menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga agar tidak terjatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan absolut. Data makro menunjukkan urgensi yang mendesak: prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon mengalami tren peningkatan yang mengkhawatirkan dari 18,6% pada 2022 menjadi 22,9% pada 2023. Fenomena ini beriringan dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) sebesar 5,65%, yang menempatkan Kabupaten Cirebon dalam klasifikasi "Sedang" (Medium). Meskipun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) makro mencapai angka 82,77 (Sangat Tahan), kesenjangan nutrisi di tingkat mikro rumah tangga tetap menjadi tantangan nyata.

Transformasi strategi pilar ini dilakukan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan pemberian bantuan perlengkapan sekolah untuk menghapus hambatan biaya personal pendidikan yang selama ini membebani struktur pengeluaran keluarga miskin. Selain itu, program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dioptimalkan sebagai strategi ketahanan pangan mandiri untuk mengompensasi fluktuasi harga pasar. Melalui perlindungan sosial yang komprehensif ini, beban pengeluaran masyarakat diringankan secara sistemik, menciptakan stabilitas yang diperlukan bagi penerima manfaat untuk dapat terlibat dalam intervensi pengembangan kapasitas pada tahap berikutnya.

- **Pemenuhan SPM Kesehatan:** Mengakselerasi layanan dasar guna memutus tren kenaikan stunting dan gizi buruk secara sistemik.
- **Mitigasi Biaya Pendidikan:** Pemberian bantuan perlengkapan sekolah untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS).
- **Pekarangan Pangan Lestari (P2L):** Penguatan mikro-stabilitas pangan rumah tangga untuk menutup celah gap PoU 5,65%.
- **Stabilisasi Harga Pangan:** Intervensi pasar guna melindungi daya beli penduduk miskin terhadap komoditas strategis.

Mengatasi penyebab proksimal kemiskinan melalui relaksasi beban pengeluaran ini memberikan stabilitas yang diperlukan bagi penerima manfaat untuk terlibat dalam intervensi distal yang bersifat pengembangan kapasitas di bawah Pilar kedua.

7.2.2. Pilar 2: Peningkatan Pendapatan dan Transformasi Agen Ekonomi Produktif

Kemandirian ekonomi jangka panjang menuntut pergeseran paradigma dari masyarakat sebagai "penerima bantuan" menjadi "agen ekonomi produktif." Pilar kedua ini menyorot peningkatan produktivitas pada sektor-sektor unggulan lokal dengan pendekatan *link and match* terhadap ekosistem industri yang sedang berkembang di Jawa Barat. Analisis kewilayahan menunjukkan tantangan spesifik pada kelompok petani gurem di Kecamatan Gegesik serta masyarakat nelayan di koridor Astanajapura dan Gebang yang masih terkendala kapasitas teknologi tangkap dan fluktuasi hasil perikanan.

Strategi intervensi diarahkan pada implementasi *Integrated Farming* dan hilirisasi produk perikanan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Secara lebih strategis, Kabupaten Cirebon harus memanfaatkan posisinya dalam Kawasan Industri Rebana sebagai lokomotif pertumbuhan baru. Pelatihan vokasi *demand-driven* difokuskan secara spesifik pada sektor industri pengolahan makanan dan minuman, furnitur, serta pengolahan garam konsumsi sesuai dengan potensi yang teridentifikasi dalam dokumen perencanaan. Transformasi ini memastikan angkatan kerja muda dari keluarga miskin terserap secara optimal dalam sektor formal, yang pada akhirnya meningkatkan *Gini Ratio* dan pendapatan per kapita daerah. Sinergi ekonomi ini kemudian perlu didukung oleh lingkungan spasial yang inklusif untuk menjamin produktivitas yang telah terbangun tidak terdisrupsi oleh faktor eksternal lingkungan.

7.2.3. Pilar 3: Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan melalui Infrastruktur Inklusif

Produktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kualitas lingkungan permukiman. Pilar ketiga ini secara spesifik merespons Misi 5 RPJMD, yaitu menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman, dengan memitigasi kerentanan spasial di kantong-kantong kemiskinan. Analisis hidrologi menunjukkan bahwa meskipun DAS Ciwaringin merupakan sistem aliran terbesar (32.739 Ha), risiko bencana banjir luapan paling krusial terkonsentrasi di wilayah Cirebon Timur (Kecamatan Ciledug, Waled, dan Pasaleman) yang dipengaruhi oleh DAS Cisanggarung. Risiko bencana ini berinteraksi negatif dengan kondisi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang memiliki sanitasi buruk, memperparah rendahnya Indeks Keluarga Sehat (IKS) di wilayah tersebut.

Solusi teknis yang diterapkan meliputi:

- **Rehabilitasi Rutilahu "Aladin":** Perbaikan Atap, Lantai, dan Dinding yang terintegrasi dengan akses air minum dan sanitasi layak untuk memutus siklus penyakit lingkungan yang menguras sumber daya ekonomi keluarga miskin.
- **Teknologi Mitigasi Banjir:** Implementasi *Flood Forecasting and Warning System* (FFWS) sebagai komponen "Inovatif" dalam visi Cirebon BERIMAN,

guna memberikan perlindungan aset bagi warga di wilayah rawan bencana.

- **Infrastruktur Konektivitas:** Pembangunan jalan lingkungan dan drainase terpadu untuk membuka aksesibilitas wilayah terisolasi ke pusat-pusat layanan publik dan ekonomi.

Integrasi menyeluruh dari ketiga pilar ini merupakan syarat mutlak dalam pencapaian target keberlanjutan pembangunan yang telah ditetapkan untuk periode 2025-2029.

Tabel 7.2. Sinkronisasi Masalah dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pilar Strategis	Analisis Masalah Utama	Intervensi Strategi	Target Dampak Sosial-Ekonomi
I. Penurunan Beban Pengeluaran	Tren stunting naik (22,9%), PoU 5,65% (Kategori Sedang), dan beban personal pendidikan keluarga miskin.	Akselerasi SPM Kesehatan, bantuan perlengkapan sekolah, dan optimasi P2L tingkat rumah tangga.	Peningkatan kualitas modal manusia dan terciptanya <i>economic cushion</i> bagi Desil 1.
II. Peningkatan Pendapatan	Petani gurem (Gegesik) dan nelayan GT rendah (Gebang); rendahnya keterserapan kerja di sektor formal.	<i>Integrated farming</i> , hilirisasi perikanan, dan vokasi pada sektor furnitur & pangan di Kawasan Rebana.	Transformasi penerima bantuan menjadi agen ekonomi produktif yang mandiri.
III. Infrastruktur Inklusif	Kerentanan DAS Cisanggarung (Cirebon Timur) dan kondisi Rutilahu yang menurunkan Indeks Keluarga Sehat (IKS).	Rehabilitasi Rutilahu Aladin, pembangunan FFWS (Inovatif), dan sanitasi lingkungan terpadu.	Reduksi kantong kemiskinan dan pemutusan rantai penyakit lingkungan secara spasial.

Sumber : DTSEN Oktober 2025, data diolah.

Keberhasilan Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pendekatan Tiga Pilar ini bergantung sepenuhnya pada orkestrasi lintas Perangkat Daerah dan akurasi data sasaran. Sejalan dengan mandat manajemen risiko dalam RPJMD, setiap tahapan intervensi akan dipantau untuk memastikan program tidak hanya berjalan secara *output*, tetapi memberikan *outcome* nyata bagi 245,9 ribu jiwa penduduk sasaran. Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk menjalankan strategi ini dengan prinsip transparansi dan efisiensi fiskal guna mewujudkan masyarakat yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing sesuai dengan cita-cita Cirebon BERIMAN.

7.3. Inovasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cirebon

Dalam arsitektur Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Cirebon periode 2025-2029, inovasi diposisikan sebagai *acceleration engine* untuk melampaui capaian rutin dan merespons mandat Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2025 tentang RPJMD. Berdasarkan data makro, Kabupaten Cirebon masih menghadapi tantangan signifikan dengan jumlah penduduk miskin mencapai 245,9 ribu jiwa atau 11,20% (Tabel 2.21). Guna mengintervensi realitas ini secara efektif, Pemerintah Kabupaten mengadopsi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai instrumen navigasi utama.

Transisi dari penggunaan data agregat ke data mikro (DTSEN) merupakan pergeseran teknokratik yang krusial untuk memastikan presisi target. Melalui basis data *by name by address*, intervensi dapat diarahkan khusus kepada penduduk Desil 1, baik Penerima Bantuan Tunai (PBN) maupun data terpadu lainnya, sehingga mampu meminimalisasi *exclusion error* dan *inclusion error* dalam penyaluran jaminan sosial. Kesiapan data mikro ini memungkinkan pemerintah daerah untuk bergerak melampaui bantuan pasif, memulai langkah proaktif dalam sektor kesehatan yang terintegrasi.

7.3.1. Transformasi Layanan Kesehatan Aktif: Inovasi 'Jemput Bola'

Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan pergeseran paradigma melalui strategi "Jemput Bola", sebagai respons terhadap rendahnya Indeks Keluarga Sehat (IKS) dan meningkatnya beban kesehatan masyarakat rentan. Inovasi ini secara spesifik menargetkan skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) dan intervensi gizi pada kelompok Desil 1. Hal ini menjadi urgensi mengingat data menunjukkan lonjakan angka stunting yang signifikan dari 18,6% pada 2022 menjadi 22,9% pada 2023, serta Prevalence of Undernourishment (PoU) yang masih berada pada angka 5,65% (kategori "Sedang").

Analisis kausal menunjukkan bahwa deteksi dini melalui layanan bergerak adalah kunci untuk memutus *poverty trap*. Penduduk miskin sangat rentan terhadap *catastrophic health expenditure* (beban biaya kesehatan mendadak) yang dapat menguras aset produktif keluarga. Dengan menargetkan intervensi pada kasus anemia ibu hamil (4,37%) dan anemia remaja (41,89%), inovasi ini bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi akibat kegagalan pertumbuhan dan kesehatan. Setelah stabilitas fisik terjamin, intervensi dialihkan pada penguatan kapasitas ekonomi melalui pendidikan vokasi yang terukur.

7.3.2. Vokasi 'Link and Match' Berbasis Klaster Wilayah dan Kawasan Rebana

Strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan pendekatan spasial yang mengacu pada Perda No. 6 Tahun 2024 tentang RTRW, di mana Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Inovasi vokasi ini dirancang untuk menjawab tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terekam dalam Tabel 2.24. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui skema *link and match* yang disesuaikan dengan potensi wilayah: pengolahan hasil laut di klaster Astanajapura dan Gebang, serta mekanisasi pertanian modern di wilayah Gegesik.

Integrasi kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri di Kawasan Rebana menciptakan ekosistem penyerap tenaga kerja yang berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa angkatan kerja dari keluarga miskin tidak sekadar menerima sertifikat, tetapi terserap ke dalam rantai pasok industri manufaktur dan jasa di wilayah pertumbuhan baru tersebut. Keberhasilan penyerapan tenaga kerja ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli rumah tangga, yang

selanjutnya akan berkontribusi pada kemampuan mereka dalam memelihara standar kualitas lingkungan hunian yang sehat.

7.3.4. Rehabilitasi Rutilahu Terintegrasi: Terobosan 'Aladin Plus'

Kabupaten Cirebon memperkenalkan "Aladin Plus" sebagai evolusi dari program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) konvensional. Terobosan ini mensyaratkan bahwa perbaikan komponen Atap, Lantai, dan Dinding (Aladin) wajib terintegrasi dengan penyediaan akses air minum layak dan jamban sehat. Lokasi prioritas ditetapkan pada desa-desa dengan kerentanan pangan dan sanitasi tinggi, seperti Desa Nanggela dan Desa Kudukeras.

Integrasi sanitasi ke dalam perbaikan fisik hunian sangat krusial dalam memutus rantai kemiskinan multidimensi. Lingkungan hunian yang buruk berkorelasi langsung dengan tingginya prevalensi penyakit infeksi yang memperburuk status gizi (*stunting*). Dengan memperbaiki standar sanitasi secara inklusif, pemerintah daerah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa prioritas secara permanen. Pendekatan inklusif ini juga diperluas untuk menjangkau kelompok-kelompok yang sering kali terabaikan dalam birokrasi standar.

7.3.5. Kemitraan Strategis Penanganan Kelompok Marginal Terstigma

Inovasi penanggulangan kemiskinan juga menyasar kelompok marginal "tak terlihat" melalui model *Collaborative Governance*. Pemerintah daerah menjalin kemitraan strategis dengan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menjangkau eks-WPS, ODHIV, dan perempuan korban kekerasan. Kelompok-kelompok ini sering kali berada di luar jangkauan layanan birokrasi murni akibat stigma sosial dan ketakutan akan diskriminasi.

Model kemitraan ini terbukti lebih efektif karena NGO memiliki kelenturan operasional dan pendekatan emosional yang lebih dalam. Melalui kolaborasi ini, kelompok marginal mendapatkan akses perlindungan sosial, rehabilitasi psikososial, dan pelatihan ekonomi inklusif. Pendekatan ini memastikan bahwa tidak ada satu pun warga (*leave no one behind*) yang tertinggal dalam proses pembangunan. Semangat inklusivitas sosial ini kemudian disinergikan dengan inovasi pengelolaan lingkungan yang memberikan dampak ekonomi sirkular bagi masyarakat sekitar.

7.3.6. Modernisasi Pengelolaan Sampah: Ekonomi Sirkular via Teknologi RDF

Dalam upaya memperbaiki Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) — khususnya Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang saat ini berada pada angka sangat rendah (28,09) — Kabupaten Cirebon mengimplementasikan teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) di TPA Kubangdeleg. Inovasi ini mengubah beban limbah menjadi sumber energi alternatif yang diserap oleh sektor industri sebagai *off-taker* tetap.

Implementasi RDF menghasilkan *double-impact* yang signifikan secara teknokratik. Pertama, menekan degradasi lahan dengan mengurangi volume sampah secara masif di TPA. Kedua, menciptakan rantai pasok ekonomi sirkular yang melibatkan masyarakat lokal dalam proses pemilahan dan pengolahan awal. Peluang kerja hijau (*green jobs*) yang tercipta memberikan bantalan ekonomi baru bagi penduduk rentan di sekitar lokasi pengelolaan sampah. Seluruh rangkaian inovasi strategis ini dirangkum dalam matriks percepatan berikut.

Tabel 7.3. Inovasi Program Percepatan RPKD

Nama Inovasi	Target Sasaran (DTSEN/Lokus)	Nilai Terobosan (Acceleration Factor)	Output Strategis (IKU/IKD)
Navigasi DTSEN	245,9 Ribu Penduduk Miskin (PBN/PBD)	Presisi intervensi mikro <i>by name by address</i> untuk efisiensi fiskal.	Reduksi <i>Inclusion & Exclusion Error</i> hingga <5%.
Kesehatan Aktif (Jemput Bola)	Balita Stunting & Ibu Hamil Desil 1	Skrining proaktif untuk memutus rantai beban kesehatan mendadak.	Penurunan angka PoU (<2,5%) dan prevalensi stunting.
Vokasi Link & Match Rebana	Angkatan Kerja Miskin di PKN (Gegesik, Gebang)	Sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan industri Kawasan Rebana.	Penurunan TPT dan peningkatan serapan tenaga kerja lokal.
Aladin Plus	Rutilahu di Desa Nanggela & Kudukeras	Integrasi wajib infrastruktur sanitasi dan air bersih pada fisik rumah.	Peningkatan IKS dan penurunan kemiskinan multidimensi.
Kemitraan Marginal	Kelompok Terstigma (ODHIV, Eks-WPS)	Model <i>Collaborative Governance</i> pemerintah-NGO yang inklusif.	Terjaminnya jaminan sosial bagi 100% kelompok marginal.
Teknologi RDF Sirkular	TPA Kubang Deleg & Masyarakat Sekitar	Transformasi limbah menjadi nilai ekonomi dan bahan bakar industri.	Peningkatan IKL (>30.00) dan penciptaan lapangan kerja hijau.

Sumber : RPJMD Kabupaten Cirebon, data diolah.

Rangkaian inovasi yang tertuang dalam RPKD ini bukan merupakan agenda *ad-hoc*, melainkan manifestasi nyata dari Misi ke-2 dan ke-5 Kabupaten Cirebon yang "Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, dan Aman" (BERIMAN). Keberlanjutan inovasi ini merupakan wujud dari penerapan prinsip *Dynamic Governance*—yakni *thinking ahead* dalam merancang masa depan, *thinking again* dalam mengevaluasi efektivitas intervensi, dan *thinking across* melalui kolaborasi lintas sektor.

Keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada konsistensi penggunaan data mikro DTSEN sebagai *single source of truth* dan efektivitas monitoring serta evaluasi di masa transisi kepemimpinan daerah. Dengan integrasi kebijakan yang presisi, Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk mewujudkan transformasi sosial-ekonomi yang inklusif, memastikan setiap rupiah investasi pembangunan memberikan dampak nyata pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

7.4 Program Aksi Prioritas Perangkat Daerah dalam RPKD Kabupaten Cirebon

Sub-bab ini merupakan instrumen operasional paling kritikal dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Cirebon 2026-2030. Bagian ini merumuskan "Arsitektur Konvergensi Intervensi," sebuah paradigma baru yang menggeser pendekatan pembangunan dari pola sektoral yang terfragmentasi (*silo-based*) menuju kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi secara teknis. Inti dari strategi ini adalah "penanggalan ego sektoral," di mana setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyatukan sumber daya anggaran dan personel pada lokus (wilayah) serta sasaran (keluarga miskin) yang sama secara simultan.

Secara teknis, arsitektur konvergensi ini diimplementasikan dengan menyelaraskan intervensi berdasarkan data tunggal yang akurat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi belanja daerah (APBD) dengan menghilangkan tumpang tindih program dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan orkestrasi yang tepat, konvergensi ini menjadi jalur rasional utama untuk mengakselerasi pencapaian target penurunan angka kemiskinan Kabupaten Cirebon menuju angka moderat 8,10% pada tahun 2030. Keberhasilan efektivitas ini dimulai dari penguatan pondasi paling dasar, yaitu perlindungan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

7.4.1 Program Prioritas Pilar 1: Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat

Pilar pertama difokuskan pada penguatan jaring pengaman sosial (*social safety net*) untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga miskin, khususnya pada klaster Desil 1, agar tidak terperosok lebih dalam ke jurang kemiskinan ekstrem akibat tekanan inflasi atau biaya layanan dasar.

Berdasarkan nomenklatur **SIPD Kepmendagri**, rincian operasional pilar pertama adalah sebagai berikut:

- **Dinas Kesehatan:** Melaksanakan *Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat*. Fokus intervensi diarahkan pada jaminan 100% cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD bagi Desil 1, penguatan skrining Penyakit Tidak Menular (PTM), dan pemberian tambahan gizi spesifik di desa-desa lokus stunting tinggi untuk memutus transmisi kemiskinan antar-generasi.
- **Dinas Pendidikan:** Melaksanakan *Program Pengelolaan Pendidikan*. Operasionalisasi difokuskan pada sub-kegiatan pemberian biaya personal (seragam, alat tulis, dan transportasi) serta optimalisasi Dana BOS Afirmatif bagi siswa dari keluarga Desil 1 guna memastikan tidak ada anak usia sekolah yang putus sekolah akibat kendala biaya non-SPP.
- **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:** Melaksanakan *Program Pendaftaran Penduduk*. Implementasi dilakukan melalui inovasi "Layanan Jemput Bola" di desa-desa kantong kemiskinan dengan konsentrasi Desil 1-5 yang tinggi, seperti Desa Munjul (60,40% keluarga prioritas) dan Desa

Gebang Udik (62,25% keluarga prioritas). Tujuannya adalah menjamin hak administratif sebagai prasyarat akses bantuan sosial.

- **Dinas Sosial:** Melaksanakan *Program Perlindungan dan Jaminan Sosial*. Fokus utama adalah pemutakhiran berkala Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai *Gold Standard* basis data daerah. Hal ini krusial untuk memastikan *exclusion* dan *inclusion error* berada di level minimum.

Kepastian identitas penduduk (Disdukcapil) dan pemutakhiran data (Dinsos) adalah prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*). Tanpa akurasi data, intervensi kesehatan dan pendidikan tidak akan mencapai presisi sasaran yang dibutuhkan untuk menurunkan beban hidup masyarakat secara signifikan. Setelah beban pengeluaran diredam, strategi berikutnya adalah mengungkit daya beli melalui kapasitas ekonomi produktif.

7.4.2 Program Prioritas Pilar 2: Peningkatan Pendapatan dan Kemampuan Ekonomi

Strategi pilar kedua adalah transformasi dari bantuan sosial pasif menjadi pemberdayaan ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas SDM di wilayah-wilayah dengan kepadatan keluarga miskin yang signifikan.

Rincian program sesuai nomenklatur **SIPD Kepmendagri** :

- **Dinas Pertanian:** Melaksanakan *Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian*. Lokus utama diarahkan pada Kecamatan Gegesik yang memiliki 14.689 keluarga Desil 1-5. Intervensi berupa bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) serta subsidi asuransi usaha tani untuk melindungi petani gurem dari risiko gagal panen.
- **Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan:** Melaksanakan *Program Pengelolaan Perikanan Tangkap*. Intervensi diprioritaskan pada wilayah pesisir dengan kerentanan ekonomi tinggi, seperti Kecamatan Gebang (14.991 keluarga Desil 1-5) dan Kecamatan Astanajapura (15.547 keluarga Desil 1-5). Fokus pada distribusi alat tangkap ramah lingkungan dan aktivasi Kartu KUSUKA untuk akses subsidi BBM nelayan.
- **Dinas Koperasi dan UKM:** Melaksanakan *Program Pemberdayaan Usaha Mikro*. Fokus pada formalisasi usaha keluarga miskin melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara massal dan fasilitasi akses kredit mikro bunga rendah.
- **Dinas Ketenagakerjaan:** Melaksanakan *Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas*. Menggunakan model vokasi "*Demand Driven*" yang dikoneksikan langsung dengan kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Cirebon dalam lingkup proyek strategis Rebana, guna menyerap tenaga kerja lokal dari Desil 1-2. Implementasi program ini diperkuat melalui mekanisme kerja sama konkret antara Dinas Ketenagakerjaan dengan pengelola Kawasan Industri Rebana. Kerja sama ini mencakup penyesuaian kurikulum pelatihan yang berbasis pada kebutuhan riil industri serta penyediaan jalur penempatan kerja prioritas (*priority placement*) bagi 1.000 tenaga kerja asal keluarga Desil 1 dan 2 pada tahun 2026. Melalui sinkronisasi kurikulum dan kepastian serapan

oleh industri sebagai off-taker tenaga kerja, program ini bertransformasi dari sekadar pelatihan rutin menjadi instrumen graduasi ekonomi yang menjamin keberlanjutan pendapatan bagi keluarga miskin."

Sinkronisasi antara pelatihan vokasi (Disnaker) yang terserap industri dan legalitas usaha (Diskop UKM) yang memudahkan akses permodalan akan menciptakan ekosistem ekonomi rumah tangga yang tangguh. Keberhasilan ekonomi ini harus didukung oleh kualitas infrastruktur yang memadai untuk menjamin kelancaran distribusi dan kesehatan lingkungan.

7.4.3 Program Prioritas Pilar 3: Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

Pilar ketiga berfokus pada intervensi fisik kewilayahan guna memperbaiki kualitas hidup dan menghilangkan hambatan logistik di wilayah tertinggal yang seringkali terhambat oleh risiko bencana dan infrastruktur buruk.

Rincian program sesuai nomenklatur **SIPD Kepmendagri** :

- **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR):**

1. *Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA):* Pembangunan tanggul permanen dan aktivasi *Flood Forecasting and Warning System (FFWS)* di wilayah rawan banjir seperti Ciledug Wetan (61,52% keluarga prioritas), Waled, dan Pasaleman untuk meminimalisir kerugian aset warga miskin.
2. *Program Penyelenggaraan Jalan:* Peningkatan kualitas jalan pada ruas-ruas penghubung desa ke pusat pasar guna menurunkan biaya logistik bagi petani dan pedagang kecil.

- **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PKPP):**

1. *Program Pengembangan Perumahan:* Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan standar "Aladin" (Atap, Lantai, Dinding) untuk meningkatkan kualitas hidup sehat.
2. *Program Penyehatan Lingkungan:* Pembangunan jamban sehat keluarga dan sistem sanitasi komunal di wilayah padat penduduk untuk menurunkan prevalensi penyakit lingkungan yang berdampak pada produktivitas ekonomi.

Pengurangan risiko bencana banjir di Ciledug Wetan dan perbaikan jalan strategis secara langsung akan mengamankan aset masyarakat miskin dan meningkatkan nilai ekonomi wilayah. Intervensi fisik ini melengkapi pilar sosial dan ekonomi dalam satu kesatuan aksi yang komprehensif.

BAB VIII
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2029

8.1. Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Oleh Perangkat Daerah

Upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi kemiskinan dilakukan dengan berbagai kebijakan dan program untuk pengentasan kemiskinan, namun belum berhasil karena masih banyak daerah yang tergolong miskin. Oleh sebab itu kemiskinan harus segera ditangani secara komprehensif agar masyarakat dapat terlepas dari kemiskinan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 menyebutkan bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah pembangunan yang sangat krusial untuk dipecahkan. Salah satu isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 adalah percepatan penanggulangan kemiskinan. Dalam prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 pada prioritas keempat disebutkan Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan daya saing tenaga kerja. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah kemiskinan dan pengangguran seiring dengan peningkatan angka kemiskinan menunjukkan masih perlunya peningkatan pembangunan di setiap sektor.

Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan daerah (RPKD) di Kabupaten Cirebon didasarkan atas pendekatan berbasis hak. Pendekatan berbasis hak dalam penanggulangan kemiskinan mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif. Dokumen ini memberikan acuan cara-cara dan tahapan sistematis yang harus ditempuh dan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, swasta, masyarakat, dan berbagai pihak dalam upaya mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon yang dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah rencana program kegiatan prioritas yang akan digunakan untuk rencana aksi penanggulangan kemiskinan daerah. Sedangkan untuk rencana anggaran yang dialokasikan untuk rencana aksi penanggulangan kemiskinan daerah juga tidak terlepas dari pertimbangan prioritas dan kemampuan pendanaan atas rencana pembangunan daerah yang telah disusun dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2025 - 2030. Program dan kegiatan prioritas serta Rencana Aksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8.1.
Matrik Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cirebon Lingkup Perangkat Daerah

No	Urusan Pemerintah /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Kesehatan	Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan pelayanan SPM Kesehatan dengan menyediakan barang dan jasa untuk pelayanan kesehatan ibu Hamil.	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	DINKES
2	Kesehatan	Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (PF)	Pemenuhan pelayanan SPM Kesehatan dengan menyediakan barang dan jasa untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin.	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	DINKES
3	Kesehatan	Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (KN Lengkap)	Pemenuhan pelayanan SPM Kesehatan dengan menyediakan barang dan jasa untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	DINKES
4	Kesehatan	Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Bayi Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan pelayanan SPM Kesehatan dengan menyediakan barang dan jasa untuk pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	DINKES

No	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	Kesehatan	Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pemenuhan pelayanan SPM Kesehatan dengan menyediakan barang dan jasa untuk pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	DINKES
6	Kesehatan	Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (FR PTM) pada usia produktif	Jumlah skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (FR PTM) pada usia produktif.	DINKES
7	Kesehatan	Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan pelayanan SPM Kesehatan dengan menyediakan barang dan jasa untuk pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	DINKES
8	Kesehatan	Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi mencakup deteksi dini, edukasi, pengobatan, dan pemantauan.	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	DINKES

No	Urusan Pemerintah /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9	Kesehatan	Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus mencakup deteksi dini, edukasi, pengobatan, dan pemantauan.	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	DINKES
10	Kesehatan	Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia, yang meliputi: pemeriksaan kesehatan jiwa; edukasi; dan tata laksana.	Jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	DINKES

No	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
11	Kesehatan	Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Insidens TB per 100.000 penduduk	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang terduga TBC sesuai standar, yang meliputi: pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda,, pemeriksaan penunjang; dan edukasi	Jumlah orang terduga TBC yang dilayani sesuai standar	DINKES
12	Kesehatan	Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	Jumlah orang terduga HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar	DINKES
13	Kesehatan	Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah pelaksanaan kegiatan penanganan masyarakat terdampak bencana melalui penyelenggaraan Pos Kesehatan	DINKES

No	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14	Kesehatan	Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemenuhan pelayanan kesehatan gizi pada remaja putri, ibu hamil, bayi dan balita dengan sistem surveilans dari deteksi dini, penemuan kasus hingga intervensi permasalahan gizi	Jumlah balita yang dilakukan pemantauan status gizi	DINKES
15	Kesehatan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Peningkatan fungsi UKBM (posyandu, Posbindu)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terkelolanya pelayanan kesehatan lingkungan melalui kegiatan Pertemuan perencanaan dan evaluasi kesling, monitoring kegiatan STBM dan Inspeksi Kesehatan lingkungan (IKL) rumah	Jumlah data KK miskin yang memiliki akses jamban, air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah cair rumah tangga, data pengukuran kualitas lingkungan	DINKES

No	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
16	Kesehatan	Pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Terselenggaranya deteksi dini penyalahgunaan NAPZA pada penduduk usia 10 tahun ke atas dan ketika ada yang berisiko akan dilakukan konseling di FKTP.	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	DINKES
17	Kesehatan	Pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksanannya pelayanan kesehatan penyakit menular, dengan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Jumlah dokumen pencegahan dan pengendalian penyakit menular	DINKES
18	Kesehatan	Pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Universal Health Coverage (UHC)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembayaran iuran dan bantuan iuran (premi) jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin Desil 1-5	Jumlah peserta JKN Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (BPPU dan BP Pemda) yang dibayarkan iuran dan bantuan iurannya.	DINKES

No	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
19	Kesehatan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Peningkatan fungsi UKBM (posyandu, Posbindu)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga berPHBS	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Pendataan Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah data Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	DINKES
20	Infrastruktur Sumber Daya Air	Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kondisi Infrastruktur Sumber Daya Air yang Baik	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang dibangun	DPUTR
21	Infrastruktur Sumber Daya Air	Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kondisi Infrastruktur Sumber Daya Air yang Baik	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Rehabilitasi pada tanggul sungai dan saluran Pembuang	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	DPUTR
22	Infrastruktur Sumber Daya Air	Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kondisi Infrastruktur Sumber Daya Air yang Baik	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Pemeliharaan pada Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	DPUTR

No	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
23	Infrastruktur Sumber Daya Air	Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang dibangun	DPUTR
24	KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan akses terhadap rumah layak huni	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DPKPP
25	KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan akses terhadap rumah layak huni	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luasan Permukiman Kumuh yang Dipugar Diremajakan/ Dipugar	DPKPP

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
26	KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan akses terhadap rumah layak huni	ROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase meningkatnya jumlah unit Rumah Layak Huni yang layak dan sehat	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	DPKPP
27	KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan akses terhadap rumah layak huni	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kawasan Permukiman Kumuh	DPKPP
28	Sosial	Melakukan updating data dan verifikasi secara kontinu dan pelaporan rutin per semester	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTSEN Bagi Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem yang tervalidasi	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata pada DTSEN	Verifikasi, Validasi, dan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional	Jumlah DTSEN terverifikasi, validasi, dan pemutakhiran	DINSOS

No	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
29	Sosial	Memberikan bantuan tunai dan sosial kepada kelompok sasaran secara berkesinambungan hingga graduasi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem menerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebagai Perempuan penanggung jawab keluarga (Perjaka) melalui Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan	Jumlah orang yang mendapatkan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Fakir Miskin dan Perjaka	DINSOS
30	Ketenagakerjaan	Penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Pencari Kerja yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DINAS KETENAGAK ERJAAN
31	Ketenagakerjaan	Penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme pelayanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang menerima program TKM dari Kementerian Ketenagakerjaan RI	DINAS KETENAGAK ERJAAN

No	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
32	Ketenagakerjaan	Penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme pelayanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah CPMI yang ditempatkan	DINAS KETENAGAKERJAAN
33	Anak dan Perempuan	Pemenuhan hak dan perlindungan anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Elemen Data Gender Dan Anak Yang Valid Dan Disajikan	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersediannya Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten	DPPKBP3A
34	Ketahanan Pangan	Peningkatan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Konsumsi Pangan B2SA	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sosialisasi Pangan B2SA untuk Desa di Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang mendapatkan sosialisasi Pangan B2SA	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
35	Ketahanan Pangan	Peningkatan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase daerah rentan rawan pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Pengendalian Inflasi dan Program Kolaborasi Peningkatan KetahananPangan Masyarakat	Jumlah kegiatan Pengendalian Inflasi dan Program Kolaborasi Peningkatan KetahananPangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
39	Kependudukan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase elemen Data Profil Kependudukan yang disajikan secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Disdukcapil
40	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial dalam pembangunan desa (desa inklusif)	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Jumlah Desa yang di Fasilitas tentang Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	DPMD
41	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial dalam pembangunan desa (desa inklusif)	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	DPMD
42	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial dalam pembangunan desa (desa inklusif)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rata-rata Desa yang sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes a yang tepat waktu	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
43	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial dalam pembangunan desa (desa inklusif)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rata-rata Desa yang sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes a yang tepat waktu	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desanya	DPMD
44	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial dalam pembangunan desa (desa inklusif)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakata nnya dibina	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DPMD
45	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial dalam pembangunan desa (desa inklusif)	ROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakata nnya dibina	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan akan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa yang terfasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMD

No	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
46	Perikanan	Peningkatan cakupan binaan kelompok kelautan dan perikanan dalam rangka diversifikasi produk perikanan menuju agroindustri perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pengendalian Inflasi, Program Kolaborasi Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Kolaborasi Peningkatan Daya Saing UMK, Program Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Pengendalian Inflasi, Program Kolaborasi Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Kolaborasi Peningkatan Daya Saing UMK, Program Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
47	Perikanan	Peningkatan cakupan binaan kelompok kelautan dan perikanan dalam rangka diversifikasi produk perikanan menuju agroindustri perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya	Pembinaan KUB	Jumlah KUB yang dibina	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
48	Perikanan	Peningkatan cakupan binaan kelompok kelautan dan perikanan dalam rangka diversifikasi produk perikanan menuju agroindustri perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang Terfasilitasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
49	Pertanian	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi mangga	Pendampingan Pengunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Pengunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Pengunaan Sarana Pendukung Pertanian bagi petani lokal	Jumlah Petani lokal yang mendapatkan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Pertanian
50	Pertanian	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas tanam padi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Dinas Pertanian
51	Pertanian	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani Kelas Madya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dinas Pertanian
52	Sosial	Mengintervensi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrim menerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinsos
53	Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Dinsos

No	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Peringkat Daerah Penanggung Jawab
54	Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Dinsos
55	Sosial	Pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Dinsos
56	Sosial	Pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	Dinsos
57	Sosial	Pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinsos

No	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
58	Sosial	Pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Dinsos
59	Sosial	Pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinsos
60	Sosial	Pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Dinsos
61	Sosial	Pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Dinsos

No	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
62	Sosial	Pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dinsos
63	Sosial	Pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Dinsos
64	Pendidikan	Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Disdik
65	Pendidikan	Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Disdik
66	Pendidikan	Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Disdik
67	Pendidikan	Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Disdik

No	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
68	Pendidikan	Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Disdik
69	Pendidikan	Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Disdik
70	Pendidikan	Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Disdik
71	Pendidikan	Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Disdik
72	Pendidikan	Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Disdik
73	Pendidikan	Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Disdik
74	Pendidikan	Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Disdik

No	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
75	Pendidikan	Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang TK / PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Disdik
76	Pendidikan	Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang TK / PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Disdik

BAB IX

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemerintah Kabupaten Cirebon secara umum telah berhasil untuk mengurangi jumlah penduduk miskin walaupun penurunannya belum signifikan. Hal ini ditunjukkan dari pencapaian penurunan jumlah penduduk miskin dengan rata-rata penurunan tiap tahun sebesar 0.2 persen.
2. Pelaksanaan kebijakan dan program belum bekerja secara terpadu dan sinergi antar instansi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari peran dan fungsi kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) masih belum optimal.
3. Belum optimalnya penggunaan *data by name by adress* oleh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon. Hal ini ditunjukkan bahwa alokasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan belum merujuk pada masyarakat yang tercatat dalam data base kemiskinan atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
4. Beberapa perangkat daerah masih belum menggunakan *singe data base* dalam penanggulangan kemiskinan terutama DTSEN, sehingga masih ada data penerima bantuan yang salah sasaran.

Rekomendasi

Dinamika permasalahan kemiskinan yang bersifat multidimensi ini harus dikelola oleh semua pemangku kepentingan. Maka dalam penanggulangan kemiskinan juga harus dilakukan secara bersama sama, mengoptimalkan semua kekuatan dan potensi daerah agar penanggulangan kemiskinan bisa sesuai target.

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, rumusan rekomendasi untuk percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Cirebon adalah:

1. Keberhasilan terhadap pengurangan penduduk miskin di Kabupaten Cirebon perlu terus ditingkatkan kualitasnya. Penguatan komitmen semua pihak menjadi sangat penting agar percepatan penurunan jumlah penduduk miskin bisa terwujud dengan cepat.
2. Peran dan fungsi kelembagaan yang tergabung dalam TKPKD agar lebih dioptimalkan mengingat bahwa kelembagaan ini sangat strategis dan mencakup berbagai pemangku kepentingan.
3. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon perlu adanya arah kebijakan yang jelas antara lain :
 - a. mengintervensi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cirebon
 - b. melakukan updating data kemiskinan terutama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara kontinyu tiap tiga bulan.

- c. memberikan bantuan tunai dan sosial kepada kelompok sasaran terutama DTSEN desil 1 sampai dengan desil 4 secara berkesinambungan hingga graduasi;
 - d. penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha.
4. Intervensi dan alokasi program dan kegiatan agar memperhatikan kondisi wilayah prioritas yang membutuhkan penanganan berbagai sektor yang bisa memberikan daya ungkit bagi penurunan kemiskinan
 5. Sistem pengendalian, pemantauan dan evaluasi diupayakan dengan pemanfaatan aplikasi online mengingat bahwa wilayah Kabupaten Cirebon cukup luas dan jumlah penduduk yang relatif banyak. Sistem aplikasi yang digunakan agar mampu memotret kondisi kehidupan masyarakat miskin dengan kelengkapan data yang baik
 6. Ketidaktersediaan kajian teknis bisa menjadi salah satu kendala dalam menyusun rumusan program dan kegiatan. Hal wajar jika kemudian berbagai program penanggulangan kemiskinan menjadi tumpang tindih, tidak sinergi dan tidak terpadu yang berakhir pada masalah kemiskinan masih terus berlanjut bahkan tidak bergeming. Karena memang, penyusunan dan pelaksanaan program tidak mengenai sasaran prioritas. Dokumen ini berisi tinjauan teoritis, hasil evaluasi, dan kondisi empiris terhadap dinamika kemiskinan yang berada di Kabupaten Cirebon.
 7. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon diperlukan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut :
 - a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - d. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan; dan
 - e. sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
 8. Keberadaan dokumen perencanaan ini sifatnya yang lebih teknis dan komprehensif. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi rujukan teknis bagi setiap pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. Dokumen RPKD ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan teknis dalam membuat program dan kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon khususnya bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan unsur masyarakat pada umumnya.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON